



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERGULATAN SI MALIN KUNDANG:  
PEMIKIRAN GOENAWAN MOHAMAD TENTANG  
KEBEBASAN, KEKUASAAN, DAN DEMOKRASI DALAM  
'CATATAN PINGGIR' MAJALAH *TEMPO* (1977-1994)**

**SKRIPSI**

**IVAN AULIA AHSAN**

**NPM: 0704040211**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**DEPOK**

**JUNI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERGULATAN SI MALIN KUNDANG:  
PEMIKIRAN GOENAWAN MOHAMAD TENTANG  
KEBEBASAN, KEKUASAAN, DAN DEMOKRASI DALAM  
'CATATAN PINGGIR' MAJALAH *TEMPO* (1977-1994)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora**

**IVAN AULIA AHSAN**

**NPM: 0704040211**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
KEKHUSUSAN SEJARAH INDONESIA  
DEPOK  
JUNI 2010**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ivan Aulia Ahsan

NPM : 0704040211

Tanda tangan :

Tanggal : 21 Juni 2010

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 21 Juni 2010

Ivan Aulia Ahsan

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ivan Aulia Ahsan  
NPM : 0704040211  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul Skripsi : Pergulatan Si Malin Kundang:  
Pemikiran Goenawan Mohamad tentang Kebebasan,  
Kekuasaan, dan Demokrasi dalam 'Catatan Pinggir'  
Majalah *Tempo* (1977-1994)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Didik Pradjoko, M.Hum. ( )

Penguji : Bondan Kanumoyoso, M. Hum. ( )

Ketua Sidang : Dr. Mohammad Iskandar ( )

Panitera : Dwi Mulyatari, M.A. ( )

Ditetapkan di : Depok Tanggal : 9 Juli 2010

Disahkan pada tanggal 2010, oleh:

Dekan FIB UI : Dr. Bambang Wibawarta ( )

Mengenang:

Rasjid a.k.a. Sori Rosyadi (1937-2009)

dan

Rofiah (1929-2010)

## SEKAPUR SIRIH

Saya tak tahu persis bagaimana cara Tuhan memberi nikmat pada para mahlukNya yang kadang suka minta berlebihan itu. Yang saya agak ketahui ialah caraNya yang asyik untuk bikin mahlukNya tetap berikhtiar, antaranya dengan memberi kemudahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena itu, wahai Tuhan yang Maha Asyik, saya tak henti-hentinya berucap syukur tiada terperi kepadaMu.

Lancarnya proses penggarapan skripsi ini tak lepas dari budi baik dan pengertian yang mendalam dari Mas Didik Pradjoko selaku pembimbing yang senantiasa memberi masukan-masukan positif demi selesainya skripsi ini, juga erudisi yang tajam dari Mas Kasijanto Sastrodinomo tatkala menjadi pembimbing praskripsi. Begitu pula dengan Mas Iskandar dan Mas Bondan Kanumoyoso, yang rela meluangkan waktunya untuk menjadi ketua sidang dan penguji skripsi ini serta atas pertanyaan-pertanyaan mereka yang tajam dan menukik, saya ucapkan terima kasih. Para dosen lain di Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI merupakan pihak yang patut saya haturkan terima kasih pula.

Para petugas di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Mas Endo dan anak buahnya, adalah mereka yang memberi kemudahan bagi saya untuk mencari sumber primer. Rasa-rasanya ucapan terimakasih saja belum cukup. Saya juga mendapat masukan yang mencerahkan bagi isi skripsi ini dari JJ Rizal lewat obrolan-obrolan di tengah malam dan Sitor Situmorang ketika menemaninya menikmati air gandum. Juga kepada Meneer Adri Lopian, yang mendukung saya untuk menulis sejarah pemikiran dan sering memberi semangat untuk segera merampungkan skripsi, saya haturkan *hartelijk bedankt*. Meski banyak pihak yang membantu proses penyusunan skripsi ini, sayalah yang paling bertanggung jawab atas seluruh isinya.

Ucapan syukur dan terimakasih juga saya panjatkan atas anugerah luar biasa ini: saya dianugerahi dua orang tua yang asyik, yang penuh toleransi kepada anaknya yang sontoloyo itu. Saya tahu, mereka, Ahsan Afifudin dan Mumtazah, tak pernah berhenti berdoa untuk saya. Sepantasnyalah saya haturkan salam takzim yang paling

mendalam buat kedua beliau. Juga kepada Nur Amri El Insiyati, kakak saya dan juga saudara kandung satu-satunya, yang seakan tak bosan mengalirkan kasih sayang buat adiknya tercinta. Kepada merekalah skripsi ini saya persembahkan.

Buat anak-anak Sejarah 2004: Sammy yang juventino fanatik, Fikry Hadi yang konyol sekaligus kocak, Sulaiman yang suka bikin orang terkocok perutnya, Wisnu yang anak tunggal dan manja, Adit yang kemana-mana senantiasa menenteng koran, Dylan yang pendiam, Arief yang sudah termakan usia, Franto yang menjadi sumber inspirasi *cengan* yang tak habis-habisnya, Endang yang orang Banten, Dimas yang polos serta lugu, Dien yang ganas, Gabriella yang manis dan baik, Sania yang “cute” dan selalu diliputi rasa percaya diri tinggi, Prima yang agak tomboy, Yunia yang tipikal orang Priok: suka *hantam kromo* dan agak “sarkastik”, Nyonya Elly yang keibuan dalam hal penampilan, Mulya yang gemar mematut-matut dirinya di hadapan cermin, Ningrum dan Ekha yang relijius, Arieyanda yang badannya tegap, Myrna yang anaknya Pak Mantan KS, Marno dan Ajay yang mirip Gerombolan Si Berat, Rara yang mungil, Prisca yang rajin ke gereja, Martin yang ulet, Vini yang tekun, Ari Kediri yang nge-kos di Kutek, Yudha yang alumnus SMA 77, serta Riani yang kecanduan *game online*. Juga buat teman-teman FIB angkatan 2004 yang pernah beberapa bulan sempat menjadi “berandal malam politik” di Pendopo: Mufti, Hendra, Udjo, Farid, Rusdi, Berto, Galuh, Billy, Pino dan Tika, Putu Ayu, Ayu Sasina, James, Andri, Ecoy, Shubhi, Gus Zaki, Ali Petong, Ali Cina, dan Agla. Kalianlah yang selama duabelas semester ini menorehkan makna bagi persahabatan: sesuatu yang kelak retak dan kita membikannya abadi...

Terimakasih juga saya ucapkan kepada anak-anak jurusan sejarah dari angkatan 2000-2009 yang namanya tak sanggup saya sebut satu demi satu. Tapi nama-nama di bawah ini punya sesuatu yang spesial: Tini, Ikbal, Affandi, Indro, Gintings, Jali, Frank, Baraliq, Taufik, Tika Bantal, Deccy, Dina, Markenung dan Ajung, Diponegoro, Popon, Shafa, Mizar, Adi, Radit, Hendaru, Gamal, Soekarno, Shafira, Ikra, Ilo, Rifki, Tyson (yang beberapa bulan terakhir sering datang untuk minta “petuah” bagaimana cara menaklukkan wanita), Wahyu, Marcia, Enrico, Agung, Adelia, Ami, Ines, Gilang, Diana, Nihzat, serta Paskal. Para sahabat di PMII

Depok juga rasanya perlu saya ucapkan *maturnuwun* atas suasana “nahdliyyin”-nya: Kang Nusron, Kang Mantri, Kang Alech, Nanang, Annuri; Alfanny, Erwien, Khairul, dan Fauzan yang terkadang saya anggap layaknya abang sendiri; Riyalat, Fuad, Rozikin, Fauzi, Didik, Farida dan Indri, Rintis, Pajar, Durahman, Hasim, Munir, Kartini, dll. Kepada AU, saya tak lupa untuk berucap *thank you* atas “kehangatan” dan *midnight sms*-nya selama saya bergelut merampungkan skripsi ini. Juga untuk Wolfgang Amadeus Mozart (*God was singing through this little man...*) atas musik-musik luarbiasanya, dan Hedwigis Hedwi Prihatmoko yang telah merelakan tenaganya untuk mengoreksi kesalahan ketik dan ejaan.

Depok, 21 Juni 2010

Ivan Aulia Ahsan

## **Barangkali Telah Kuseka Namamu**

Barangkali telah kuseka namamu  
dengan sol sepatu  
Seperti dalam perang yang lalu  
kauseka namaku

Barangkali kau telah menyeka bukan namaku  
Barangkali aku telah menyeka bukan namamu  
Barangkali kita malah tak pernah di sini  
Hanya hutan, jauh di selatan, hujan pagi

GM, 1973

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Aulia Ahsan  
NPM : 0704040211  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Pergulatan Si Malin Kundang: Pemikiran Goenawan Mohamad tentang Kebebasan, Kekuasaan, dan Demokrasi dalam 'Catatan Pinggir' Majalah Tempo (1977-1994)* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 21 Juni 2010  
Yang menyatakan

(Ivan Aulia Ahsan)

## IKHTISAR

Nama : Ivan Aulia Ahsan  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul : Pergulatan Si Malin Kundang:  
Pemikiran Goenawan Mohamad tentang Kebebasan,  
Kekuasaan, dan Demokrasi dalam ‘Catatan Pinggir’  
Majalah *Tempo* (1977-1994)

Skripsi ini membahas pemikiran Goenawan Mohamad, salah satu pendiri majalah *Tempo*, tentang kebebasan, kekuasaan, dan demokrasi dalam sebuah rubrik di *Tempo* yang bernama ‘Catatan Pinggir. Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1977-1994. Tahun 1977 adalah awal mula munculnya rubrik Catatan Pinggir, sedangkan 1994 merupakan tahun ketika *Tempo* dibredel oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikirannya dalam ketiga bidang itu dipengaruhi oleh kondisi rezim Orde Baru yang represif, dan memperlihatkan bahwa Goenawan adalah salah satu tokoh yang konsisten dalam menentang rezim otoriter Orde Baru.

Kata Kunci: sejarah pemikiran, Goenawan Mohamad, Catatan Pinggir, kebebasan, kekuasaan, demokrasi, Orde Baru

## ABSTRACT

Name : Ivan Aulia Ahsan  
Study Program : History  
Title : The Struggle of Malin Kundang:  
Goenawan Mohamad's Thought about Freedom,  
Power, and Democracy in 'Catatan Pinggir' of *Tempo*  
Magazine (1977-1994)

The focus of this study is Goenawan Mohamad's thought, one of the founders of *Tempo* Magazine, about freedom, power, and democracy in *Tempo*'s rubric 'Catatan Pinggir'. The period of this study is between 1977-1994. In 1977, *Catatan Pinggir* was started and 1994 was the time when *Tempo* was banned by the government. The result of this study shows that his thought in those three domains was influenced by the repressiveness of the New Order and it also shows that Goenawan is a consistent figure who opposed the New Order's authoritarianism.

Keywords : history of idea, Goenawan Mohamad, *Catatan Pinggir*, freedom, power, democracy, New Order

## GLOSARI

<i>Apolitical developmentalism</i>	: Penyelenggaraan pembangunan dengan menafikan atau mengurangi pengaruh ideologi politik
Bredel	: Menghentikan penerbitan dan peredaran surat kabar, majalah, dsb. secara paksa
Demokrasi Terpimpin	: Sebutan umum untuk periode 1959-1965 ketika Indonesia secara politik didominasi oleh Soekarno dan ditandai oleh memanasnya persaingan antara AD dengan PKI
<i>Floating mass</i> (massa mengambang)	: Formulasi politik yang diciptakan pemerintah Orde Baru dengan tujuan untuk memisahkan rakyat, terutama di pedesaan, dari aktivitas politik praktis kecuali pada saat Pemilu
Hegemoni	: Kemampuan seseorang atau sekelompok orang yang berkuasa untuk meyakinkan golongan yang dikuasai
Humanisme universal	: Pandangan yang memegang prinsip bahwa seni dan hasil-hasilnya mesti bebas dari kepentingan macam apapun
Jurnalisme sastra	: Jurnalisme yang menggunakan langgam bahasa bercorak sastra
Ideologi	: Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup
Infrapolitik	: Gerakan politik masyarakat kelas bawah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi
Masyarakat Madani	: Supremasi masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Metafora	: Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, tetapi sebagai penggambaran yang berdasarkan persamaan atau perbandingan

Orde Baru	: Periode politik 1966-1998 ketika Soeharto menjadi presiden RI. Istilah ini diperkenalkan oleh Soeharto untuk menyebut masa pemerintahannya untuk membedakan dengan Orde Lama (era Soekarno)
Otoriter	: Tindakan yang sewenang-wenang
Paranoia	: Kelainan jiwa yang membuat penderitanya berpikir aneh-aneh yang bersifat khayalan dan selalu dirundung rasa curiga
Realisme Sosialis	: Pandangan yang berusaha mempraktekkan doktrin sosialisme dalam kesusastraan
Represif	: Bersifat menahan, mengekang, atau menekan
Rezim	: Pemerintahan yang berkuasa
Totaliter	: Pemerintahan yang menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
SEKAPUR SIRIH .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	x
IKHTISAR .....	xi
ABSTRACT .....	xii
GLOSARI .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
PENJELASAN CATATAN KAKI .....	xviii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.6 Sumber Sejarah .....	7
1.7 Sistematika Penulisan .....	9
<b>2. DARI BATANG SAMPAI JAKARTA: LATAR BELAKANG KEHIDUPAN DAN LINGKUNGAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>10</b>
2.1 Masa Kecil dan Remaja di Batang .....	10
2.2 Menjadi Mahasiswa di Jakarta .....	14
2.3 Dari Zaman yang Sarat Gejolak: <i>Affair</i> Manikebu .....	18
2.4 Menuntut Ilmu di Belgia .....	28
2.5 Menjadi Wartawan di <i>Harian KAMI</i> dan <i>Ekspres</i> .....	30
2.6 Menjadi Pemimpin Redaksi <i>Tempo</i> : Mengayuh Biduk di Antara Kompromi- Kompromi .....	33
2.7 Catatan Pinggir .....	38
<b>3. PEMIKIRAN GOENAWAN MOHAMAD TENTANG KEBEBASAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Riwayat Kebebasan Zaman Orde Baru .....	41
3.2 Kebebasan .....	45
3.3 Sensor dan Matinya Kritik .....	50
<b>4. PEMIKIRAN GOENAWAN MOHAMAD TENTANG KEKUASAAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Pentas Kekuasaan Orde Baru .....	56

4.2 Kekuasaan .....	59
4.3 Rakyat versus Negara .....	66
<b>5. PEMIKIRAN GOENAWAN MOHAMAD</b>	
<b>TENTANG DEMOKRASI</b> .....	71
5.1 Demokrasi di Indonesia Zaman Orde Baru .....	71
5.2 Demokrasi .....	73
<b>6. KESIMPULAN</b> .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	84
INDEKS .....	103
TENTANG PENULIS .....	104

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	91
Lampiran 2 .....	92
Lampiran 3 .....	93
Lampiran 4 .....	94
Lampiran 5 .....	95
Lampiran 6 .....	96
Lampiran 7 .....	97
Lampiran 8 .....	98
Lampiran 9 .....	99
Lampiran 10 .....	100
Lampiran 11 .....	101
Lampiran 12 .....	102

## PENJELASAN CATATAN KAKI

Untuk kutipan dan rujukan yang berasal dari dari buku *Catatan Pinggir* (jilid 1, 2, 3, dan 4), penulis menggunakan catatan kaki khusus. Dengan pola sebagai berikut:

- Kutipan pertama: catatan kaki seperti biasa yang diikuti dengan edisi majalah *Tempo* di mana Catatan Pinggir tersebut dimuat yang ditulis di dalam tanda kurung. Misal:

<sup>1</sup> Goenawan Mohamad. “Bebas” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 171. (Dimuat di *Tempo*, 30 September 1989).

Untuk catatan selanjutnya, kata “Dimuat di” dihilangkan.

- Kutipan yang menunjuk kepada Catatan Pinggir yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya: catatan kaki seperti biasa (*Ibid.*) yang diikuti dengan judul Catatan Pinggir dan edisi majalah *Tempo* di mana Catatan Pinggir tersebut dimuat. Misal:

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 122. “Terbuka”. (*Tempo*, 5 Agustus 1989).

Jika merujuk kepada judul Catatan Pinggir yang sama, catatan kaki ditulis sebagaimana lazimnya.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Telah banyak karangan umum dan skripsi yang menulis perihal biografi seorang tokoh, namun yang mengkaji secara khusus tentang sejarah pemikiran tokoh boleh dikata belum begitu banyak di Indonesia. Tema-tema penulisan historiografi kita lebih banyak berfokus pada soal-soal peristiwa (*event*), padahal tema sejarah pemikiran penting untuk ditulis karena dari situlah kita bisa mendapati suatu gambaran utuh tentang masa lalu: sejarah bukan hanya peristiwa yang muncul karena berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi dan mempengaruhi pemikiran manusia. Melihat sejarah Indonesia dari domain peristiwa semata akan membawa akibat ada bagian dari masa lampau yang luput dari pengamatan seorang sejarawan.

Roland N. Stromberg mendefinisikan sejarah pemikiran sebagai *the study of the role of ideas in historical events and process*<sup>1</sup> (kajian terhadap peran pemikiran dalam peristiwa dan proses sejarah). Dalam bukunya, *The Idea of History*, R.G. Collingwood menganggap semua sejarah adalah sejarah pemikiran dan sejarawan hanya melakukan *re-enactment* (menetapkan kembali) pikiran-pikiran masa lalu itu.<sup>2</sup> Selain itu ia juga mengatakan bahwa pemikiran hanya mungkin dilakukan oleh individu tunggal. Hal ini memang terlalu berlebihan dan mengabaikan jenis sejarah lain. Tetapi ini membuktikan betapa pentingnya sejarah pemikiran.

Sedangkan Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa sejarah pemikiran atau sejarah intelektual mengkaji semua fakta yang bersumber dari pikiran, ide, kepercayaan, angan-angan, dan segala unsur kesadaran dalam diri manusia. Sejarah pemikiran juga mengungkap latar belakang sosial-kultural masyarakat, lingkungan keluarga tempat tokoh itu hidup sehingga diperoleh gambaran yang sangat jelas tentang faktor-faktor sosial-kultural yang mempengaruhi pemikirannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari: Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003, hlm. 189.

<sup>2</sup> R.G. Collingwood. *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press. 1973, hlm. 282-315.

<sup>3</sup> Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia. 1993, hlm. 176-177.

Dalam konteks Indonesia masa Orde Baru (Orba), mengangkat tema sejarah pemikiran pada masa itu merupakan sesuatu yang menarik. Indonesia zaman Orde Baru adalah Indonesia yang sedang bergelut dengan kekuasaan rezim represif. Saat itu, Indonesia dipimpin oleh seorang jenderal bernama Soeharto yang memerintah dengan gaya militeristis: struktur kenegaraan dan birokrasi disusun sedemikian rupa hingga militer dengan mudah mengkooptasi kekuasaan.<sup>4</sup> Demi alasan stabilitas ekonomi dan politik, Orde Baru melakukan kontrol terhadap semua sendi kehidupan masyarakat yang memungkinkan untuk dikontrol. Dengan sokongan militer kontrol tersebut dilaksanakan secara sistematis dan efektif. Keinginan untuk terus menerus melakukan kontrol mengakibatkan munculnya sikap represif terhadap pelbagai suara-suara kritis terhadap pemerintah. Mereka yang berbeda adalah gangguan terhadap stabilitas, oleh karena itu mesti dihentikan.<sup>5</sup> Kalau pun ada kritik mesti dilakukan dengan halus dan terkadang secara sembunyi-sembunyi. Meski demikian, upaya melakukan kritik terhadap pemerintah tak pernah berhenti. Ketika “saluran-saluran resmi” untuk melancarkan kritik ternyata macet, “saluran-saluran tak resmi”<sup>6</sup>—dan ini yang paling banyak terjadi pada masa Orba—mulai muncul ke permukaan. Penyair W.S. Rendra menulis: “bila kritik hanya melalui saluran resmi, kehidupan rasanya seperti sayur tanpa garam. Tak ada alasan untuk tetap tertekan dan membisu. Hendaknya kita duduk sambil berdebat antara setuju dan tidak setuju.”<sup>7</sup> Dalam keadaan seperti ini, peranan pers dan insan pers menonjol dalam melakukan kritik terhadap pemerintah.

Salah satu media cetak yang konsisten dalam melakukan kritik terhadap pemerintah adalah majalah berita mingguan *Tempo*. Majalah ini adalah majalah berita dengan tiras terbesar di Indonesia—sekitar 150.000 eksemplar tiap pekannya—pada

---

<sup>4</sup> Lihat: David Jenkins. *Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Depok: Komunitas Bambu. 2010.

<sup>5</sup> Virginia Matheson Hooker. *Ekspresi: Kreatif Biarpun Tertekan*. Dalam Donald K. Emmerson (ed.). *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: Gramedia. 2001, hlm. 490-493.

<sup>6</sup> Saluran resmi yang dimaksud di sini adalah lembaga legislatif yaitu DPR dan MPR, sedangkan saluran tak resmi yang dimaksud adalah institusi-institusi independen di luar pemerintahan seperti LSM, kelompok seni-budaya, pers, dll.

<sup>7</sup> *Potret Pembangunan dalam Puisi*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan. 1980, hlm. 27-28.

dasawarsa 1980-an dan 1990-an.<sup>8</sup> Berbeda dengan umumnya media massa lain di Indonesia, *Tempo* tidak memiliki ikatan ideologis apapun dengan partai atau organisasi ideologis lainnya. Posisi seperti ini membuat *Tempo* tidak memiliki beban tertentu ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Pertama kali terbit pada 1971, *Tempo* didirikan oleh beberapa intelektual, seniman, dan jurnalis muda yang mengusung idealisme kebebasan pers dan menolak bentuk kekakuan berbahasa dalam menyampaikan berita. Salah satu pendiri *Tempo* adalah Goenawan Mohamad (selanjutnya disebut GM) yang pada masa itu sudah terkenal sebagai penyair dan kritikus sastra berbakat.<sup>9</sup>

Penulis tertarik memilih tema sejarah pemikiran GM pada masa Orba. Sebenarnya hal yang cukup sulit bagi kita untuk memasukkan dalam kategori mana GM ini. Ia menulis sajak dan kritik sastra, menyampaikan ceramah dalam suatu diskusi dan seminar, melakukan perlawanan terhadap represi pemerintah bersama para aktivis, juga memimpin sebuah majalah berita mingguan seraya menulis kolom rutin tiap pekan di majalah itu. Sastrawan, kritikus sastra, cendekiawan, intelektual publik, aktivis, wartawan, atau esais? Nampaknya memang cukup sulit, dan kita senantiasa mengalami kesulitan tersendiri untuk mengkotak-kotakkan seseorang ke dalam kandang kategorisasi. Tetapi penulis memegang satu pendapat sendiri mengenai hal ini: GM mempunyai pekerjaan rutin untuk menulis esai pendek dalam tiap edisi majalah *Tempo* yang ia pimpin. Esai ini menjadi rubrik yang bernama Catatan Pinggir. Maka, dalam skripsi ini penulis lebih condong untuk menyebutnya “esais”.

Skripsi ini akan meneliti perkembangan pemikiran GM dalam Catatan Pinggir majalah *Tempo*, dengan beberapa argumen: pertama, GM adalah eksponen aktivis ’66 yang turut berperan membentuk Orba tetapi kemudian menyaksikan kenyataan bahwa pemerintahan Orba ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kedua, sebagai pemimpin redaksi (pemred) majalah berita mingguan *Tempo* GM mengalami baik langsung maupun tidak langsung represi Orba dalam bentuk pembredelan dan ancaman

<sup>8</sup> Mengenai majalah *Tempo* lihat: Janet Steele. *Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru*. Jakarta: Dian Rakyat. 2007.

<sup>9</sup> A. Teeuw. *Sastra Indonesia Modern II*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1989, hlm. 134-137.

terhadap suatu berita yang dimuat. Ketiga, GM adalah penulis produktif yang tiap pekan menulis esei pendek di majalah *Tempo*. Keempat, GM punya sikap konsisten dalam hal merawat kebebasan, kemerdekaan berpikir, dan demokratisasi dalam rezim Orba.

Posisi seperti demikian sangat memungkinkan GM untuk melakukan kritik terhadap pemerintah lewat tulisan-tulisannya. Karena ketatnya sensor dari pemerintah, mau tak mau GM mesti melakukan kritik tersebut dengan hati-hati. Sebagai seorang sastrawan GM punya kelebihan untuk mengungkapkan isi kritiknya dalam selubung metafora. Ia menggunakan bermacam perumpamaan dari dunia pewayangan sampai perfilman, dari teater sampai poster. Mungkin sebab itulah kritik GM terhadap pemerintah seringkali lolos dari ketatnya sensor.

Catatan Pinggir sendiri bisa kita baca sebagai komentar atas lalu-lintas peristiwa yang terjadi pada masanya. Terkadang ditulis seperti gumam yang cenderung diakhiri dengan tanya daripada memberi jawab. Di sisi lain Catatan Pinggir, terutama yang bertema politik masa Orba, bisa kita jadikan refleksi dan catatan sejarah mengenai bagaimana sebuah sistem kekuasaan bernama Orba menjalankan kekuasaannya itu dengan segala keunikan dan kerapuhannya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan yang hendak diangkat penulis dalam skripsi ini adalah pemikiran GM tentang kebebasan, kekuasaan, dan demokrasi. Dalam Catatan Pinggir GM menulis bermacam-macam tema, baik sebagai komentar atas peristiwa yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi dari kesemuanya itu, tiga tema pemikiran yang disebut di ataslah yang banyak ditulis oleh GM. Ketiganya menjadi problem utama yang dihadapi oleh para cendekiawan ketika menghadapi kenyataan bahwa makin hari rezim Orba makin menampakkan watak represifnya. GM bergulat terus menerus dengan kenyataan ini dan tiap kali pula ia melawan lewat tulisan-tulisannya. Kondisi politik pada masa Orba tersebut berpengaruh terhadap apa yang ia tuangkan dalam Catatan Pinggir yang dituliskannya pada kurun waktu 1977-1994.

Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan untuk menelaah permasalahan itu adalah:

- Bagaimana kehidupan dan lingkungan intelektual yang membentuk pemikiran GM?
- Bagaimana kondisi dan konteks sosial-politik dalam hal kebebasan, kekuasaan, dan demokrasi pada masa Orba?
- Bagaimana pemikiran GM dalam Catatan Pinggir menyikapi permasalahan itu?

### 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Lingkup periodisasi dalam skripsi ini mencakup pemikiran GM tentang kebebasan, kekuasaan, dan demokrasi dalam Catatan Pinggir pada kurun waktu 1977-1994. Batas awal 1977 diambil karena pada tahun itulah GM mulai secara teratur menulis dalam rubrik Catatan Pinggir di majalah *Tempo*. Sebelumnya rubrik ini bernama ‘Fokus Kita’ yang umumnya berisi perkenalan para wartawan *Tempo* yang mengisi suatu nomor. Pada edisi 5 Maret 1977, Fokus Kita diganti dengan rubrik yang diberi nama “Catatan Pinggir”<sup>10</sup> dan selalu muncul dalam setiap edisi majalah *Tempo*. Isinya bukanlah tajuk rencana. Penulisnya diberi kebebasan untuk menuliskan apa saja yang ia pikirkan sebagai semacam komentar atau gumam terhadap lalu lintas ide dan peristiwa-peristiwa.<sup>11</sup> Catatan Pinggir terus berlanjut dan masih ada sampai sekarang (2010).

Sedangkan tahun 1994 diambil sebagai penutup periodisasi karena pada tahun itu, tepatnya tanggal 21 Juni 1994, Departemen Penerangan mengeluarkan surat pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) *Tempo*.<sup>12</sup> Dengan kata lain majalah *Tempo* dibredel. Alasan pembredelan itu hanya ditulis karena *Tempo* telah

---

<sup>10</sup> *Pengantar Penerbit* dalam Goenawan Mohamad. *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Grafiti Pers. 1991, hlm. v.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Janet Steele. *Op. Cit.* hlm. 216.

mengganggu stabilitas negara dan telah gagal melaksanakan prinsip Pers Pancasila.<sup>13</sup> Sebuah alasan yang mengambang dan tidak jelas. Sejak saat itu Tempo dilarang terbit dan kemudian terbit lagi pada 1998 setelah Orba tumbang. Pembredelan ini menjadi puncak kekesalan pemerintah terhadap Tempo yang selalu kritis dan bagi diri GM hal ini menjadi pertanda penting: pemerintah yang selama ini ia kritik mulai bertindak keras.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan memahami sejarah pemikiran politik seorang esais bernama Goenawan Mohamad dalam menyikapi rezim Orba yang dinilai represif dan otoriter. Pemikiran yang dibahas itu terutama menyangkut kebebasan, kekuasaan, dan demokrasi. GM adalah seorang yang dikenal karena gagasan-gagasannya perihal kemerdekaan berpikir, adalah sangat menarik jika kita mengkaji pemikiran dan pergulatannya dalam sebuah rezim yang mengekang kebebasan berpikir masyarakatnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberi sumbangan bagi historiografi sejarah pemikiran di Indonesia.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menelaah dan memahami bagaimana pemikiran GM dalam kurun waktu 1977-1994, penulis menggunakan metode sejarah. Metode ini mengenal tiga tahapan sebelum menjalani proses historiografi (penulisan). Pertama, heuristik (pengumpulan sumber), pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca Catatan Pinggir yang sudah dibukukan dalam tujuh jilid. Selain itu, penulis menelusuri arsip pribadi, korespondensi pribadi, wawancara dengan GM di media massa, dan artikel surat kabar; yang hampir semuanya penulis peroleh dari

---

<sup>13</sup> Alumni Majalah Tempo. *Buku Putih Tempo: Pembredelan Itu*. Jakarta: Yayasan Alumni Tempo. 1994, hlm. 12-15. Menurut kabar yang beredar, alasan sebenarnya pembredelan ini adalah artikel dalam majalah Tempo edisi 4 Juni dan 11 Juni yang memberitakan kisruh penyediaan dana pembelian 39 kapal perang eks Jerman Timur. Kepala proyek pembelian kapal itu adalah Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie.

Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) H.B. Jassin di komplek Taman Ismail Marzuki (TIM). Penulis juga mencari buku-buku dan jurnal sebagai sumber sekunder di berbagai perpustakaan di Jakarta dan sekitarnya: Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Freedom Institute, dan Perpustakaan Nasional RI. Studi kepustakaan ini juga termasuk menelaah semua buku dan tulisan GM yang ditulis dalam rentang waktu 1960-2007.

Kedua, kritik sumber, tahap ini merupakan pengujian terhadap sumber-sumber yang diperoleh dari tahap pertama. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan sumber yang satu dengan lainnya, serta mengidentifikasi manakah yang bisa digunakan sebagai sumber primer, sekunder, atau bahkan tidak bisa digunakan samasekali. Kredibilitas dan otentisitas sumber menjadi pertimbangan utama bagi penulis dalam melakukan pengujian.

Ketiga, interpretasi (penafsiran), melalui tahap ini sumber-sumber yang telah melalui proses kritik dianalisis dan ditafsirkan secara obyektif untuk dapat direkonstruksi dalam bentuk historiografi. Untuk menghasilkan penafsiran yang seobyektif dan seimbang mungkin, penulis berusaha melakukan pembacaan silang terhadap berbagai tulisan yang mengomentari atau mengkritik pemikiran GM.

Sedangkan dalam tahap terakhir, yaitu historiografi atau penulisan sejarah, penulis merangkai tafsir atas sumber-sumber sejarah dalam sebuah tulisan yang disusun secara kronologis dan tematis. Kronologis karena dalam membahas latar belakang kehidupan GM penulis menyusunnya berdasarkan waktu, tematis karena dalam membahas pemikirannya penulis mengelompokkan ketiga tema pemikiran masing-masing dalam bab tersendiri.

## **1.6 Sumber Sejarah**

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan sumber-sumber sejarah yang didapat berdasarkan dua kategori. Kategori pertama adalah berdasarkan sifat sumber itu: primer atau sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah Catatan Pinggir majalah Tempo dari tahun 1977-1994. Penulis beruntung karena Catatan Pinggir sudah dibukukan (sampai sekarang ada tujuh jilid) dan dalam tiap-tiap buku (jilid 1-

5) sudah diklasifikasikan oleh editornya ke dalam berbagai tema. Meski demikian, penulis tetap membaca semua Catatan Pinggir dalam periode itu dan mengklasifikasikan sendiri berdasarkan pertimbangan penulis pribadi ke dalam tiga tema yang menjadi permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Catatan Pinggir jilid 1-4. Jumlah keseluruhan Catatan Pinggir yang ada dalam periode tersebut sebanyak 793, sedangkan Catatan Pinggir yang relevan dengan tema penelitian dan penulis gunakan sebagai sumber primer sejumlah 221. Sumber primer lain adalah wawancara dengan GM di media massa.

Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan adalah berbagai buku yang relevan dengan tema yang penulis teliti, diantaranya yang terpenting: *Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru*, terkarang Janet Steele, seorang pemerhati media dari AS, yang berisi sejarah pergulatan majalah Tempo pada masa Orba (dalam bab 1-3 buku ini dibahas secara agak mendalam peranan GM di majalah Tempo beserta sisi biografisnya) ditinjau dari perspektif ilmu jurnalistik. Buku yang lain adalah *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999* yang disunting oleh David Bourchier dan Vedi R. Hadiz, berisi kumpulan tulisan, pidato, pamflet, manifesto, sajak yang menggambarkan tentang pemikiran sosial dan keprihatinan politik dari sekumpulan aktor yang terlibat dalam pembentukan Orba. Kandungan buku ini sangat membantu penulis untuk mengetahui bagaimana konstelasi pemikiran sosial-politik pada masa Orba yang pada gilirannya turut mempengaruhi pemikiran politik GM.

Sementara itu, guna membantu menelaah kondisi sosial-politik zaman Orba penulis merujuk kepada beberapa buku, diantaranya: *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*, buku yang ditulis oleh Edward Aspinall ini adalah salah satu buku yang paling komprehensif dalam membicarakan gerakan oposisi dan perlawanan politik zaman Orba; *Indonesian Politics under Soeharto*, ditulis oleh wartawan *Far Eastern Economic Review* bernama Michael Vatikiotis, yang secara gamblang menjelaskan jatuh-bangunnya sebuah rezim bernama Orde Baru; *Suharto's Indonesia* yang berisi dinamika kekuasaan Orba, ditulis oleh Hamish McDonald; dan *A Nation in Waiting: Indonesia*

*in The 1990s* yang disusun secara tekun oleh Adam Schwarz untuk menggambarkan pelbagai gejala sosial-politik di Indonesia pada awal dasawarsa 1990-an.

Kategori kedua penulis kelompokkan berdasarkan penggunaan sumber-sumber itu pada tiap bab yang ada dalam skripsi. Kategori ini penulis bagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, sumber-sumber yang digunakan untuk menulis pendahuluan (Bab 1). Kedua, sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi penulisan tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan intelektual yang membentuk pemikiran GM (Bab 2). Ketiga, sumber-sumber yang digunakan untuk menelaah pemikiran politik GM dalam Catatan Pinggir (Bab 3, 4, dan 5).

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Skripsi yang penulis sematkan judul *Pergulatan Si Malin Kundang: Pemikiran Goenawan Mohamad tentang Kebebasan, Kekuasaan, dan Demokrasi dalam Catatan Pinggir Majalah Tempo (1977-1994)* ini dibagi ke dalam lima bab dan kesimpulan. Bab Satu adalah pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang pemilihan judul dan permasalahan yang hendak ditelaah. Selain itu, dikemukakan juga perihal tujuan penulisan baik secara umum maupun khusus serta metode yang digunakan dalam penulisan ini. Pula diterangkan mengenai pemerian sumber dan sistematika penulisan.

Pada Bab Dua dijelaskan perihal latar belakang kehidupan dan lingkungan intelektual yang membentuk pemikiran GM, sebagai pijakan menuju bab berikutnya. Selain itu, penjelasan mengenai karirnya di majalah *Tempo* dan Catatan Pinggir-nya juga tersurat dalam bab ini.

Bab Tiga sampai Lima berturut-turut berisi telaah sejarah pemikiran GM tentang kebebasan, kekuasaan, dan demokrasi. Pada masing-masing bab itu akan dijelaskan mengenai kondisi dan konteks sosial-politik Indonesia pada masa Orba.

Terakhir, Bab Enam, adalah kesimpulan penulis terhadap semua penjelasan dan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

**BAB 2**  
**DARI BATANG SAMPAI JAKARTA:**  
**LATAR BELAKANG KEHIDUPAN DAN LINGKUNGAN INTELEKTUAL**

“Djakarta, sedjak tahun 1960 itu, adalah tempat jang keras dan asing, di mana seorang anak dusun bisa menggosok-gosokkan punggungnja hingga tebal dan kukuh, dan menggosok-gosokannja hingga beberapa sisa masa lalu jang melekat seperti daki itu kikis, makin pudar....”

Goenawan Mohamad, *Potret Seorang Penjair Muda Sebagai Si Malin Kundang* (1972)

**2.1 Masa Kecil dan Remaja di Batang**

Goenawan Mohamad terlahir dengan nama Goenawan Susatyo, di suatu desa nelayan Karangasem di Batang, kota kecil di pantai utara Jawa Tengah, pada tanggal 29 Juli 1941. Batang terletak 20 kilometer dari Pekalongan, sebuah kota kecil yang ramai yang menjadi pusat perniagaan batik di pantai utara Jawa Tengah. Dibandingkan dengan Pekalongan, Batang tidak terlalu ramai. Kota ini seperti layaknya kota-kota lain di pantai utara Jawa Tengah: hawanya cenderung panas, agak lembab, dan menjadi ramai karena dilalui oleh jalan raya pantai utara Jawa. Secara kultural, kota ini tidak terlalu akrab dengan budaya Jawa dari keraton (Surakarta dan Yogyakarta). Mereka lebih akrab dengan tradisi-tradisi pesisiran yang lebih egaliter. Dalam hal bahasa, orang-orang dari daerah ini punya dialek yang berbeda dengan bahasa Jawa dari Surakarta atau Yogyakarta yang terkesan halus dan mendakik-dakik. Dialek mereka khas daerah pesisiran yang terdengar kasar, agak cepat, dan lebih akrab dengan bahasa sehari-hari (*ngoko*) ketimbang bahasa Jawa halus (*kromo*).

GM anak bungsu dari delapan bersaudara, yang mayoritas perempuan. Ia mengaku bukan berasal dari keluarga terkemuka di daerah kelahirannya. Ibunya, Rukayah, seorang wanita desa biasa. Sedangkan bapaknya, Zaid Mohamad, adalah seorang mantan aktivis yang pernah dipenjara di Boven Digul setelah pemberontakan komunis 1926. Zaid merupakan seorang tokoh Marxis yang berpengaruh di daerah

Pekalongan dan sekitarnya.<sup>14</sup> Sejak berumur enam tahun GM sudah yatim. Bapaknya meninggal ditembak mati pasukan Belanda yang menduduki desanya pada saat Agresi Militer Belanda I bulan Juli 1947. Ketika itu rumahnya dikepung pasukan Belanda, hari masih agak gelap. GM bangun pagi-pagi bersama ibunya dan melihat seorang serdadu Belanda memasang senapannya di pagar kebun belakang rumah mereka.<sup>15</sup> Bapaknya mencoba bersembunyi tapi tertangkap, kemudian tangannya diikat dan dinaikkan ke atas truk. GM ingat seluruh keluarganya duduk ketakutan, lalu dua orang serdadu mematahkan bedil kayu mainannya dan membuang berjilid-jilid buku dari kamar kerja bapaknya ke dalam sumur. Serdadu itu juga menyita sebuah radio kesayangan GM. Bapaknya kemudian ditembak mati setelah ditahan beberapa hari.<sup>16</sup> GM tak tahu persis kenapa, tapi ia menduga bapaknya ditembak karena terus menerus melakukan aktivitas politik menentang pendudukan Belanda.<sup>17</sup> Bahkan ia pun tak sempat melihat jenazah ayahnya, “sebab ketika jenazah itu dibawa pulang oleh ipar saya tertua, saya dilarikan ke sebuah rumah lain oleh *mbakyu* saya yang menangis,”<sup>18</sup> demikian ia mengenang. Ia juga ingat beberapa saat sebelum bapaknya meninggal:

“Sebelum bapak saya dibunuh, ibu saya bilang bahwa ia tahu Bapak akan mati. Bapak pernah bermimpi. Ini memang semacam mistik. Bapak bilang kepada ibu, ‘Saya bermimpi makan tiga buah nangka, manis sekali, saya duga saya akan mati. Kamu sebaiknya siap-siap. Kubur perhiasan emas yang kamu punya untuk biaya sekolah anak-anak.’ Itu memang angan-angannya. Anak-anak harus terus sekolah. Lalu, kemudian, dia dibunuh dengan tiga peluru di kepala. Saya tak pernah lihat jasadnya. Saya dilarang untuk melihatnya.”<sup>19</sup>

Sebagai anak yang masih berumur enam tahun pada saat itu, ia tak mengenal dan tak mengingat lebih jauh sosok bapaknya. Foto-foto bapaknya hilang ketika GM dan keluarganya mengungsi dari tempat ke tempat, ke daerah aman yang dikuasai

<sup>14</sup> Soe Hok-Gie. *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*. Yogyakarta: Benteng. 2005, hlm. 45.

<sup>15</sup> “Wartawan Penyair dari Pesisir”. Wawancara GM dengan Tuti Indra Malaon dan Kemala Atmojo. *Matra* No. 33, April 1989.

<sup>16</sup> Goenawan Mohamad. “Buku”. Catatan Pinggir. *Tempo*, 2 Mei 2010.

<sup>17</sup> “Saya Takut: Tentang Kemerdekaan Berpikir, Pemecatan PWI, dan Tempo”. Wawancara GM dengan Hermien Y. Kleden, Urry Kartopati, dan Widjajanto. *Matra* No. 107, Juni 1995.

<sup>18</sup> *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> Janet Steele. *Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru*. Jakarta: Dian Rakyat. 2007, hlm. 7.

Republik. Tentang bapaknya, S.K. Trimurti, wartawan perempuan dan aktivis pergerakan nasional yang mengenal bapak GM, pernah mengatakan: “Bapakmu besar, kok kamu sebegitu saja.”<sup>20</sup> Mungkin untuk membandingkan bapaknya yang tinggi besar dengan GM yang agak kecil dan kerempeng. Yang paling dikenang dari bapaknya adalah benda-benda yang masih mengingatkan dia pada sosok sang bapak: selebar foto tua, kamus Webster tahun 1939 (keduanya kini telah raib), dan keris. GM juga ingat bahwa ia berbicara bahasa Jawa halus dengan sang bapak dan diharuskan menjadi orang pintar.<sup>21</sup>

Semenjak bapaknya meninggal, GM diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Tidak seperti anak-anak usia sebayanya yang lebih gemar bermain-main, masa kecilnya di Batang dihabiskan dengan membaca. Menurut pengakuannya, kira-kira sejak kelas 3 SD ia sudah mulai menyukai buku. Ketika itu kakak perempuannya yang bersekolah di luar kota mengirim dua buah buku, salah satu diantaranya buku tentang bagaimana nyamuk berbiak, dalam bahasa sederhana dan gambar besar. Tapi mungkin kecintaannya pada buku sebenarnya lebih awal dari itu. Bapaknya banyak meninggalkan buku tebal-tebal dalam bahasa Inggris. Ada kamus dan ada pula buku sejarah Inggris yang penuh dengan ilustrasi. “Mungkin itu semua yang menyebabkan saya mencintai buku, sebab ada semacam peti dengan sepatu ajaib di sana,”<sup>22</sup> kata GM. Ia bersama kakak-kakaknya juga sering memesan buku ke berbagai penerbit terkenal, seperti Balai Pustaka, Nordhoff Kolff, dan Panjekar Semangat. Hari tibanya buku pesanan lewat pos selalu dinantikan dengan tegang, GM dan kakaknya selalu berebut siapa yang akan membaca lebih dulu. Beberapa buku kegemarannya yang dibaca saat itu adalah buku-buku Karl May dan Tom Poes. Ia juga membaca *Si Doel Anak Betawi*, yang menyebabkannya dalam usia bocah, jauh di pedesaan Jawa Tengah, bisa berbahasa Betawi.<sup>23</sup>

Bagi GM kecil, buku tak ubahnya seperti pesawat ajaib. Tinggal di kota kecil tanpa gedung bioskop, buku adalah satu-satunya media untuk memasuki dunia dan

---

<sup>20</sup> *Matra* No. 33, April 1989.

<sup>21</sup> Janet Steele. *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

<sup>22</sup> “Di Hatinya Buku Itu Raja”. *Gadis*, 7-16 Januari 1985.

<sup>23</sup> *Gadis*, 7-16 Januari 1985.

ilmu pengetahuan. “Hanya dengan buku saya memasuki dunia lain yang sebenarnya tak pernah tertembus,”<sup>24</sup> tulisnya. “Buku itu ibarat mesin waktu bagi saya. Bisa dinaiki ke mana saja dan ke zaman apa saja... dengan buku saya bisa menyelam ke sejarah masa lampau... dan dengan buku pula saya bisa menghayati cita-cita di masa datang,” tuturnya pula dalam sebuah iklan layanan masyarakat.<sup>25</sup>

GM bersekolah di SR (Sekolah Rakyat) Negeri di Parakan, Batang. Setelah itu ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Pekalongan. GM adalah anak Batang pertama yang bersekolah di SMA negeri itu, karena pada umumnya anak dari desanya miskin sehingga tak mampu untuk melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA, apalagi perguruan tinggi.<sup>26</sup> Saat masih duduk di bangku SMA, dalam usia 17 tahun, ia menulis esai tentang sajak penyair wanita Amerika, Emily Dickinson, sekaligus menerjemahkannya.<sup>27</sup> Sejak itu ia tak lagi menggunakan nama Goenawan Soesatyo dalam tulisan-tulisannya, tapi menggunakan nama Goenawan Mohamad—yang terus dipakai sampai saat ini.<sup>28</sup> Sedangkan sajak yang pertama ia tulis adalah ketika ia masih berusia 11 tahun, waktu itu ia menulis sebuah sajak tentang rembulan.<sup>29</sup>

Seperti diakuinya sendiri bahwa semenjak kecil memang sudah terasa ada jarak antara dia dan lingkungan masa kecilnya. Jarak yang senantiasa membuatnya untuk berlari segera meninggalkan masa lalunya, namun tetap tak bisa lepas. Ia tetaplah seorang anak desa yang sentimentil, yang selalu punya romantisme tersendiri dengan masa lalunya.<sup>30</sup> Jarak itu makin melebar tatkala tamat SMA di Pekalongan tahun 1960. Setamat SMA ia pergi ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI).

---

<sup>24</sup> *Tempo*, 2 Mei 2010.

<sup>25</sup> “Si Goen bakal terkenal sebagai wartawan dan tokoh sastra”. Iklan Layanan Masyarakat. *Mutiara* No. 293, April-Mei 1983.

<sup>26</sup> “Saya Nggak Pernah Memikirkan Cinta”. Wawancara GM dengan Wicaksono. *Mode* No. 3, 4-17 Februari 1991.

<sup>27</sup> *Matra* No. 107, Juni 1995.

<sup>28</sup> “Goenawan Mohamad: How Low Can You Go”. Wawancara GM dengan Suryansyah. *Tiras*, 2 Februari 1995.

<sup>29</sup> Goenawan Mohamad. “Potret Seorang Penjair Muda Sebagai Si Malin Kundang” dalam *Potret Seorang Penjair Muda Sebagai Si Malin Kundang: Kumpulan Esai*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1972, hlm. 10-11.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

## 2.2 Menjadi Mahasiswa di Jakarta

Dalam sebuah esai panjang yang ditulis pada 1972, *Potret Penjair Muda Sebagai Si Malin Kundang*, GM menggambarkan dirinya sebagai Malin Kundang. Kalimat pembuka esai itu adalah, “Malin Kundang telah terkutuk, dan tak seorangpun mentjoba memahaminja.” Dari kalimat itu kita bisa menilainya sebagai suatu usaha dari si penulis untuk mencoba memahami dirinya sendiri. Kemalinkundangannya, juga “keterkutukannya”, menjadi sebuah simbol pencarian seseorang yang seakan telah terlepas jauh dari tanah kelahirannya. Seperti tergambar dari judul esai itu yang meminjam dari judul sebuah novel James Joyce, sastrawan Irlandia pelopor modernisme sastra Barat, *A Portrait of the Artist as a Young Man*, GM seakan hendak menunjukkan dirinya, sebagai Malin Kundang, telah “mendurhakai” tanah kelahirannya sendiri dengan cara “mengembara” ke Barat. Meski sebenarnya ia merasa pengembaraan itu sudah dijalani jauh sebelumnya ketika sebagai seorang bocah kampung ia gemar membaca buku karya para penulis Barat. Ditulisnya pula: “anak muda itu telah berpindah dari ketenteraman sunji seorang anak, kepada dunia pentjiptaan jang gelisah... Ia pindah ke Djakarta.”<sup>31</sup>

Jakarta pada awal tahun 1960-an adalah kota yang tengah sibuk dengan gelora revolusi ala Soekarno. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian, Jakarta sudah mulai ramai dikunjungi orang dari kampung yang datang mengadu nasib dengan tujuan bermacam-macam: kerja, sekedar numpang hidup, atau bersekolah. Pada saat itu Demokrasi Terpimpin baru mulai dilaksanakan dan Soekarno mulai menampakkan tanda-tanda kediktatorannya dibungkus dengan slogan dan jargon revolusioner. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) telah menjelma menjadi satu kekuatan politik besar, pada saat bersamaan Angkatan Darat (AD) juga makin menguasai panggung politik nasional. Kedua kelompok ini berseteru secara ideologis dalam ranah politik. Soekarno berada di antara kedua kekuatan politik itu dan memelihara kedua-duanya agar saling mengimbangi satu sama lain. Jakarta sebagai ibukota negara adalah kota yang paling merasakan kondisi politik seperti itu.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Ketika itu ia diterima di jurusan Sastra Prancis dan Psikologi. Ia mesti memilih salah satu di antaranya. Sejak semula cita-citanya memang menjadi sastrawan. Oleh karena itu, setelah membaca tulisan H.B. Jassin, *Tifa Penyair dan Daerahnya*, ia lebih memilih jurusan Psikologi; dengan alasan bahwa untuk menjadi penulis yang baik seseorang harus tahu banyak tentang filsafat, psikologi, dan sosiologi.<sup>32</sup> GM mengatakan:

“Saya pilih Psikologi UI karena saya ingin belajar filsafat. Di Fakultas Sastra saya juga diterima, Sastra Perancis. Tapi tidak ada filsafat di sana. Kedua saya ingin belajar psikologi dan ketiga sosiologi. Itu semua ada di psikologi. Ketika psikotes, saya lulus. Sedikit sekali dulu yang masuk psikologi. Barangkali 17 orang. Karena masuk melalui psikotes, fakultas lain tidak, dekannya menganggap semua yang masuk ke Fakultas Psikologi jenius.”<sup>33</sup>

Di tahun pertama mahasiswa belajar anatomi perbandingan, ilmu sel, dan ilmu jaringan dengan praktikum misalnya mengoperasi kodok. Juga diajarkan matakuliah statistik, yang di Fakultas Ekonomi baru diajarkan di tahun ke-2. Ia mengaku sangat bodoh dalam bidang-bidang itu. Hal ini menyebabkannya menjadi malas berkuliah.<sup>34</sup>

Pada saat itu GM sudah mulai sering menulis dan banyak dimuat di berbagai media massa. Tulisannya lebih banyak bertema tentang kesusasteraan, selain ia juga menulis sajak. Ini tidak mengherankan karena memang sejak semula ia bercita-cita menjadi penyair. Cita-citanya ini membuatnya langsung dekat dengan mahasiswa lain yang punya keminatan sama. Di kota ini pula ia bertemu dengan banyak orang yang bisa dijadikan teman untuk mengadu dan bertengkar pendapat. H.B. Jassin<sup>35</sup> adalah orang yang turut menentukan arah hidup GM. Mungkin Jassin sudah mengenal nama GM sejak sebelum ia kuliah di UI. Karya GM pernah dimuat di majalah *Sastra* pimpinan Jassin dalam bentuk esai tentang sajak-sajak Emily Dickinson pada saat ia masih duduk di bangku SMA. Oleh karena itu dengan mudah ia diterima di lingkaran Jassin. Meskipun pada awalnya ia sempat malu-malu dan tidak percaya diri untuk memperkenalkan diri kepada Jassin. Baru setahun kemudian mereka saling bertemu

<sup>32</sup> Goenawan Mohamad. “Jassin” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 423. (Dimuat di *Tempo*, 8 Agustus 1987).

<sup>33</sup> “Teater sebagai Peristiwa”. Wawancara GM dengan Alfred Ginting. *Playboy Indonesia*, April 2007.

<sup>34</sup> *Playboy Indonesia*, April 2007.

<sup>35</sup> H.B. Jassin adalah ahli sejarah sastra dan kritikus sastra terkemuka di Indonesia, ia dijuluki ‘Paus Sastra Indonesia’. Pada awal tahun 1960-an ia masih mengajar di Fakultas Sastra UI.

dan berkenalan. Orang yang berjasa mengenalkan GM kepada Jassin adalah Arief Budiman,<sup>36</sup> adik kelasnya di jurusan Psikologi. Setelah perkenalan dengan Jassin itu GM menjadi semakin jauh masuk ke dalam lingkaran Jassin dan kemudian turut menentukan aliran sastra yang dipilih GM.

Di antara teman-temannya GM dikenal sebagai anak desa yang pemalu. Ini mungkin disebabkan karena pembawaannya yang lembut dan cenderung pendiam. Tabiat yang tak berubah sampai sekarang. Meski demikian ia gemar sekali berdiskusi dan bertukar pendapat dengan kawan-kawannya. Di Jakarta nampaknya ia telah menemukan tempat peraduan yang cocok dengan ide-idenya. Bersama kawan-kawannya yang memiliki keminatan yang sama dalam dunia intelektual dan sastra GM membentuk suatu kelompok diskusi di rumah Wiratmo Soekito.<sup>37</sup> Saat itu banyak sekali mahasiswa yang sering bertandang ke rumah Wiratmo, biasanya untuk membaca buku dan berdiskusi. Di antara para anggota kelompok diskusi informal ini adalah Salim Said, Arief Budiman, Fikri Jufri, dan Nono Anwar Makarim, yang kelak pada tahun 1971 bersama-sama GM mendirikan majalah *Tempo*.

Bersama dengan merekalah ia kemudian menemukan dunia yang selama ini dicarinya. Bergaul dengan banyak orang dari berbagai latar belakang pemikiran membuatnya lebih terbuka dalam menerima pemikiran dan paham-paham baru. Waktu itu ia dekat dengan orang-orang Partai Sosialis Indonesia (PSI), bahkan sempat menumpang di asrama mahasiswa PSI. Meski demikian ia mengaku bukan anggota PSI, ia hanya dekat secara pribadi dan pemikiran dengan orang-orang di lingkaran PSI. Pada saat itu memang banyak mahasiswa kritis yang bersimpati

---

<sup>36</sup> Arief Budiman (nama aslinya Soe Hok Djin) adalah salah satu aktivis angkatan 1966 yang menjadi kawan karib GM. Ia turut membidani lahirnya majalah *Tempo* pada tahun 1971 dan menjadi pelopor gerakan 'golput' (Golongan Putih) pada tahun 1970-an dalam rangka menentang represi politik Orde Baru.

<sup>37</sup> "Gunawan Mohamad". Wawancara GM dengan Adham A. Hamzah. *Minggu Pagi* No. 17, 28 Juli 1963. Wiratmo Soekito adalah penulis dan intelektual terkenal pada tahun 1960-an. Ia pernah menjadi Kepala Program Pemberitaan RRI dan bergabung dalam Kongres Antikomunis untuk Kebebasan Kultural. Ia dikenal sangat "kanan" dan konservatif. GM mengakui Wiratmo sebagai mentor filsafatnya, dan terkadang Wiratmo dengan murah hati meminjamkan buku, juga meminjamkan "tempat tidurnya yang runyam" untuk GM. "Saya dan beberapa teman... sering berada di sana," kata GM. Lihat: Goenawan Mohamad. *Affair Manikebu, 1963-1964* dalam *Eksotopi: Tentang Kekuasaan, Tubuh, dan Identitas*. Jakarta: Grafiti. 2002, hlm. 119.

dengan PSI. Pergaulannya dengan para seniman dan sastrawan juga turut mempengaruhi pemikiran budaya dan kesusasteraannya.

Keasyikannya menggeluti dunia kesusasteraan membuat GM sering mangkir kuliah hingga ia banyak tertinggal dalam pelajaran. Sebenarnya, paling tidak menurut pengakuan beberapa teman dan dosennya, ia mahasiswa pintar. Tapi kelihatan sekali tidak serius dalam mengikuti perkuliahan. Mungkin dunia psikologi dengan segudang pelajaran eksaknya tidak memuaskan hati GM karena tak sesuai dengan harapannya semula. Dalam sebuah surat kepada Jassin tertanggal 3 Agustus 1962, GM menulis dari Yogyakarta:

“Tanggal 26 Djuli j.l. saja meninggalkan Djakarta. Tujuan: Surabaya, Djokdja, Sala, Pasuruan dan beberapa kota lain. Perpisahan dengan Djakarta jang berat djuga, karena harus meninggalkan beberapa tugas (tentamina dsb). Tapi saja tidak bisa tahan lagi. Sudah lama saja tjoba bertahan untuk mengkompromikan diri dengan tugas sematjam itu, tapi pertahanan jang tidak ichlas. Barangkali karena kemalasan saja. Apapun sebabnja, rasa jang mendorong saja pergi demikian kuatnja: dan sajapun pergi. Untunglah saja bisa membontjeng beaja perdjalanana pada Sanggarbambu, kelompok pelukis kemana saja rasakan kesatuan hati saja tertudju.<sup>38</sup>

Akibat dari “pengembaraan”-nya ini, GM mesti mengulang beberapa mata kuliah dan malah jadi tertinggal oleh Arif Budiman, adik kelasnya. Surat di atas bertahun 1962, saat GM berada di tingkat ke-3. Ini berarti memang sudah sejak awal-awal kuliah GM sudah malas-malasan mengikuti perkuliahan. Cara mengajar dosen yang terlalu kaku tidak mengenakkan baginya. Saat itu, yang mengajar sosiologi, misalnya, seorang Belanda yang bukan sosiolog. Karena tidak ada tenaga waktu itu. Para mahasiswa hanya diberi buku, lalu disuruh baca keras-keras secara bergiliran, seperti anak Sekolah Dasar.<sup>39</sup> Meski demikian baginya masih ada beberapa dosen yang menarik semisal Fuad Hasan, yang kelak menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>40</sup> “Tapi kebanyakan dosen lain tidak. Jadinya, psikolog menjadi tukang tes. Maaf saja. Saya tidak tertarik. Saya tertarik untuk mendapat ilmunya, karena saya ingin jadi penulis,”<sup>41</sup> katanya pula.

<sup>38</sup> Surat GM kepada H.B. Jassin, 3 Agustus 1962. File GM di PDS H.B. Jassin.

<sup>39</sup> *Playboy Indonesia*, April 2007.

<sup>40</sup> Goenawan Mohamad. “Guru” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 474. (*Tempo*, 9 Mei 1987).

<sup>41</sup> *Playboy Indonesia*, April 2007.

### 2.3 Dari Zaman yang Sarat Gejolak: *Affair Manikebu*

Di tengah kondisi politik era Demokrasi Terpimpin, PKI muncul ke gelanggang kekuasaan menjadi suatu kekuasaan besar dan menghegemoni wacana politik zaman itu. Tanda-tanda kemenangan PKI sudah nampak berkat agitasi populisnya yang banyak diterima oleh orang-orang di pedesaan. Pada tahun 1963 PKI mengklaim mempunyai lebih dari 2 juta pengikut dan 12 juta anggota organisasi massanya.<sup>42</sup> Jika perhitungan tersebut benar itu berarti PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Partai Komunis Tiongkok dan Partai Komunis Uni Sovyet. Di medan wacana kebudayaan ideologi PKI juga muncul melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sebuah organisasi para seniman dan sastrawan yang secara ideologi dekat dengan PKI. Didirikan oleh D.N. Aidit (Ketua Komite Central PKI), M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan Njoto pada tahun 1950, Lekra menekankan pentingnya doktrin ‘seni sebagai alat politik’. Dengan dukungan keuangan dan politik dari PKI, Lekra tumbuh menjadi organisasi besar dan berpengaruh yang mempropagandakan aliran ‘realisme sosialis’ dalam seni.<sup>43</sup> Pramoedya Ananta Toer, salah satu tokoh utama Lekra, memberikan definisi realisme sosialis sebagai, “mempraktikkan sosialisme di bidang kreasi-sastra.” Maka sastra yang mempergunakan metode ini “selamanya punya warna” dan lebih penting lagi adalah “politik yang tegas, militan, kentara, tak perlu malu-malu kucing atau sembunyi-sembunyi.”<sup>44</sup>

Lekra dari awal mengemukakan pandangan kesusastraan yang menekankan pentingnya ekspresi kebebasan individual. Bagi Lekra, seni yang hanya didasari atas kebebasan individu semata, pandangan yang lazim disebut ‘humanisme’, adalah seni yang kosong dan sama sekali tidak bermanfaat bagi perjuangan ke arah sosialisme. Humanisme ala Barat itu selalu punya kecenderungan untuk menjadi ‘humanisme borjuis’. Paham humanisme seperti itu muncul ke dalam wacana kebudayaan

---

<sup>42</sup> Donald Hindley. *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. California: University of California Press. 1964, hlm. 284-285.

<sup>43</sup> Keith Foulcher. *A survey of events surrounding Manikebu. The struggle for cultural and intellectual freedom in Indonesian literature*. BKI 125 No. 4, 1969, hlm. 429-465.

<sup>44</sup> Pramoedya Ananta Toer. *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia*. Jakarta: Lentera Dipantara. 2003, hlm. 16-17.

Indonesia ketika pada 1950 beberapa orang seniman dan sastrawan memproklamkan apa yang disebut *Surat Kepertjajaan Gelanggang* dalam sebuah edisi majalah *Siasat*. Ini adalah pernyataan yang menegaskan konsep tentang betapa pentingnya manusia sebagai satu-satunya realitas universal—suatu konsep yang didasari atas pendirian Chairil Anwar. Dengan alasan itulah, menurut para seniman Lekra, pandangan universalisme para penulis Gelanggang sangat berbahaya. Perjuangan kelas mesti dipecahkan masalahnya terlebih dahulu sebelum berbicara perihal universalisme. Oleh karena itu, segala aktivitas kesusastraan mesti diarahkan untuk membantu rakyat dalam perjuangannya menghapus perbedaan kelas. Sejak itu perdebatan antara kelompok realisme sosialis dengan kelompok humanisme makin menajam, lewat serangkaian tulisan di majalah yang mereka terbitkan (kelompok humanisme dalam *Siasat*, realisme sosialis dalam *Zaman Baru*).<sup>45</sup> Perdebatan ini disertai pula dengan berbagai konferensi para pengarang yang membawa ideologi sastra masing-masing.

GM berada dalam pusaran kelompok yang berseberangan dengan pandangan Lekra itu. Sejak awal kuliah memang ia sudah akrab dengan H.B. Jassin, orang yang juga terlibat intens dalam perdebatan tersebut. Pada awal tahun 1960-an Jassin memimpin majalah bulanan *Sastra* yang menjadi semacam wadah bagi para penulis yang berpandangan humanisme. Mungkin bukan hanya faktor Jassin seorang yang membuat GM lebih dekat kepada pandangan humanisme. Sejak SMA GM telah mengikuti perdebatan sastra realisme sosialis versus humanisme, dan dari situ pula mungkin ia lebih condong untuk ikut ke dalam garis humanisme. Sebuah esai kritik sastranya yang bertanggal 27 April 1960 (ini berarti sebelum ia mengenal secara pribadi dengan Jassin), *Puisi yang Berpijak di Bumi Sendiri*, menunjukkan pada sisi mana ia berpihak:

“Salah satu kebebasan pertama seorang pencipta adalah kebebasannya dari sikap kolektif yang mengikat diri, dan bahaya orang yang terlalu memperhatikan ‘rumus-rumus’ umum yang dikenakan di atas kesadaran keseorangannya ialah terbentuknya

---

<sup>45</sup> D.S. Moeljanto. “Dari Gelanggang, Melalui Lekra hingga Manifes Kebudayaan yang Terlarang”. Prolog dalam D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail. *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI Dkk*. Jakarta: Institute for Policy Studies. 2008, hlm. xxxiv-lxx.

diri dalam lindungan kolektivisme. Hasilnya nanti tidak akan lebih dari hasil tukang proyeksi ‘suara umum’ dan penyodoran kemutlakan ajaran.”<sup>46</sup>

Jelas sekali dari muda GM memang menentang segala bentuk kungkungan yang mengekang kebebasan individu tiap penyair. Ia condong kepada pemahaman bahwa penyair yang jadi “tukang proyeksi ‘suara umum’” hanya akan meracuni kejujuran hasil karyanya. “Persepsi tiap penyair adalah miliknya sendiri, dengan kekuatan dan sifat unik yang hanya mungkin apabila ia mempunyai kejujuran yang fundamental dalam mencerapkan alam di sekitarnya.”<sup>47</sup> Dalam tiap karyanya penyair mesti hadir sebagai penyair itu sendiri, sebagai individu yang punya pengalaman batin unik tersendiri ketika bergulat menghadapi lingkungannya.

“Penyair mana pun yang baik, kehadirannya mula pertama adalah sebagai seorang penyair. Lebih jauh lagi sebagai seorang manusia dengan semua masalahnya, dalam suatu kehidupan. Hasil sastranya pun bukan hasil suatu eksemplar dari jumlah, tetapi hasil keseorangan yang betul-betul utuh.”<sup>48</sup>

Seperti diakuinya dalam *Potret Penyair Muda*, melalui esai ini GM rupanya telah menuliskan suatu sikap yang kemudian berlanjut terus dalam dirinya, namun tak sepenuhnya ia sadari. Sikap seperti inilah yang membuatnya terlibat langsung dalam peristiwa Manifes Kebudayaan.

Serangkaian debat panjang antara realisme sosialis versus humanisme terus makin sengit pada awal tahun 1960-an itu. Puncaknya terjadi ketika pada bulan September 1963 majalah bulanan Sastra menerbitkan sebuah pernyataan sikap tentang pandangan terhadap kesenian dan kebudayaan, pernyataan yang dikenal dengan nama ‘Manifes Kebudayaan’. Isinya:

“Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan, yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami.

Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan Kebudayaan Nasional, kami berusaha menciptakan dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk

---

<sup>46</sup> Goenawan Mohamad. “Puisi yang Berpijak pada Bumi Sendiri” dalam *Kata, Waktu: Esai-Esai Goenawan Mohamad 1960-2001*. Jakarta: PDAT. 2001, hlm. 2.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai Bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa.  
Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami.”<sup>49</sup>

Pernyataan ini ditandatangani oleh 20 orang: 16 penulis, 3 pelukis, dan 1 komponis. GM adalah salah satu dari kedupuluh orang itu.<sup>50</sup> Pernyataan ini terdiri atas 3 bagian, yang pertama adalah ‘Manifes Kebudayaan’ (kutipan di atas); kedua ‘Penjelasan Manifes Kebudayaan’; dan ketiga Literatur Pancasila.<sup>51</sup> Ketika dimuat di Sastra manifes ini melampirkan ‘Sejarah Lahirnya Manifes Kebudayaan’, sebuah esai berisi latar belakang munculnya Manifes yang ditulis oleh GM.<sup>52</sup> Melalui Manifes ini mereka mengukuhkan pemikiran tentang pentingnya memurnikan kesenian dan kebudayaan beserta hasil-hasilnya dari tendensi dan kepentingan, baik kepentingan rakyat maupun kepentingan politik.

Wiratmo Soekito, yang menurut GM menyusun 95% dari isi Manifes, menyelesaikan naskah Manifes pada 17 Agustus 1963, tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-18. Setelah dibaca dan disetujui oleh GM dan Bokor Hutasuhut, naskah tersebut digandakan dan dibagikan kepada beberapa budayawan terkemuka untuk dimintai tanggapannya. Kemudian dilakukanlah serangkaian pertemuan untuk membahas dan memantapkan naskah itu agar bisa dipahami dengan jelas oleh para penandatangan. Bertempat di Jalan Raden Saleh 19, pada 23 Agustus 1963, diadakan rapat untuk membahas Manifes. Rapat tersebut dipimpin oleh GM yang kemudian memberi kesempatan kepada Wiratmo Soekito untuk memberi penjelasan mengenai makna, sasaran, dan rumusan Manifes Kebudayaan. Lalu terjadilah tanya-jawab, tukar pikiran, dan perdebatan yang terkadang cukup tajam. Soal humanisme universal ternyata adalah masalah yang cukup pelik dalam diskusi itu. Banyak peserta rapat yang menanyakan apa arti sebenarnya dari humanisme

<sup>49</sup> D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail. *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>50</sup> Sembilan belas orang lainnya adalah H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Bokor Hutasuhut, A. Bastari Asnin, Bur Rasuanto, Soe Hok Djinn (Arief Budiman), D.S. Moeljanto, Ras Siregar, Hartojo Andangdjaja, Sjahwil, Djufri Taanissan, Binsar Sitompul, Taufiq Ismail, Gerson Poyk, M. Satibi Afri, Poernawan Tjondronagoro, dan Boen S. Oemarjati.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.107-121.

<sup>52</sup> Ketika dimuat di Sastra, nama GM tak dicantumkan sebagai penulis esai itu. GM sendirilah yang mengakui hal ini dalam sebuah esai panjangnya yang berisi tentang pandangannya seputar peristiwa Manifes Kebudayaan, *Affair Manikebu, 1963-1964*.

universal. Nampaknya mereka belum satu kata sepakat untuk merumuskan apa itu humanisme universal. Dalam menjelaskan permasalahan itu Wiratmo Soekito menerangkan kepada para peserta bahwa kebudayaan sebagai pernyataan hidup manusia mempunyai tendensi-tendensi universal, dalam arti bahwa kebudayaan itu bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi untuk semua bangsa. Meski demikian, kebudayaan itu mempunyai titik tolak dan titik tolak itu adalah titik tolak nasional.<sup>53</sup>

Esok harinya, diadakan sidang pengesahan Manifes Kebudayaan yang masih tetap dipimpin oleh GM. Bokor Hutasuhut melaporkan tentang hasil kerja panitia perumus dan menetapkan bahwa Manifes Kebudayaan terdiri dari tiga bagian: 1. Manifes Kebudayaan, 2. Penjelasan Manifes Kebudayaan, 3. Literatur Pancasila. Secara aklamasi sidang akhirnya menerima hasil kerja panitia perumus. Selain itu juga diambil keputusan bahwa pada prinsipnya Manifes tak bisa diubah lagi dan tidak apriori melahirkan organisasi kebudayaan.<sup>54</sup>

Diakui sendiri oleh GM, para penandatangan naskah itu mungkin ada yang tak sepenuhnya memahami isinya, mereka mengambil inisiatif semata-mata berdasarkan rasa kesetiakawanan.<sup>55</sup> Tapi mungkin juga ada beberapa di antaranya yang benar-benar paham dan dengan sadar ikut menandatangani naskah itu. Meski isi Manifes agak membingungkan dan melambung, motif dasarnya bisa terlihat dengan jelas. Pernyataan itu bisa dibaca sebagai usaha untuk memperoleh ruang yang lebih longgar bagi ekspresi kesenian yang mandiri, yang independen dari desakan politik dan pelbagai gelora revolusioner saat itu. Manifes juga menekankan pentingnya kebebasan dari kemiskinan dan rasa takut, serta kebebasan yang selama itu mereka perjuangkan: kebebasan berekspresi.

Dalam rumusan yang lebih langsung, tujuan Manifes tertera dalam tulisan GM, 'Sejarah Lahirnya Manifes Kebudayaan'. Tulisan ini bisa dimaknai sebagai semacam usaha untuk meringkas sejarah pemikiran para penggagasnya dan menerangkan salah satu konsep penting tentang kebebasan kreatif. Menurut GM,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>55</sup> Goenawan Mohamad. "Affair Manikebu, 1963-1964" dalam *Eksotopi: Tentang Kekuasaan, Tubuh, dan Identitas*. Jakarta: Grafiti. 2002, hlm. 109.

dalam sejarahnya pada dasarnya kreativitas menolak belenggu. Kaum karyawan kebudayaan memang memilih sosialisme karena mereka berkehendak untuk bebas. Akan tetapi, dalam perjuangan ke arah kebebasan itu mereka “tidak hendak membuang kebebasan yang sekarang didapatkan buat memperoleh kebebasan yang lebih besar, ...sebab setiap situasi memaksakan kita untuk bebas.” Oleh karena itu kebutuhan akan kebebasan sekarang dan yang akan datang adalah “kebutuhan yang mau tak mau akan dirasakan oleh kaum karyawan kebudayaan.” GM juga mengaitkan perjuangan menuju kebebasan itu dengan sosialisme yang “berdasarkan Pancasila”. Rumusan yang ia tulis dalam esai ini memang terkesan melambung dan punya kecenderungan tersirat yang lebih besar daripada maksud tersuratnya. Hal ini adalah salah satu usaha untuk menyesuaikan diri dengan bahasa masa itu yang amat dipengaruhi oleh idiom-idiom Demokrasi Terpimpin.

Memang demikianlah kecenderungan pada masa itu. Mau tak mau, jika ingin selamat dari represi kekuasaan, orang mesti berbicara dengan nada yang sama dengan bahasa kekuasaan. Meski Manifes tidak secara terang-terangan menyerang penguasa, bahkan mereka sendiri menolak dikatakan bahwa mereka menentang Bung Karno, karena dalam paragraf awal ‘Penjelasan’ mereka mengutip panjang-lebar pidato Bung Karno tentang Pancasila, Manifes tetap saja dianggap berseberangan dengan arus utama kekuasaan. Menurut GM, penerimaan Manifes terhadap pikiran-pikiran dan teori revolusi Bung Karno lebih didasarkan atas pengakuan yang sederhana bahwa memang ada kebenaran yang terkandung di sana.<sup>56</sup> Hanya saja Manifes memberi perhatian khusus kepada adanya penolakan terhadap pemamahbiakan ideologi resmi, sebab ideologi itu mesti diterima sebagai sesuatu yang tak tertutup dan tak berhenti. Mungkin karena itulah salah satu kalimat yang sering dikutip oleh para penandatangan Manifes adalah “kami tidak menyembah aksara”. Dalam hubungannya dengan kekuasaan itu Manifes sebenarnya menekankan bahwa kesusastraan senantiasa dapat berharga, meski tidak diciptakan menurut ketentuan yang sudah digariskan oleh penguasa. Dengan kata lain kesusastraan mesti bebas dari tendensi politik. Karena dalam kebebasannya, kesusastraan bisa lebih jujur

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

mengungkapkan isi hati, dan dengan kejujuran itu kesusastraan tidak sekedar menjadi alat propaganda ideologi. Sebab “propaganda dengan mudah terjadi ketika komitmen sosial kesusastraan menyempit menjadi sekedar afiliasi politik”, apalagi manakala afiliasi ini pun “makin menyempit menjadi sekedar kesetiaan kepada ‘komandoisme’ partai.”<sup>57</sup>

Sementara itu, panggung politik Indonesia makin terasa sebagai arena konflik antara AD dengan PKI. Kedua belah pihak tak henti-hentinya saling menyerang dan masing-masing menunggu siapa yang lebih dahulu melakukan kesalahan politik. Keduanya pun, secara bersama-sama, mengekor sang penguasa yang makin hari makin menjadi patron politik terbesar dan satu-satunya. Dengan caranya sendiri masing-masing dari mereka siap memberi dukungan jika ada pihak yang sedang bertentangan atau berkonflik dengan musuhnya. Orang-orang Manifes tak luput dari sangkaan bahwa militer ada di belakang mereka. Pada awal Maret 1964 diadakanlah Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPSI) di Jakarta, sebagai ajang pertemuan dan konsolidasi para sastrawan dan seniman seluruh Indonesia yang mendukung Manifes. Orang-orang Lekra sudah memboikot acara ini sedari awal diumumkannya. Menurut Keith Foulcher, meski dihalangi oleh orang-orang Lekra lewat seruan boikot itu, acara ini tetap berjalan dengan dukungan dari AD dan panglima besarnya, Jenderal A.H. Nasution.<sup>58</sup> Ia sangat menyadari arti penting KKPSI sebagai sarana untuk menggalang kekuatan anti PKI di bidang kebudayaan dan karena itulah ia menyediakan dana dan kemudahan lain untuk memungkinkan terselenggaranya konferensi tersebut. Dukungan itu memang tak muncul dengan terang-terangan, tapi terkesan sangat kuat bahwa secara terselubung AD ada di belakang mereka. Apalagi saat itu memang sangat susah bagi penyelenggaraan konferensi kebudayaan kecuali didukung oleh suatu institusi yang punya banyak uang.

GM menyangkal pendapat yang menyatakan bahwa Manifes didukung oleh AD. Ia bercerita, sekitar bulan Juli 1963 ia dan beberapa kawannya bertandang ke

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Keith Foulcher. *Loc. Cit.*, hlm. 442-443.

Hotel Salak, Bogor, tempat tinggal sastrawan Iwan Simatupang. Di ruangan Iwan nampak terlihat ada seorang tamu yang mengaku orang SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), sebuah organisasi yang didirikan dengan dukungan tentara. Orang itu menawarkan kepada GM dan kawan-kawan tentang idenya untuk mendirikan organisasi kebudayaan. Tapi GM tidak mengiyakan lantaran orang itu terlihat seperti tak tahu apa-apa tentang seni atau kesusastraan. Sepulangnya ke Jakarta ia bercerita kepada Wiratmo Soekito mengenai pertemuan itu. Wiratmo cuma berujar bahwa memang sudah saatnya untuk menjelaskan pendirian kebudayaan mereka, bila perlu dituliskan dan diumumkan. Jika orang-orang SOKSI mau menerimanya, dengan senang hati bisa diadakan kerja sama. Jika tidak, pendirian kebudayaan itu mesti tetap diumumkan. Pada akhirnya ketika Manifes diumumkan, SOKSI menolak menyetujuinya.<sup>59</sup>

GM tidak menerangkan lebih lanjut dan gamblang tentang tidak adanya peran AD dalam mendukung Manifes Kebudayaan. Tapi dalam hal dukungan terhadap KKPSI, GM menyatakan bahwa AD secara ironis mengkonfirmasi dugaan keterlibatan dalam Manifes dengan cara mendukung orang-orang Manifes dalam menyelenggarakan KKPSI. GM menilai semua hal yang terjadi sebagai upaya PKI, yang sedang meningkatkan militansinya, menjadikan Manifes sebagai “sasaran yang bagus untuk menggerakkan diri.” Pada saat yang sama PKI juga melihat Manifes sebagai suatu ancaman politik: sebuah langkah baru AD untuk menentang posisi PKI yang sedang unggul dalam bidang ideologi.<sup>60</sup> Di titik inilah peran Wiratmo patut dipertanyakan. Dalam sebuah tulisan tahun 1982, Wiratmo menyatakan bahwa ia “bekerja” secara sukarela pada dinas rahasia angkatan bersenjata.<sup>61</sup> Meski tak jelas sejak kapan ia mulai bekerja: sebelum atau sesudah Manifes. Andaikata hal ini benar, baik ia bekerja sebelum atau sesudah Manifes, konfirmasi atas dugaan keterlibatan AD makin kuat. Karena bagaimanapun peristiwa Manifes tidak berdiri sendiri, Manifes adalah suatu simpul besar dari rangkaian perdebatan panjang yang terjadi dari awal dasawarsa 1960-an sampai menjelang keruntuhan PKI. Jika pun ia mulai

<sup>59</sup> Goenawan Mohamad. *Op. Cit.*, hlm. 118-120.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>61</sup> Wiratmo Soekito. “Satyagraha Hoerip atau Apologia Pro Vita Lekra”. *Horison* No. 11, 1982.

bekerja sesudah peristiwa Manifes, yang berarti bahwa pernyataan Manifes Kebudayaan itu sendiri “steril” dari pengaruh pihak mana pun, tetap saja keseluruhan rangkaian peristiwa yang mengikutinya tak sepenuhnya bebas dari peran AD.

GM sendiri menduga, dari kalimat dalam tulisan Wiratmo, sesudah Manifes diumumkanlah Wiratmo mulai bekerja. Apalagi ketika Manifes mulai mendapat serangan gencar dari PKI. Ia memaklumi apa yang dilakukan Wiratmo sebagai “kecenderungan yang normal untuk beraliansi di antara mereka yang dimusuhi, atau memusuhi, PKI”.<sup>62</sup> Agaknya memang ada sesuatu yang disembunyikan dalam hal ini. Orang-orang Manifes Kebudayaan tentu saja menyangkal pendapat tentang adanya dukungan AD di belakang mereka. Sebab mereka, dalam setiap pernyataannya, selalu menolak intervensi apa pun dalam dunia kesusastraan. Tapi demikianlah keadaannya, mungkin bagi mereka tak ada jalan lain karena pihak yang sedang berkonflik dengan mereka didukung sepenuhnya oleh satu kekuatan politik yang besar.

Sebagai balasan dari diterbitkannya manifes ini para seniman Lekra yang dipimpin Pramoedya Ananta Toer menerbitkan lembar kebudayaan di harian Bintang Timur dengan nama ‘Lentera’. Melalui lembar ini mereka menulis berbagai artikel yang menyerang dan terkesan menyudutkan para seniman Manifes.<sup>63</sup> Pada saat itu PKI sedang sangat dekat dengan kekuasaan dan menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Sehingga musuh-musuhnya bisa saja dengan mudah disudutkan. Stigma ‘kontrarevolusioner’ atau ‘antek nekolim’ biasa disebut PKI untuk menghantam lawan-lawan politiknya yang dianggap dekat dengan pemikiran Barat. Stigma inilah yang juga dialamatkan kepada kelompok Manifes. Sejak September 1963 sampai dengan 8 Mei 1964, serangkaian kampanye yang sengit, panas, dan sistematis dilancarkan terutama oleh mereka yang punya hubungan dekat dengan PKI dan PNI.

---

<sup>62</sup> Goenawan Mohamad. *Op. Cit.* Catatan Kaki hlm. 144.

<sup>63</sup> Istilah ini kemudian terkenal dengan singkatan ‘manikebu’. Sebuah singkatan yang diciptakan oleh seniman Lekra di *Harian Rakyat*. Mungkin bertujuan untuk memberi stigma sebab seolah-olah ‘manikebu’ berasosiasi dengan ‘mani kebo’ (sperma kerbau).

Selama tujuh bulan Manifes Kebudayaan diserang lewat pernyataan, pidato, dan tulisan.<sup>64</sup>

Serangan orang-orang Lekra terutama menyangkut konsep humanisme universal yang diusung Manifes dan sangat ditentang oleh Lekra. Konsep itu ditafsirkan oleh Lekra sebagai sebuah upaya terselubung dari musuh revolusi, karena itu mesti dihancurkan. Sastrawan Bakri Siregar, anggota Lekra, menyatakan bahwa humanisme universal adalah “lawan kita, jang setjara tegas kita ganjang”. Wacana yang diusung oleh Manifes hanyalah kedok dari musuh-musuh revolusi untuk menghancurkan gelora revolusi Indonesia, “...karena dia mengabdikan pada lawan revolusi, di belakang segala matjam kedok dan variasi istilah, antaranja kedok demi-estetika”. Serangan lain datang dari Virga Belan yang menyatakan bahwa tidak hanya konsep humanisme universal yang mesti dilawan, tapi para pendukungnya pun harus dihancurkan dan bila perlu disingkirkan dari Indonesia.<sup>65</sup> Kelompok humanisme sendiri dijuluki sebagai ‘reaksioner’—sebuah julukan berkonotasi negatif yang biasanya dikaitkan dengan musuh revolusi—karena mereka anti-Manipol.<sup>66</sup>

Serangan-serangan dari Lekra kepada Manifes cenderung keras dan sengit, bahkan mengarah kepada penyingkiran-penyingkiran. Gaya seperti ini sangat khas serangan dari penguasa negara-negara komunis yang totaliter terhadap musuh politiknya. Sebagai penandatanganan manifes GM mesti berhadapan langsung dengan para penentangannya di kelompok Lekra. Melalui tulisan-tulisannya di majalah *Sastra* ia turut menyerang balik serangan dari kelompok Lekra itu. Ia sendiri mengenang kadang serangan itu justru menyemangatnya untuk lebih mendalami filsafat Marxisme sebagai sarana memperkuat argumen.<sup>67</sup> Pemikiran Marxis memang mengatakan bahwa kebudayaan yang ada pada suatu masa adalah kebudayaan dari kelas yang berkuasa, tapi Manifes mencoba menunjukkan bahwa “justru karena tidak

<sup>64</sup> Goenawan Mohamad. *Op. Cit.*, hlm. 108.

<sup>65</sup> Keith Foulcher. *Loc. Cit.*, hlm. 441-442.

<sup>66</sup> Manipol adalah kependekan dari ‘Manifesto Politik’, yang merupakan gagasan Bung Karno (pengikutnya lebih suka menyebut ‘ajaran’) tentang bagaimana seharusnya perpolitikan nasional. Gagasan yang lain adalah lima pilar yang mesti dijadikan pegangan bagi bangsa Indonesia: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (disingkat: USDEK). Dua gagasan ini biasanya disebut dalam satu frase ‘Manipol-USDEK’.

<sup>67</sup> Janet Steele. *Op. Cit.*, hlm. 31.

termasuk dalam kelas yang berkuasa, orang dapat membentuk kekuatan baru”—bagi GM kekuatan baru itu mewujudkan dalam “kekuatan kreatif”.<sup>68</sup> Karena itulah Manifes merumuskan sikap kesenian dan pemikiran yang perlu mengambil jarak dengan kekuasaan.

Kemudian akhir dari semua itu makin terlihat jelas. Setelah delapan bulan perdebatan itu terjadi dan bergema keras ke seluruh Indonesia, tiba-tiba, pada 8 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa Manifes Kebudayaan dilarang. Sebabnya disebutkan dalam pernyataan itu karena Manifes dianggap telah menyaingi Manifesto Politik Bung Karno sebagai garis besar haluan negara. Selain itu, Manifes dinilai “menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi dan memberi kesan berdiri di sampingnya.”<sup>69</sup>

#### **2.4 Menuntut Ilmu di Belgia**

Pada tahun 1965, GM mendapat beasiswa dari *Congress of Cultural Freedom* (CCF) untuk belajar di Belgia. CCF adalah lembaga nirlaba dari Eropa yang berusaha mengumandangkan pemikiran-pemikiran liberal dan antikomunis.<sup>70</sup> Karena kedekatan dan ketertarikan lembaga ini dengan pemikiran orang-orang Manifes mereka menyediakan peluang beasiswa untuk belajar di Eropa bagi anak-anak muda dari kelompok Manifes yang cemerlang. Di sana GM menekuni studi ilmu politik. Satu hal yang kebetulan adalah keberangkatan dia terjadi tak lama setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S), sehingga banyak yang mencurigai hal ini ada sangkutpautnya dengan gerakan antikomunis di Indonesia. Namun hal ini dibantah oleh Arief Budiman yang menyatakan bahwa keberangkatan GM yang tak lama setelah G30S adalah murni kebetulan, tidak ada motivasi tertentu.<sup>71</sup> Di Belgia, GM belajar di kota Brugge sembari tetap mengikuti perkembangan politik di Indonesia.

---

<sup>68</sup> Goenawan Mohamad. *Op. Cit.*, hlm. 129.

<sup>69</sup> D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail. *Op. Cit.*, hlm. 319.

<sup>70</sup> <http://bss.sfsu.edu/fischer/ir%20360/Readings/Congress%20Cultural%20Freedom.htm>. Diakses pada 20 Juni 2010 pukul 15.36 WIB.

<sup>71</sup> Janet Steele. *Op. Cit.*, hlm., 34.

Pada periode ini GM menulis banyak sekali surat-surat kepada para sahabatnya di tanah air. Surat-suratnya banyak berkulat perihal kebebasan berekspresi, demokratisasi, dan depolitisasi seni yang kelihatannya punya prospek baik di bawah pemerintahan yang baru. Dalam suratnya kepada Soe Hok-Gie, aktivis 1966 yang juga adik Arief Budiman, GM menegaskan pendapatnya tentang apa yang mesti disiapkan para intelektual muda menghadapi demokratisasi di Indonesia:

“...pada hemat saja, target dari usaha menumbuhkan demokrasi di tanah air dewasa ini harus bermodal persiapan mental: berani mentolerir “the dissenting voice” ke arah jg tidak didjangkiti “infantile disorder”, berani mengkritik setjara radikal sistem jg ada. Mudah2an persiapan mental tsb bisa lahir dan berkembang dng tersedianja lembaga2 demokratis, termasuk pers...”<sup>72</sup>

Selain menulis surat dan belajar, GM melakukan bermacam aktivitas yang menunjang studinya. Waktunya dihabiskan untuk membaca, menulis, bepergian ke kota-kota di Eropa, dan, untuk menambah uang sakunya, mengerjakan proyek penerjemahan untuk Ivan Kats (seseorang yang bekerja pada CCF Asia Program). Hubungan dengan Ivan Kats rupanya berkembang menjadi persahabatan yang akrab, hal ini tergambar dari korespondensi di antara keduanya baik ketika GM masih di Eropa maupun saat ia sudah berada di Indonesia. Hal ini membuktikan pula bahwa memang GM adalah intelektual muda Indonesia penting yang perlu didukung oleh CCF, intelektual yang bisa dianggap berada dalam kategori “liberal”.

Sementara itu, gejolak politik di Indonesia makin memanas setelah terjadi peristiwa G30S. Demonstrasi mahasiswa marak terjadi di berbagai kota di Indonesia yang menuntut perbaikan ekonomi dan penyelesaian peristiwa G30S. Kawan-kawan GM banyak yang bergabung dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Puncaknya adalah pada tahun 1966 ketika mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Fakultas Kedokteran UI menuntut Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura): penurunan harga kebutuhan pokok, pembubaran PKI, dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Perkembangan seperti ini tetap diikuti oleh GM dari Belgia melalui berita radio dan surat-suratnya kepada kawan-kawan di Jakarta. Peristiwa G30S kemudian diikuti oleh pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh terlibat dalam

---

<sup>72</sup> Surat GM kepada Soe Hok-Gie, 28 Djuli 1966. File GM di PDS H.B. Jassin.

PKI. Mengomentari peristiwa yang terjadi pasca-G30S, GM menulis dalam suratnya untuk H.B. Jassin dari kota Brugge tertanggal 30 Januari 1966:

“Di Barat, ....pembunuhan2—“massacre”—adalah sesuatu jg bisa didjadikan polemik, jg bisa melahirkan gerakan pasifis.... Di negeri kita kini “violence” mendjadi fakta se-hari2. Fakta jg tak terbantah dan proses jg tak tertjegah! Berdosakah kita, atau tak berdosakah kita?

Di Eropah ini saja tak begitu berhak menilainja. Haruskah saja, jg berdjalan dgn aman dari satu tempat ke tempat lain, menilai mereka jg bertarung antara hidup dan mati? Hati saja mengatakan bahwa saja harus, tapi saja tak bisa. Saja tak berhak. Itulah sebabnja saja marah waktu membatja (dgn pertolongan seorang kawan Denmark) tadjukrentjana harian Information jg terbit di Kopenhagen memprotes ‘kebiadaban’ di Indonesia. Marah, sebab mereka hanjalah penonton jg tak ambil bagian. Apa tahu mereka?”<sup>73</sup>

Surat ini menunjukkan kegalauan dan keprihatinan GM dalam melihat situasi yang berkembang di Indonesia. Di negeri yang jauh, GM hanya bisa menjadi penonton yang tak bisa berbuat banyak bagi negerinya. “Inilah jg menjebakkan saja sering merasa kosong di Eropah: saja hanjalah titik jg tak berarti, djuga bagi tanahair saja”.<sup>74</sup>

Pada akhir musim panas 1966 GM bersiap untuk pulang ke Jakarta. Ia merencanakan untuk bergabung dengan *Harian KAMI* yang dibentuk oleh kawan-kawannya pada bulan Juni 1966. Arief Budiman lah, pada saat itu sebagai salah satu redaktur *Harian KAMI*, yang menawarkan pekerjaan sebagai redaktur kepada GM.<sup>75</sup> Setibanya di Jakarta, situasi politik sudah berubah. Soekarno masih presiden namun pengaruhnya sudah mulai surut oleh tekanan tentara dan mahasiswa. GM kemudian diterima menjadi salah satu redaktur *Harian KAMI*.

## 2.5 Menjadi Wartawan di *Harian KAMI* dan *Ekspres*

*Harian KAMI* adalah surat kabar yang didirikan oleh para aktivis 1966 sebagai corong untuk menyuarakan pendapat mereka. Meski oplahnya tidak besar, kehadirannya cukup signifikan dalam masa awal Orde Baru. Bersanding bersama harian lain—*Indonesia Raya*, *Mahasiswa Indonesia*, *Nusantara*—*Harian KAMI* sering bersuara kritis kepada pemerintah Orde Baru. Sikap kritis ini ditujukan bila

<sup>73</sup> Surat GM kepada H.B. Jassin, 30 Januari 1966. File GM di PDS H.B. Jassin.

<sup>74</sup> *Loc. Cit.*

<sup>75</sup> Surat Arief Budiman kepada GM. File GM di PDS H.B. Jassin.

pemerintah dinilai mulai melenceng dari cita-cita Orde Baru. Dipimpin oleh Nono Anwar Makarim, harian ini dengan cepat menjadi sebuah surat kabar nasional berkat hubungannya dengan KAMI dan juga disebabkan oleh segarnya pendekatan editorial mereka.<sup>76</sup> GM bekerja sebagai redaktur di harian ini.

Di sela kesibukannya sebagai redaktur *Harian KAMI*, GM menikah dengan perempuan pujaannya, Widarti Djajadisastra. Pernikahan ini berlangsung di Sukabumi pada hari Minggu, 14 Juli 1968.<sup>77</sup> Widarti adalah alumnus Fakultas Sastra UI, ia bertemu GM ketika masih menjadi mahasiswa tingkat skripsi. Soe Hok-Gie adalah orang yang berjasa mempertemukan mereka berdua. Ketika di suatu acara diskusi Widarti melihat GM, sebelumnya ia tidak pernah tahu dan tidak kenal siapa GM meski pada waktu itu GM sudah cukup terkenal, ia bertanya kepada Hok-Gie siapa orang itu. Hok-Gie menjawab bahwa GM adalah teman kakaknya, Arief Budiman. Setelah itu Widarti makin sering melihat GM di berbagai forum diskusi dan ia pun makin memperhatikan lelaki itu, sampai akhirnya kekasih Arief Budiman, Leila, memperkenalkan mereka. Barulah kemudian Hok-Gie membantu mengakrabkan mereka.<sup>78</sup> Dari pernikahannya dengan Widarti, GM dikaruniai dua orang anak yang bernama Hidayat Jati dan Paramita.<sup>79</sup>

Di tengah kebahagiaan sebagai pengantin baru, pada tahun 1970 GM dan rekan-rekannya meninggalkan *Harian KAMI* dan bergabung bersama Fikri Jufri mendirikan majalah *Ekspres*. GM mendirikan majalah ini dengan ikhtiar menjadi majalah berita mingguan seperti *Time* atau *Newsweek*, karena saat itu belum ada majalah berita mingguan semacam itu di Indonesia. *Ekspres* terbit pertama kali pada 26 Mei 1970 dalam sebuah edisi perkenalan, GM menjabat sebagai pemimpin redaksi. Redaktornya menyatakan dalam ‘Surat dari Redaksi’ bahwa *Ekspres* ingin memperlihatkan corak wajah dan ciri isinya yang agak berbeda dengan majalah-

---

<sup>76</sup> Francois Raillon. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES. 1989, hlm. 21.

<sup>77</sup> Undangan pernikahan GM dengan Widarti Djajadisastra. File GM di PDS H.B. Jassin.

<sup>78</sup> “Widarti Gunawan”. Wawancara Widarti Gunawan dengan Rita Nariswari Pramulyani dan Antyo Rentjoko. *Jakarta-Jakarta* No. 398, 19-25 Februari 1994.

<sup>79</sup> “Problemnya, kalau nanti kembali, dia tak punya teman”. Wawancara GM dengan Victor Manahara. *Tiara* No. 32, 4-17 Agustus 1991.

majalah yang sudah ada sebelumnya. Saat itu memang tidak ada majalah bergambar di Indonesia, yang banyak beredar adalah mingguan hiburan dan majalah berkala yang sifatnya serius.<sup>80</sup>

*Ekspres* pelan-pelan menjadi terkenal dan banyak dikutip secara luas karena dinilai sebagai mingguan yang isi maupun kebijakan redaksionalnya cukup berimbang.<sup>81</sup> Ketika itu surat kabar di Indonesia cenderung berafiliasi dan disubsidi oleh partai politik, sementara majalah *Ekspres* berusaha untuk keluar dari politik partisan. Pembentukan *Ekspres* bukan dilandasi alasan ideologis antikomunis ataupun anti-Orde Lama, hal ini murni untuk membesarkan nama dan mengembangkan karir jurnalistik orang-orang yang terlibat di dalamnya.<sup>82</sup>

Setelah enam bulan bekerja di *Ekspres*, GM dipecat dari majalah ini karena komentar-komentarnya yang kritis terhadap perpecahan dalam tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Saat itu pemerintahan Orde Baru masih bayi dan sedang berusaha melakukan konsolidasi politik dan kekuasaan. Lewat Operasi Khusus (Opsus) tentara mencoba memasukkan orang mereka, B.M. Diah, sebagai ketua PWI untuk melawan Rosihan Anwar yang lebih independen. Menanggapi masalah ini, GM mengatakan bahwa persoalan PWI bukanlah persoalan mempersatukan kepengurusan Rosihan Anwar dengan B.M. Diah, tapi memperjelas dasar-dasar konstitusional organisasi tersebut dalam konflik yang tengah terjadi.<sup>83</sup> Kebetulan yang menjadi sasaran kritik GM adalah orang yang menjadi kaki tangan Opsus. Sehingga GM tak bisa dipertahankan lagi di majalah *Ekspres*. Apalagi B.M. Diah adalah Ketua Dewan Direktur P.T. Aksi Press yang menerbitkan majalah itu.

Kisruh ini berakhir pada 3 November 1970 ketika GM dan wakil pemimpin redaksi Fikri Jufri beserta wakil pemimpin umum Christianto Wibisono diberhentikan dengan hormat dari *Ekspres*. Surat pemberhentian itu ditandatangani oleh Marzuki Arifin, pemimpin umum majalah tersebut. Alasan pemberhentian ini, menurut Marzuki, karena GM membuat pernyataan mengenai konflik PWI di harian *Sinar*

---

<sup>80</sup> "Surat dari Redaksi". *Ekspres* (Nomor Contoh), 26 Mei 1970.

<sup>81</sup> "Pimpinan Redaksi Expres Ttg Keritjuhan PWI". *Sinar Harapan*, 2 November 1970.

<sup>82</sup> Janet Steele, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>83</sup> *Sinar Harapan*, 2 November 1970.

*Harapan*. Sekalipun pernyataan GM itu dikeluarkan atas nama pribadi, Marzuki menilai hal itu bertentangan dengan kebijaksanaan pimpinan *Ekspres* yang tidak mau melibatkan diri dalam konflik PWI. GM menganggap pemberhentian ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan majikan (pemilik penerbitan) terhadap wartawan karena pemimpin umum *Ekspres* belum mendengarkan keterangan langsung dari orang yang dipecat.<sup>84</sup>

## **2.6 Menjadi Pemimpin Redaksi Tempo: Mengayuh Biduk di Antara Kompromi-Kompromi**

Setelah dipecat dari *Ekspres*, GM dan kawan-kawan praktis menganggur. Tapi semangat yang dilandasi idealisme untuk membuat majalah berita mingguan bermutu tidak ikut menganggur. Mereka jelas tidak punya cukup uang untuk membuat sebuah majalah, kecuali ada pemodal yang berminat menyokongnya. Dan mereka pun sibuk mencari pemodal itu. Kemudian datanglah Lukman Setiawan, bekas wartawan olahraga harian Kompas, membawa kabar baik tentang adanya seorang pemodal yang tertarik dengan keinginan GM dan kawan-kawan dan mengajak bertemu di Lapangan Golf Ancol.<sup>85</sup> Pemodal itu adalah seorang pengusaha keturunan Tionghoa bernama Ciputra. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha properti papan atas yang dekat dengan Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Ciputra memimpin kelompok usaha P.T. Jaya Development Group (JDG) yang merupakan usaha bersama antara Ciputra dengan Pemerintah DKI Jakarta (Pemda Jakarta). Kelompok ini berkonsentrasi untuk mengembangkan bisnis dalam rangka pembangunan infrastruktur di Jakarta. Bagian dari JDG yang bekerja sama dengan GM dan kawan-kawan adalah Yayasan Jaya Raya.<sup>86</sup> Yayasan ini didirikan pada 1970 dan merupakan organisasi sosial di bawah naungan JDG yang juga dipimpin oleh Ciputra. Jaya Raya sepakat memberi pinjaman modal untuk mendirikan sebuah majalah dengan uang sebesar 20 juta rupiah.<sup>87</sup>

<sup>84</sup> “Nurman Diah Menutup Kantor Ekspres”. *Kompas*, 4 November 1970.

<sup>85</sup> “Semacam Total Football Begitulah”. Suplemen 15 Tahun Tempo. *Tempo*, 1 Maret 1986.

<sup>86</sup> Janet Steele. *Op. Cit.*, hlm. 50-52.

<sup>87</sup> “Kebetulan Laris”. Suplemen 15 Tahun Tempo. *Tempo*, 1 Maret 1986.

Ciputra turun tangan langsung dalam negosiasi alot dengan GM dan kawan-kawan. Tapi keliatan dan sikap keras kepala para wartawan muda itu untuk mempertahankan independensi majalah dari kepentingan pemilik modal membuat Ciputra terheran-heran. Ia sudah terbiasa bernegosiasi dengan pengusaha Jepang dan tidak pernah berpanjang-panjang, sampai-sampai Ciputra bertanya siapa sebenarnya mereka itu. Kesepakatan ini terkesan unik: saham dibagi masing-masing pihak (wartawan dan pemilik modal) 50%. Jaya Raya menyediakan uang, para wartawan menyediakan keahlian. Bagi GM dan kawan-kawan, tujuan utama dalam kesepakatan mereka dengan Ciputra dan Jaya Raya adalah mencapai kebebasan editorial. Pengalaman di *Ekspres* memberi pelajaran kepada mereka tentang perlunya para karyawan memiliki 50% saham perusahaan. Kelak, pada 1974, kedua belah pihak sepakat membentuk satu badan penerbit, namanya P.T. Grafiti Pers, dan saham dibagi dua masing-masing 50%.<sup>88</sup>

Dengan modal 20 juta itu akhirnya terbitlah sebuah majalah yang diberi nama '*Tempo*'. Alasan pemberian nama itu diterangkan dalam 'Pengantar Redaksi' edisi perdana majalah *Tempo* yang ditulis oleh GM:

"Pertama, nama itu singkat dan bersahadja, enak diutjapkan oleh lidah Indonesia dari segala djurusan. Kedua, nama ini terdengar netral, tidak mengedjutkan ataupun merangsang. Ketiga, nama ini bukan simbol suatu golongan."<sup>89</sup>

Memang sangat penting untuk menegaskan netralitas atau independensi sebuah media massa. *Tempo* lahir dalam sebuah era ketika sentimen antipartai dan penolakan terhadap kepentingan partai politik dalam pers begitu kuat.<sup>90</sup> Majalah itu muncul bukan lewat kesepakatan politik, melainkan antara sekelompok pemilik modal dengan beberapa orang jurnalis muda. Di tahun itu, hampir semua kekuasaan partai politik mulai terlucuti. Wacana politik masyarakat didominasi oleh rezim militer baru

---

<sup>88</sup> "1971-1977: Kantor yang Bergoyang". Suplemen 15 Tahun *Tempo*. *Tempo*, 1 Maret 1986.

<sup>89</sup> "Pengantar Redaksi". *Tempo*, Nomor Perkenalan, tanpa tanggal (Majalah itu diterbitkan pertama kali pada 1 Maret 1971).

<sup>90</sup> Daniel Dhakidae. *The State, The Rise of Capital, and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry*. Desertasi Tidak Diterbitkan. Ithaca: Cornell University. 1991, hlm. 255.

yang cenderung menolak dominasi partai politik. Oleh karena itu secara sadar *Tempo* menegaskan konsepsinya:

“Konsepsi majalah ini sepenuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang: kebutuhan akan tambahan batjaan sehat dan kebutuhan akan sarana informasi yang jujur, jelas, djernih. Azas djurnalisme kami oleh sebab itu bukanlah azas djurnalisme politik, yang memihak satu golongan. Kami pertjaja bahwa kebadjikan, djuga ketidak-badjikan, tidak mendjadi monopoli satu fihak. Kami pertjaja bahwa tugas pers bukanlah menjebarkan prasangka, djustru melenjapkanja, bukan membenihkan kebentjiaan, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian.... Jang memberinja komando bukanlah kekuasaan atau uang, tetapi niat baik, sikap adil dan akal sehat.”<sup>91</sup>

Saat itu banyak terjadi ketidakpuasan di antara para jurnalis muda terhadap kekakuan berbahasa dalam pers Indonesia. Kekakuan yang dipengaruhi oleh semesta bahasa era Demokrasi Terpimpin yang sloganistis dan penuh jargon. Hal yang juga diakui oleh Fikri Jufri, “Kami bosan dengan koran harian, mereka lebih menyerupai pamflet”.<sup>92</sup> Kemunculan *Tempo* mendobrak kekakuan bahasa macam itu dan menjadi *trend* baru dalam dunia jurnalisme Indonesia ketika *Tempo* memperkenalkan apa yang disebut dengan ‘jurnalisme sastra’—sebuah jurnalisme yang menggunakan langgam bahasa bercorak sastra. *Tempo* menggunakan kata-kata yang biasanya dipakai untuk sajak, tanpa terasa berat atau sok pintar. Cara ini terasa segar dan belum pernah dipakai oleh majalah atau koran Indonesia lainnya. Dalam hal ini GM lah yang memelopori penggunaan jurnalisme sastra dalam majalah *Tempo*.

Sejak awal berdirinya *Tempo*, GM menempati posisi sebagai pemimpin redaksi (pemred). Saat itu, *Tempo* sepenuhnya dijalankan oleh seniman dan penulis. GM menekankan kepada wartawan dan penulis muda bahwa tulisan mereka harus bercerita dan enak dibaca. Berdasarkan pembacaan penulis terhadap *Tempo* tahun 1970-an dan 1980-an, kualitas naratifnya memang terlihat dari berita-beritanya. Redaktur *Tempo* menulis dengan cara seperti berkisah, mengalir dari satu bagian ke bagian lainnya, hingga membacanya serasa seperti sedang menikmati sebuah novel atau cerita pendek. Bahkan terkadang juga kocak.

---

<sup>91</sup> *Tempo*, Nomor Perkenalan, tanpa tanggal.

<sup>92</sup> Daniel Dhakidae. *Op. Cit.*, hlm. 257.

Dalam perkembangannya, *Tempo* mengalami pasang surut menghadapi kekuasaan rezim Orba. Sebagai media nonpartisan, *Tempo* memang acapkali kritis dalam menyuguhkan berita yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini membuat pemerintah seringkali terganggu oleh berita-beritanya. Pada masa Orba, jurnalisme mesti bersedia menjadi corong pemerintah untuk menyebarkan program dan rencana penguasa, jurnalisme tidak dipahami sebagai pengkritik pemerintah. Orba menekankan pentingnya ‘pers Pancasila’, sesuai dengan ideologi negara, yang menjadi mitra dalam menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi.<sup>93</sup> Prinsip dasarnya adalah “pers yang bebas dan bertanggungjawab”, yang dimaknai oleh pemerintah untuk tidak memberitakan apapun yang bisa memicu ketegangan suku, agama, ras, dan golongan. Dalam prakteknya, prinsip ini melarang pers meliput secara terbuka konflik antar agama, kerusuhan rasial, penangkapan buruh, atau aktivitas gerakan separatis. Bahkan pers juga dilarang mengkritik keluarga presiden, pejabat pemerintah, atau petinggi militer.<sup>94</sup> Sebagai pemred, GM sangat menyadari keadaan semacam itu. Karenanya berita yang diturunkan *Tempo* disusun dengan bahasa yang terselubung, penuh perlambang dan kerap kali berlawanan dengan apa yang hendak disampaikan.

Kecenderungan rezim yang makin mengetatkan sensor kepada pers dan otoriter membuat GM sadar bahwa perlawanan yang frontal justru akan membawa malapetaka, terutama bagi majalah yang dipimpinnya, yang mempekerjakan ratusan karyawan. Pada akhir 1973, GM terpilih sebagai dewan pimpinan PWI. Padahal sebelumnya GM dan beberapa jurnalis lain yang kritis menentang peraturan Menteri Penerangan (Menpen) yang mewajibkan semua wartawan menjadi anggota PWI, karena PWI adalah satu-satunya organisasi wartawan yang “direstui” pemerintah. Aristides Katoppo, mantan pemred harian *Sinar Harapan*, mengatakan kepada GM lewat surat yang dikirim dari Stanford, Amerika Serikat:

“...kagum juga aku bahwa kau berani terjun kedalam kancah PWI. Saya yakin tentu anda sadar betapa dalam konstelasi pertumbuhan politik sekarang, PWI pun dijadikan medan pertarungan dari oknum2 maupun kekuatan yang mengatasnamakan

<sup>93</sup> Angela Romano. *Politics and the Press in Indonesia: Understanding an Evolving Political Culture*. London: Routledge Curzon. 2003, hlm. 38-50.

<sup>94</sup> Janet Steele. *Op. Cit.*, hlm. 81.

profesi sebagai jenjang ke kekuasaan. Tetapi sebagai seorang intelektual yang committed, tentu anda tidak dapat bersikap steril, hanya mengamati dan mengchotbah ....dan keberanian yang sesungguhnya justru ialah rela melaksanakan sesuatu yang sebenarnya ditakuti. Dalam hal ini risiko kejepret lumpur yang bau. Dillema anda dapat kumengerti. Sayang tak kukuasai ilmu bagaimana menyelam tanpa basah, saya tunggu eksperimen anda. Tapi jangan susah, yang jelas gampang ialah minum air sambil menyelam...”<sup>95</sup>

Dalam hal ini GM memang tak punya pilihan lain. GM menyelesaikan keanggotaannya sebagai anggota dewan pimpinan PWI dan pada 1978 dia terpilih selama lima tahun menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI.<sup>96</sup>

Selanjutnya persinggungan dengan kekuasaan kembali muncul manakala pada 14 Januari 1974 terjadi kerusuhan besar di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Peristiwa ini diawali dengan demonstrasi besar-besaran para mahasiswa yang menuntut pemerintah untuk mengurangi kekuasaan modal asing di Indonesia, demonstrasi ini bersamaan waktunya dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Ketika para demonstran, yang bergerak dari kampus UI di Salemba, mencapai Pasar Senen terjadilah kerusuhan dalam bentuk pembakaran segala macam benda dan toko yang berbau modal asing. Dengan segera kerusuhan ini dianggap telah “menggangu” stabilitas pemerintahan Orba. Kerusuhan ini sejatinya adalah puncak gunung es dari konflik elit antara Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jenderal Soemitro dengan dua Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto: Ali Murtopo dan Sudjono Humardhani. Peristiwa ini dikenal dengan nama ‘Malari’ (Malapetaka Lima belas Januari).<sup>97</sup>

Akibat dari peristiwa itu bagi dunia pers adalah dicabutnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) 12 media massa, yaitu: *Nusantara, Harian Kami, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Mingguan Wenang, Pemuda Indonesia, Ekspres, Pedoman, Suluh Berita, Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Pos*. Hanya dua diantaranya yang boleh terbit kembali setelah itu: *The Jakarta Times* dan *Abadi*.<sup>98</sup> *Tempo* sendiri selamat dari pembredelan itu. Mengamati berita yang diturunkan

<sup>95</sup> Surat Aristides Katoppo kepada GM, 12 Januari 1974. File GM di PDS H.B. Jassin.

<sup>96</sup> Janet Steele. *Op. Cit.*, hlm. 84.

<sup>97</sup> Mengenai peristiwa ini, lihat: Francois Raillon. *Op. Cit.*, hlm. 90-122 dan *Tempo*, 26 Januari 1974.

<sup>98</sup> Abdurrachman Surjomihardjo. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2004, hlm. 289-297.

*Tempo* dalam meliput peristiwa Malari, memang terkesan *Tempo* sudah melakukan prinsip keberimbangan berita atau *cover both side*.<sup>99</sup> Tapi dalam keadaan politik tahun 1974, hal itu saja tak cukup. GM menganggap media yang dibredel bukan karena apa yang ditulis tapi karena siapa yang menulis dan pemimpin redaksi media itu, memang ada semacam aksi “pembersihan” dalam kasus ini. Ada juga faktor lain yang menurut Aristides membuat *Tempo* selamat: pemerintah menilai GM lebih sebagai cendekiawan ketimbang tokoh politik.<sup>100</sup>

Setelah peristiwa Malari, pemerintahan Orba semakin otoriter dan represif dalam membungkam suara-suara kritis. Pers, mahasiswa, dan para cendekiawan tidak bisa lagi berbicara sebebaskan awal tahun 1970-an. Sensor ketat terhadap pers dilakukan pemerintah dengan ancaman pencabutan SIUPP, yang berarti tamatlah sudah riwayat penerbitannya. Sejak saat itu, hubungan *Tempo* dengan pemerintah menjadi agak kompleks. GM dan awak redaksinya mesti mengatur strategi untuk melindungi majalah itu. Pelajaran yang bisa dipetik dari Malari adalah jika ingin selamat, bersikaplah kompromistis. Dan inilah yang menjadi strategi *Tempo* dalam berhadapan dengan pemerintah. Beberapa staf redaktur menjalin hubungan dengan elit pemerintah sebagai upaya untuk tidak hanya mencari sumber informasi tangan pertama, tapi juga mencari semacam “pelindung” bagi majalah itu. Akan tetapi, hal ini tidak sampai berpengaruh terhadap prinsip keberimbangan berita.

## 2.7 Catatan Pinggir

Dalam setiap edisinya, *Tempo* punya rubrik khusus yang diberi nama ‘Catatan Pinggir’. Rubrik ini adalah semacam rubrik yang disediakan secara khusus untuk GM. Pada mulanya, Catatan Pinggir bernama ‘Fokus Kita’ yang biasanya berisi tentang pengenalan para wartawan yang menulis suatu artikel. Bukan semacam editorial atau tajuk rencana, melainkan hanya sekedar mengisi ruang kosong dan mengelakkan kebosanan. Lama kelamaan, karena jumlah wartawan yang masih sedikit, pengulangan yang membosankan mulai terasa dalam ‘Fokus Kita’. Oleh

<sup>99</sup> Lihat: “Musibah Bagi Golongan Menengah & Bawah”. *Tempo*, 26 Januari 1974.

<sup>100</sup> Janet Steele. *Op. Cit.*, hlm. 72-74.

karena itu sejak edisi 5 Maret 1977 isinya diganti dengan sebuah esai pendek yang kemudian diberi nama ‘Catatan Pinggir’.<sup>101</sup> Selama bertahun-tahun Catatan Pinggir menjadi salah satu bagian paling menarik dari *Tempo* yang seakan bisa berbicara secara langsung kepada para pembacanya.

Menurut pembacaan penulis, isi Catatan Pinggir, yang seringkali seperti sebuah gumaman, memang sangat khas, selain karena sifatnya yang bebas dari konteks redaksional. Terkadang kita seperti tengah menikmati sebuah sajak lantaran bahasanya yang penuh metafora. Melalui Catatan Pinggir, GM seakan mengajak sidang pembaca untuk merenung, mempertanyakan kembali lalu lintas peristiwa yang terjadi, atau bahkan membongkar ulang pemahaman pembaca atas sesuatu yang sedang dibahas di dalamnya. Karena Catatan Pinggir punya kecenderungan besar untuk mempertanyakan daripada sekedar memberi jawab. Dalam hal tertentu, Catatan Pinggir seperti seorang “pengamat cerewet” yang gemar membuat panas hati pembaca, karena sering mengusik kemapanan pemahaman. Ia memang seperti interupsi. Atau kita bisa menilainya sebagai suatu usaha untuk “menghibur” ala Punakawan dalam kisah pewayangan yang kadang dalam kekonyolan dan *banyolannya* mengandung sikap kritik kepada penguasa. Karena itulah, di sisi lain, Catatan Pinggir adalah sesuatu yang serius. Kritik terhadap penguasa bukan hal yang sembarangan di masa Orba. Rezim yang selalu berkeinginan mengontrol pasti selalu curiga terhadap segala jenis suara-suara kritis.

Selama bertahun-tahun Catatan Pinggir hampir selalu hadir dalam *Tempo* di tiap pekannya. Karena itu menjadi semacam kerutinan tersendiri bagi GM. Terkadang, karena harus muncul tiap pekan sementara pekerjaan sebagai pemred membuat GM tak punya banyak waktu luang, Catatan Pinggir ditulis dalam waktu yang mepet menjelang detik-detik *deadline*. Sehingga tak jarang kita temui repetisi di satu Catatan Pinggir dengan Catatan Pinggir yang lain. Tapi di sinilah banyak serpihan pemikiran GM tercurah. Serpihan-serpihan pemikiran yang terhimpun dalam sebuah esai yang pendek dan rutin.

---

<sup>101</sup> “Pengantar Penerbit” dalam Goenawan Mohamad. *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Grafiti Pers. 1991, hlm. v.

Pada masa awalnya, berdasarkan perhitungan penulis, Catatan Pinggir rata-rata terdiri dari 13-15 paragraf, yang berarti berisi 900-1000 kata. Ini terlihat dalam Catatan Pinggir periode 1977-1983. Sesudahnya, seiring dengan makin tebalnya *Tempo*, Catatan Pinggir menjadi tambah panjang: dengan jumlah paragraf yang sama, Catatan Pinggir mengalami penambahan menjadi rata-rata 1100-1200 kata. Pendekatan kuantitatif seperti ini penting karena Catatan Pinggir menganut model yang sama. Dua belas alinea pertama umumnya berisi paparan tema yang dibahas, baru pada alinea 13-14 GM mengungkapkan apa sebenarnya maksud yang hendak disampaikan lewat kalimat penutup, yang biasanya dimulai dengan kata-kata “tapi”, “siapa tahu”, “barangkali”, atau “mungkin”. Dan kebanyakan di ujung kalimat penutup ini pun dibubuhi tanda “?”.

GM mengakui ide menulis Catatan Pinggir biasanya dipicu dari peristiwa-peristiwa aktual yang sedang hangat, jika tidak ada ia harus mencari ide sendiri. Kemudian ia memikirkan lebih lanjut dan sedapat mungkin menyajikan sesuatu yang baru. Apa yang ia tulis lebih banyak tergantung pada suasana hati, kesibukan pikiran dan kecapekan, semangat atau kemarahan.<sup>102</sup> Ini tergambar dengan jelas dalam setiap Catatan Pinggirnya, terkadang GM terkesan penuh keharuan dan simpati, di saat lain ia terkesan marah meski tidak sampai berapi-api. Rutinitas menulis Catatan Pinggir membawa pergulatan batin sendiri yang terkadang membuatnya kesal pada keadaan dan mengutuk, mengapa hal ini ia lakukan terus menerus. Ia juga mengaku butuh waktu yang lama, tiga sampai lima jam nonstop tidak makan dan tidak tidur, untuk menulis Catatan Pinggir dan baginya hal seperti ini sangat menyiksa.<sup>103</sup> Tak bisa dipungkiri memang, kerutinan terkadang membawa kebosanannya sendiri, apalagi ia sering menulisnya dengan tergesa-gesa karena dikejar tenggat *deadline*.

---

<sup>102</sup> *Playboy Indonesia*, April 2007.

<sup>103</sup> *Loc. Cit.*

### BAB 3

## PEMIKIRAN GOENAWAN MOHAMAD TENTANG KEBEBASAN

“Di setiap masa nampaknya selalu ada saat yang tak mudah untuk berbicara, tapi tidak gampang untuk diam.”  
*Ketika Koran-koran Ditutup, 1978. Catatan Pinggir. Tempo, 28 Januari 1978*

### 3.1 Riwayat Kebebasan Zaman Orde Baru

Awal dekade 1970-an adalah fase paling penting dalam sejarah Orde Baru. Pada saat itu, pemerintahan Orde Baru berusaha untuk melakukan konsolidasi politik dan kekuasaan. Konsolidasi ini didukung oleh tiga mesin politik yang sangat kuat: Golkar sebagai partai pemerintah, militer, dan birokrasi. Melalui ketiganya Orde Baru melakukan kontrol terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat. Kontrol yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan stabilitas nasional dan ketertiban dengan dalih demi kemajuan ekonomi.

Ketika Soeharto memegang tampuk kekuasaan secara penuh pada tahun 1967, dan kemudian mengklaim pemerintahannya dengan sebutan ‘Orde Baru’, ada harapan akan munculnya kebebasan dan demokratisasi yang sebelumnya tertutup oleh otoritarianisme Demokrasi Terpimpin. Dengan dukungan mahasiswa dan militer ia mencoba membangun kekuasaannya di atas reruntuhan Orde Lama dan masih terbuka terhadap berbagai saran dan kritik yang masuk. Soeharto mendengarkan dengan seksama apa saja yang ia anggap bisa memajukan negara, termasuk aspirasi kritis dari mahasiswa dan kaum cendekiawan.<sup>104</sup>

Namun keadaan ini berubah semenjak awal 1970-an ketika Orde Baru makin melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap aspirasi-aspirasi yang kritis. Di sini militer menjadi alat utama untuk menjalankan fungsi kontrol itu. Lewat sebuah operasi yang disebut Operasi Khusus (Opsus) militer berusaha melakukan kontrol terhadap segala tindak-tanduk yang dianggapnya bisa mengancam stabilitas nasional. Kontrol ini demikian ketat dan represifnya sampai-sampai beberapa

---

<sup>104</sup> Daniel Dhakidae. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia. 2003, hlm. 210.

kalangan yang dulu mendukung Orde Baru karena sifatnya yang terbuka berbalik menjadi pihak yang menentang. Militer membenarkan intervensi dalam bidang politik menurut doktrin dwifungsi. Menurut gagasan ini militer mempunyai dua peran yang saling berkaitan: membela negara tidak hanya dari ancaman militer konvensional yang datang dari luar tetapi juga bahaya dalam negeri yang berbentuk apa pun: militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, atau ideologi. Militer melaksanakan intervensi berkedok dwifungsi dengan menempatkan tenaga militer, yang aktif maupun pensiunan, di institusi-institusi politik dan birokrasi baik eksekutif maupun legislatif dari tingkat pusat sampai daerah; serta dalam posisi kekuasaan formal dan informal dalam bentuk pengendalian Golkar.<sup>105</sup> Militer juga mengawasi penduduk melalui komando teritorial yang meliputi seluruh negara dari Jakarta sampai ke desa-desa, termasuk pulau terpencil.<sup>106</sup> Kekuasaan dan hegemoni militer dalam kontrol politik ini menyebabkan makin menciutnya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan pemikiran.

Pada masa awal pemerintahan Orba, GM, seperti juga kawan-kawannya yang lain, masih menaruh harapan besar kepada Orba. Karena pada awalnya memang terlihat tanda-tanda bahwa Orde baru akan bersifat lebih demokratis dan terbuka ketimbang era Soekarno. Namun harapan ini sirna ketika Orba mulai menunjukkan gejala antikritik dan represifitasnya. Ketika masih bekerja di *Ekspres* GM sudah menunjukkan sikapnya yang menentang pemerintah, yaitu pada saat pemerintah dan militer berusaha mengintervensi PWI. Ia juga secara konsisten menentang kebijakan pemerintah yang dianggap membatasi ekspresi dan kreativitas masyarakat. Hal ini ditujukan lewat tulisan-tulisannya yang bernada mengkritik pemerintah. Pada tahun 1972 Wakil Panglima ABRI dan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) memanggil para pemimpin redaksi media massa di Jakarta. Ia mengingatkan para pemimpin redaksi untuk “jaga lidah”,<sup>107</sup> yang berarti agar

---

<sup>105</sup> Harold Crouch. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press. 1978, hlm. 264-272.

<sup>106</sup> R. William Liddle. “Rezim: Orde Baru” dalam Donald K. Emmerson (ed.). *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: Gramedia. 2001, hlm. 74.

<sup>107</sup> Janet Steele. *Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru*. Jakarta: Dian Rakyat. 2007, hlm. 50.

media massa tidak terlampau keras dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Beberapa hari kemudian, GM menulis artikel yang berisi tentang kebingungannya perihal manakah cara kritik yang dikehendaki dan diperkenankan penguasa. Ia mengingatkan pembaca pada sebuah pepatah: mulutmu harimaumu, merekah kepala kamu. “Mereka yang tak ingin kepalanya terbelah, harus memilih kearifan ketimbang keberanian”, kata GM menyimpulkan.<sup>108</sup> Sepertinya memang ia telah membaca tanda-tanda bahwa pemerintah sudah semakin antikritik dan represif. Hal itu sangat ia sadari dan ia sudah tahu resiko apa yang bakal dihadapi jika terus menerus mengkritik pemerintah: pemberangusan atau pembredelan. Sesuatu yang kelak memang benar-benar ia alami sendiri.

Siapakah kaum cendekiawan itu? Daniel Dhakidae merumuskan cendekiawan sebagai mereka yang senantiasa terlibat di dalam *speech community*, yaitu suatu komunitas yang mempergunakan bahasa sebagai alat, modal, medium, untuk mengolah kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan pada umumnya.<sup>109</sup> Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah ragam bahasa tulis (bukan bahasa lisan), karena itu cendekiawan dan kehidupan cendekiawan boleh dikatakan berawal dari dan berpusat pada saat ketika bahasa tulis itu menjadi bagian utama dalam kehidupan manusia. Apa yang ditulis, didiskusikan dalam bahasa tulis mendapatkan gema dalam bagaimana masyarakat sosial diatur, kekuasaan diolah, ekonomi dikelola, dan sebagainya.<sup>110</sup> Sedangkan Edward Shils menyatakan bahwa kaum cendekiawan menunjuk kepada sekelompok orang-orang dalam setiap masyarakat yang dalam komunikasi dan ekspresinya secara relatif memakai lebih banyak simbol dan abstraksi daripada anggota masyarakat lainnya, terutama mengenai manusia, alam, masyarakat, serta kosmos.<sup>111</sup> Definisi ini memuat fungsi kultural seorang

---

<sup>108</sup> *Tempo*, 29 Januari 1972.

<sup>109</sup> Daniel Dhakidae, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Dikutip dari: Sartono Kartodirdjo. “Peranan Kaum Inteligensia dalam Pembangunan Bangsa” dalam *Pembangunan Bangsa: Tentang Nasionalisme, Kesadaran, dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya Media. 1994, hlm. 198.

cehdekiawan sebagai penafsir pelbagai semesta simbol yang berlaku sekaligus mengartikulasikan kebudayaan dalam masyarakat.

Dalam struktur negara yang dijalankan dengan kekuasaan otoriter, peran cehdekiawan mengemuka manakala mereka tampil sebagai pengkritik sekaligus pencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kebangsaan yang terjadi. Peran seperti ini menemukan puncaknya terutama dalam negara-negara sedang berkembang. Soedjatmoko, seorang cehdekiawan terkemuka Indonesia, menarik kesimpulan bagaimana peranan para cehdekiawan di negara-negara berkembang: "...sebagai pembawa modernisasi, penggerak ke arah tujuan-tujuan dan maksud-maksud baru, maupun pendorong munculnya pendapat-pendapat yang saling berlawanan."<sup>112</sup> Sehingga dalam perannya yang demikian "dia pun seringkali tampil sebagai seseorang yang didera oleh perasaannya sendiri yang mengalami alienasi... yang berasal dari jarak pemisah antara wawasannya terhadap masa depan dan ikatan tradisi yang dirasakannya kini."<sup>113</sup> Peranan demikian itu muncul dari latar belakang sosial-politik negara-negara berkembang yang khas: sesudah terjadinya gejolak politik yang dahsyat dan disusul dengan munculnya rezim militer yang mengendalikan kekuasaan.

GM adalah salah satu dari sekian banyak cehdekiawan Indonesia yang muncul dalam suasana sosial-politik khas negara berkembang itu. Kemunculan Orba pada awalnya mendapat respon yang positif dari kalangan cehdekiawan dan mahasiswa, ini karena dalam prosesnya menuju kekuasaan Orba mendapat dukungan penuh dari mereka.<sup>114</sup> Harapan akan datangnya pemerintahan yang demokratis dan menjaga kebebasan berekspresi masih mengelayuti pikiran para cehdekiawan terhadap Orba. Namun, harapan itu perlahan-lahan sirna manakala Orba mulai menampakkan gejala otoritarianisme dan militerismenya pada awal dasawarsa 1970-an. Sejak saat itu, terasa sekali represi dan tekanan pemerintah terhadap suara-suara kritis kaum cehdekiawan.

---

<sup>112</sup> Soedjatmoko. "Peranan Intelektual di Negara Sedang Berkembang" dalam Aswab Mahasin dan Ismed Nasir (ed.). *Cehdekiawan dan Politik*. Jakarta: LP3ES. 1984, hlm. 26.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Lihat: Francois Raillon. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES. 1989.

Berkaitan dengan posisi dia sebagai cendekiawan dan esais, dalam Catatan Pinggirnya GM memainkan peranan penting dalam membuka wacana kebebasan dalam suasana rezim yang represif. Kebebasan dalam konteks ini dikaitkan dengan tiga macam kebebasan yang selama ini menjadi arus utama dalam pemikirannya: berpikir, berekspresi, dan menyuarakan pendapat. Kebebasan berpikir dimaknai sebagai fitrah manusia yang memiliki akal budi yang terus menerus bergulat lewat proses dialektika menuju pemahaman yang lebih tinggi dalam suasana yang bebas dari segala macam tekanan. Inilah kebebasan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

### 3.2 Kebebasan

Kondisi politik zaman Orba, dalam hal ini yang menyangkut dengan pengekanan terhadap kebebasan berekspresi, mempengaruhi banyak pemikiran GM di dalam Catatan Pinggir. Dalam satu Catatan Pinggirnya ia bertanya secara agak retorik, “Untuk apakah sebenarnya kebebasan? Dan beranikah kita?”<sup>115</sup> Di zaman itu memang kebebasan seperti barang yang mahal, pemerintah agaknya terus menerus berkehendak untuk mengontrol segala sesuatu lewat sensor, pembatasan, dan lain-lain. Padahal, menurut GM, kebebasan senantiasa berhubungan dengan “keadaan manusia sebagai manusia”<sup>116</sup>, tak peduli dalam zaman atau kondisi apapun. “Orang ingin merdeka karena ia tahu apa artinya tidak merdeka,”<sup>117</sup> tulisnya dalam Catatan Pinggir yang lain. Kebebasan, juga kemerdekaan, dipandang sebagai suatu kemestian sejarah karena hal itu sudah diperjuangkan manusia bahkan sejak Yunani kuno ketika orang-orang di sana sudah berdebat tentang hak-hak warga negara yang bernama *parrhesia* (kemerdekaan berbicara).<sup>118</sup> Dengan kata lain ia bukanlah sesuatu yang usang dan oleh sebab itu mesti diperjuangkan terus menerus.

---

<sup>115</sup> Goenawan Mohamad. “Bebas” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 171. (Dimuat di *Tempo*, 30 September 1989).

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 122. “Terbuka”. (*Tempo*, 5 Agustus 1989).

<sup>117</sup> Goenawan Mohamad. “Merdeka” dalam *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti. 1999, hlm. 110. (*Tempo*, 17 Agustus 1991).

<sup>118</sup> *Op.Cit.*

Tapi dalam perjalanan menuju kebebasan itu kadang manusia terhalang oleh berbagai hal yang nampaknya tak ada hubungannya sama sekali dengan kebebasan: kepincangan sosial, rusaknya kebersamaan, terancamnya keadilan. GM berpendapat bahwa soal-soal itu memang terkadang menjadi ironi sebuah kebebasan, namun di sisi lain justru ketika masyarakat terus menerus dikekang oleh ketidakbebasan, soal-soal itu akan bertambah parah. Sebab, dengan meninjau kembali pengalaman sosialisme Uni Sovyet, “tanpa kebebasan, keadilan tak juga terjadi.”<sup>119</sup> Untuk itu diperlukan kontrol terhadap kekuasaan dan pengejawantahan hukum yang konsisten dan terbuka. Dan ini hanya bisa terjadi dalam suatu sistem masyarakat di mana kebebasan terjamin dengan baik tanpa adanya tekanan. “Memang kebebasan tak dengan sendirinya melahirkan keadilan. Namun, tanpa kebebasan, bagaimana pula menjamin keadilan?”<sup>120</sup>

Di negara-negara yang menjamin kebebasan berbicara, memang kata dan pendapat yang berani bukanlah barang luks, melainkan “barang lumrah seperti rambu lalu lintas di tepi jalan”<sup>121</sup>. Tapi di Indonesia zaman Orba, di mana kebebasan seakan menjadi sesuatu yang muskil, GM percaya bahwa kebebasan tak akan mati begitu saja. Pemerintah sendiri pun menurutnya percaya akan hal itu, sebab apabila kemerdekaan hilang akan ada banyak sekali yang dikorbankan dan justru merugikan pemerintah itu sendiri. GM menulis:

“...di negeri ini kemerdekaan toh tidak dicoret mati. Kita tidak dikutuk secara beramai-ramai bila kita menyatakan bahwa kita butuh kemerdekaan. Seakan ditopang oleh pengalaman sejarah yang silam dan harapan ke masa depan, kita—termasuk pemerintah—seperti sepakat meyakini bahwa bila kemerdekaan mampet, banyak hal lain akan ikut macet.”<sup>122</sup>

Tapi “sangka baik” GM terhadap pemerintah nampaknya seperti jauh panggang dari api. Makin hari justru pemerintah makin tak menganggap penting makna kebebasan. Sensor diperketat seiring dengan makin kuatnya cengkeraman negara atas

<sup>119</sup> Goenawan Mohamad. “Cerita tentang Herr Keuner” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 176. (*Tempo*, 11 November 1989).

<sup>120</sup> Goenawan Mohamad. “Soska” dalam *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti. 1999, hlm. 225. (*Tempo*, 7 September 1991).

<sup>121</sup> *Op. Cit.*, hlm. 183-184. “Havel”. (*Tempo*, 27 Januari 1990).

<sup>122</sup> Goenawan Mohamad. “Tempo” dalam *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Grafiti. 1991, hlm. 549. (*Tempo*, 4 Maret 1978).

masyarakat. Hingga dalam banyak hal, negara Orba mengalami “macet” di sana-sini. Masyarakat diringkus sedemikian rupa hingga perbedaannya bukan lagi—seperti kata sebuah hadis nabi—suatu rahmat, tapi dipersamakan lewat pelanggaran keseragaman. Di saat seperti ini kebebasan mesti mendapat gemanya kembali.

Karena itulah kebebasan mesti dijalankan dalam setiap kondisi zaman. GM tak sepakat dengan pandangan bahwa kebebasan bisa ditangguhkan terlebih dahulu sampai masyarakat benar-benar siap dengan kebebasannya itu. Ia menolak pendapat Sutan Takdir Alisjahbana pada 1941 bahwa “kecenderungan individualisasi dalam masyarakat Indonesia... harus diartikan... membebaskan diri untuk ditawan dengan sukarela dan penuh kesadaran”, ini berarti “kita tidak boleh terhenti pada pengagungan kebebasan.”<sup>123</sup> Sutan Takdir menganggap kebebasan sebagai kemewahan yang harus ditunda sampai “zaman yang lebih masak”. Yaitu, “apabila perjuangan perbaikan nasib dan kedudukan bangsa sudah menenang di teluk sunyi dan tiada berombak”. Bagi GM, sebuah bangsa yang matang sebaiknya bertolak dari praduga bahwa “teluk yang tiada berombak” itu hanyalah mimpi.<sup>124</sup> Sebuah bangsa bukanlah entitas yang bebas konflik, ia selamanya tak akan bersih dari konflik, tapi pada saat yang sama ia juga senantiasa membuka diri bagi kemungkinan menyelesaikan konflik. Di titik itulah sebenarnya kebebasan bisa menjadi sesuatu yang berperan, “Ia bukanlah kemewahan yang nikmat. Ia adalah kewajiban yang dalam.” Selanjutnya GM menulis:

“...Dengan kebebasanlah kemungkinan-kemungkinan baru untuk menyelesaikan konflik dapat dicari. Dengan kebebasanlah alternatif-alternatif diperoleh. Karena itu bila kebebasan mati... ia tak akan mati sendirian.”<sup>125</sup>

Dengan memandang bahwa pendapat yang menanggukkan kebebasan itu terasa *absurd*, GM memberi amsal lewat kisah Revolusi Prancis. Revolusi ini mengobarkan semangat kebebasan, persamaan, persaudaraan. Tapi yang terjadi dalam tahapnya kemudian adalah Revolusi Prancis lebih mendengarkan seruan kesamarataan daripada mengedepankan kebebasan. Optimisme yang merajalela

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 546. “Tentang Kebebasan”. (*Tempo*, 25 Februari 1978).

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 547.

<sup>125</sup> *Ibid.*

waktu itu ialah setelah menanggukkan kebebasan, kebebasan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi hal ini segera terbentur kenyataan bahwa tidak demikian halnya: setelah kebebasan ditanggukkan pascarevolusi, ia tak pernah datang. “Bahkan kesamarataan akhirnya... hanyalah hiasan bibir para pemimpin revolusi yang sudah mandek.”<sup>126</sup> Nampaknya hal seperti itulah yang juga terjadi di Indonesia. Orba memang menjanjikan stabilitas, pembangunan ekonomi, kemajuan, dan, tentu saja, pemerataan hasil-hasil pembangunan. Namun, hal tersebut tak diimbangi dengan pembukaan selebar-lebarnya pintu kebebasan.<sup>127</sup> Dengan bangkitnya kondisi perekonomian yang diikuti meningkatnya kesejahteraan masyarakat, Orba nampaknya tak peduli betul dengan kebebasan. Ia mesti memilih di antara keterbukaan atau stabilitas politik-ekonomi seperti yang dijanjikan di awal berkuasanya. Pemerintah akhirnya lebih memilih yang kedua sambil sesekali menjanjikan kalau keterbukaan dan kebebasan kelak akan diberikan. GM tentu saja menolak gagasan pemerintah ini. Ia cenderung menyepakati bahwa keduanya bisa berjalan berbarengan. Kegagalan Orba untuk melaksanakan dua hal itu secara bersamaan karena ia tak pernah mencobanya atau, paling tidak, mengizinkan masyarakat untuk mencobanya. Rezim otoriter memang tak mudah mengizinkan masyarakatnya untuk terbuka.

GM mengambil satu contoh dari sejarah masa lalu tentang bagaimana kebebasan dan kemerdekaan mesti terus diperjuangkan meski pemerintah menganggapnya tak perlu. Adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H. Colijns, yang mengibaratkan Hindia Belanda layaknya anak kecil yang masih perlu bimbingan dari “Sang Bapak”—yaitu Belanda. Oleh karenanya kemerdekaan bagi Hindia Belanda belum bisa diberikan sampai saatnya akan tiba ketika ia bertambah dewasa dan “ia akan minta kunci pintu depan”. Tapi, menurut GM, masalahnya adalah apakah arti “dewasa” bagi sebuah bangsa? Orang-orang pribumi yang telah terhina lantaran terlalu lama ditindas kolonialisme bukanlah orang yang bisa diharapkan merasa diri sebagai “anak”. Dan di saat itulah perkara “dewasa” atau

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 35. “Candide”. (*Tempo*, 10 Maret 1979).

<sup>127</sup> Richard Robison. *Indonesia: The Rise of Capital*. Singapore: Equinox Publishing. 2008, hlm. 108-127.

“belum dewasa” tak lagi relevan.<sup>128</sup> “Yang relevan adalah kemerdekaan itu sendiri”, kata GM. Ia mengakui merdeka bukanlah sesuatu yang mudah, yang tak bebas dari resiko dan marabahaya bagi bangsa itu sendiri. Tapi, lanjutnya:

“...sebuah bangsa jadi matang bukan karena taat menunggu... Sebuah bangsa jadi matang karena ia bersedia ambil resiko dengan kesalahan. Ia bukan seorang bocah yang selalu dilindungi dari masuk angin atau kepeleset... ia adalah pribadi yang mandiri, liat oleh benturan, kuat oleh badai.”

Sehingga apapun resikonya kebebasan dan kemerdekaan menjadi keharusan untuk dipertahankan. Manusia hendaknya tak takut dengan resiko itu. Resiko adalah suatu hal yang lumrah dalam setiap perjuangan menggapai sesuatu. “Kemerdekaan memang sebuah resiko. Siapa yang takut itu, biarlah jadi batu.”<sup>129</sup>

Sementara itu, di tengah situasi yang tak memungkinkan munculnya kebebasan di tengah masyarakat, kebebasan nampak seperti sendirian di tengah gejolak. Atau, meminjam kata-kata Albert Camus yang dinukil GM dalam satu Catatan Pinggirnya, ia tak punya banyak sekutu. Di Indonesia kata “kebebasan” rupanya jadi kata yang kurang senonoh. Indonesia punya pengalaman dengan demokrasi liberal—‘liberal’ di sini sering dikaitkan dengan “sikap individualis” yang bertentangan dengan Pancasila—pada 1950-an dan Orba menganggap masa itu sebagai masa “kegelapan”: ketika kepentingan individu dan kelompok lebih menonjol dibanding kepentingan bangsa-negara yang terlihat dalam perdebatan partai-partai di parlemen atau konstituante. Karena itu banyak yang menafsirkan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat adalah persoalan hak individu yang bertentangan dengan ideologi negara. Menurut GM, di situlah letak kesalahannya. GM menulis:

“...persoalan kebebasan menyatakan pendapat bukanlah sekedar hak orang per orang, atau selapisan elite. Dia menyangkut penilaian kita tentang manusia, justru sebagai makhluk yang terbatas. Dia juga menyangkut penilaian kita tentang manusia, justru sebagai makhluk dalam komunitas—*bebrayan*, kata orang Jawa.”<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Goenawan Mohamad. “Merdeka” dalam *Catatan Pinggir 2*. Jakarta: Grafiti. 2006, hlm. 165. (*Tempo*, 24 Agustus 1985).

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>130</sup> Goenawan Mohamad. “Ketika Kemerdekaan Tak Punya Banyak Sekutu” dalam *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Grafiti. 1991, hlm. 552. (*Tempo*, 2 Agustus 1980).

GM melanjutkan argumennya dengan mengutip pendapat Glenn Tinder dalam “Freedom of Expression, The Strange Imperative”, yang dimuat di *The Yale Review* edisi Desember 1979, yang menyerukan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat merupakan keharusan pokok, karena “ia esensial bagi utuhnya hubungan kita dengan manusia dan kebenaran.”<sup>131</sup> Dengan ini GM sekaligus membantah jalan pikiran bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat mesti diberikan lantaran manusia adalah makhluk rasional atau karena hal itu penting bagi kebahagiaan. Kemerdekaan menyatakan pendapat penting karena di situlah orang bisa menemukan kebenaran, dan kebenaran bukanlah milik orang per orang. Kebenaran, seperti kata Tinder, pada hakikatnya adalah “*a shared reality*”, suatu realitas yang dimiliki bersama. GM berpendapat, kebenaran macam itu hanya bisa dicapai lewat proses dialog yang kontinyu serta penuh toleransi, dan hanya solidaritas berkomunikasi yang bisa menghasilkan hal itu.

Ketika pemerintah Orba menutup pintu kebebasan, dan dengan demikian mengubur berbagai macam alternatif dalam masyarakat, di saat itu pula sebenarnya konflik menjadi laten. Ia menjadi api dalam sekam. Seolah-olah konflik bukanlah sesuatu yang patut dikelola dengan baik hingga ia mampu menjaga kebhinekaan bangsa, tapi konflik selalu ditangani dengan pendekatan kekuasaan yang cenderung represif. Maka, ketika kebebasan di zaman itu mati, ada hal lain yang juga ikut mati: kritik kepada penguasa. GM pun mengalami sendiri resiko-resiko yang ia tulis dalam Catatan Pinggir, sambil menolak menjadi batu.

### **3.3 Sensor dan Matinya Kritik**

Terjaminnya kebebasan berpikir dalam sebuah sistem sosial secara perlahan-lahan akan memunculkan kebebasan yang lain: kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat. Dua kebebasan ini menjadi prasyarat terbentuknya sebuah masyarakat yang tak kehilangan elan dalam melakukan proses pertukaran ide-ide secara terbuka. Kebebasan dan kemerdekaan pers juga termasuk ke dalamnya. Pers, sebagai salah satu kekuatan penyeimbang pemerintah, akan mampu menjadi medium

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 553.

perpindahan informasi yang baik jika dan hanya jika ia tidak terkooptasi oleh apapun, terutama oleh pemerintah. Proses perpindahan informasi itu tentunya tidak akan bisa dikelola dengan baik dalam suatu kekuasaan yang, meminjam kalimat GM, “kehilangan daya pesona dan persuasi ide-ide”.<sup>132</sup> Seperti halnya Orba yang senantiasa hendak mengekang kebebasan masyarakatnya melalui berbagai cara yang menenggelamkan pertukaran ide-ide, salah satunya lewat sensor terhadap pers.

GM pun melawan sensor itu, karena sensor punya daya rusaknya sendiri bagi kehidupan masyarakat. Menurut GM, yang dirusak oleh sensor tak hanya harga diri seorang wartawan atau penulis, tapi juga proses kematangan jiwa sebuah masyarakat.<sup>133</sup> Ketika sensor dilakukan dan kebebasan pun mati, turut terkubur bersamanya pengaruh-pengaruh baik bagi masyarakat yang menolak dirinya menjadi tertutup. Penyensor selalu punya klaim bahwa dirinya bisa membuat prediksi untuk segala sesuatu, terutama prediksi bahwa pikiran masyarakat dengan mudah teracuni karena membaca sebuah tulisan atau berita: seseorang akan serta merta jadi X atau jadi Y gara-gara ia membaca tulisan tentang X atau pun Y. Klaim ini sepenuhnya konyol dan tidak berdasar. Membaca sebuah teks, kata GM, “adalah berargumentasi, menciptakan, membentuk, mengubah,” dengan kata lain ia merupakan “proses menghidupkan apa yang dibaca.”<sup>134</sup> Masyarakat bukanlah kumpulan orang yang pikirannya mandek.

Maka, bagi GM, inti soalnya bukanlah menentang atau menyetujui sensor, tetapi “bisa terjadikah dialog yang serius antara mereka yang kepingin menyensor dan mereka yang tak kepingin disensor?”<sup>135</sup> GM menjawab setengah optimis pertanyaannya sendiri ini dengan jawaban: “barangkali bisa”. Tapi di sisi lain, dengan melihat gejala pemerintah yang cenderung menutup dialog, tak kurang pula rasa pesimisnya.

---

<sup>132</sup> Goenawan Mohamad. “Setelah Tempo Tidak Ada Lagi”. Pengantar dalam *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti. 1999, hlm. ix.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 91. “Al-Sensor”. (*Tempo*, 8 September 1990).

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 129. “Buku”. (*Tempo*, 4 Juli 1992).

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 91. “Al-Sensor”.

“...sering hubungan antara yang disensor dan yang menyensor adalah hubungan yang tak setara: hubungan antara yang ‘sahaya’ dan ‘baginda’. Yang satu dikuasai oleh yang lain—sampai ke sumber nafkahnya, sampai ke sumber pikirannya.”<sup>136</sup>

Dalam hubungannya dengan hal itu, GM menganggap pemerintah terlalu memaksakan diri untuk menentukan secara mutlak batas-batas kebebasan. Padahal, seperti halnya kebebasan yang bersifat tak mutlak, batas-batas kebebasan itu sendiri—baik yang ditentukan pemerintah maupun masyarakat—tak pernah mutlak. Apalagi jika dikuatkan dengan asumsi bahwa para juru sensor bukanlah “wali penjaga kepentingan masyarakat yang bebas dosa”, sebagaimana tak bisa juga kita berasumsi kalau para penulis adalah titisan nabi yang senantiasa suci. Kecenderungan penguasa untuk menjadi penafsir tunggal—dan pada saat bersamaan merasa dirinya “bebas dosa”—atas kebebasan itu membuat si “sahaya” melakukan *self-defence* demi menjaga keselamatannya: ia akhirnya menyensor diri sendiri. Pada saat itulah, kata GM, “sang sensor dinobatkan jadi si-serba-benar.”<sup>137</sup> Seolah penguasa sedang berkata: aku menyensor, maka aku ada. Tetapi kemudian, lanjut GM, makin lama makin tak jelas, “adakah sebuah tulisan memang mengganggu keamanan karena akan berpengaruh luas, ataukah sebuah tulisan dianggap ‘mengganggu keamanan’ perasaan seorang pejabat.”<sup>138</sup>

“Mengganggu keamanan” dan “mengganggu keamanan perasaan seorang pejabat”. Dua hal inilah yang kelak ia hadapi sendiri ketika berhadapan dengan kekuasaan. Majalah *Tempo* yang dipimpinnya mengalami dua kali pembredelan, yaitu tahun 1982 dan 1994, serta beberapa kali ancaman pembredelan, kurang lebih berdasarkan alasan yang menyangkut kedua hal tersebut.

Pembredelan tahun 1982 disebabkan oleh laporan investigasi *Tempo* tentang kerusuhan kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta pada bulan Maret. Kerusuhan ini terjadi lantaran adanya bentrok antara massa pendukung PPP dengan massa pendukung Golkar.<sup>139</sup> Alasan dari pemerintah mengenai pembredelan

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 91-92.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> “Kemarahan di Awal Kampanye”. *Tempo*, 27 Maret 1982.

itu sendiri tidak jelas, Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 7.6/Kep/Menpen/1982 hanya menyebutkan bahwa *Tempo* dibekukan karena majalah itu melanggar kode etik jurnalistik tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab. Tapi banyak yang meyakini bahwa alasan pembredelan yang sebenarnya adalah karena majalah itu melanggar larangan memberitakan konflik dalam Pemilu.<sup>140</sup> Pembredelan ini sontak membuat GM kaget, karena semenjak *Tempo* berdiri baru kali ini mengalami pembredelan. Sebelumnya, seperti pada saat peristiwa Malari 1974, *Tempo* juga mengalami ancaman pembredelan, namun masih selamat karena banyak wartawannya punya lobi yang kuat dengan orang pemerintah.

Tapi pembredelan ini tak terlalu lama. Dua bulan kemudian, pada Juni, *Tempo* diizinkan terbit lagi berkat lobi-lobi yang intens dari wartawannya kepada orang pemerintah. Setelah pembredelan itu GM menjadi makin hati-hati ketika harus berhadapan dengan pemerintah. Ia beranggapan bahwa Orba sudah mencapai titik puncak otoritarianismenya.<sup>141</sup> Ini juga turut mempengaruhi pemikirannya tentang kebebasan di Indonesia. Berkali-kali dalam tulisan-tulisannya GM selalu mengeluhkan bagaimana tekanan dari penguasa bisa menghambat proses kreativitas dan kerja-kerja intelektual, “tiap kali semuanya bisa diatur oleh ‘yang empunya negara,’”<sup>142</sup> karena itu asumsi bahwa “bangsa kita... tak akan bisa baik-baik berpikir merdeka, bersuara merdeka”<sup>143</sup> rasanya adalah suara yang tak salah alamat dalam negara Orba.

Dua belas tahun setelah pembredelan pertama, *Tempo* mengalami lagi sesuatu yang sempat dikhawatirkan dan dipertanyakan GM, “Kenapa terjadi kesewenang-wenangan? Kenapa seorang yang berkuasa bisa berbuat sekehendaknya terhadap diri seorang lain sampai ludes dan papa?”<sup>144</sup> Jawaban atas pertanyaan itu terjadi dalam peristiwa pembredelan *Tempo* untuk kedua kalinya. Awalnya gara-gara *Tempo*

---

<sup>140</sup> Janet Steele. *Op. Cit.*, hlm. 92.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 87-98.

<sup>142</sup> Goenawan Mohamad. “Pembredelan, Kenyataan, dan Takhayul Politik” dalam Ayu Utami, dkk. (ed.). *Bredel 1994*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen. 1994, hlm. 33.

<sup>143</sup> Goenawan Mohamad. “SIUPP” dalam *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti. 1999, hlm. 95. (*Tempo*, 13 Oktober 1990).

<sup>144</sup> Goenawan Mohamad. “Aniaya” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 79. (*Tempo*, 25 Januari 1986).

menurunkan laporan utama yang berisi investigasi pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur yang melibatkan B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi pada saat itu.<sup>145</sup> Pembelian kapal itu memang sarat kontroversi karena ditengarai ada konflik mengenai harga kapal antara B.J. Habibie dan Mar'ie Muhammad (Menteri Keuangan). Majalah *Tempo* menulis dalam laporannya:

“Tepat ketika isu pembelian 39 kapal perang eks Jerman Timur memuncak, terbetik berita bahwa KRI Teluk Lampung nyaris tenggelam di Teluk Biscay... Adakah kecelakaan itu bisa dijadikan indikator bahwa kapal bekas yang harganya masih diperdebatkan ini—antara tim TNI AL-BPPT dan tim Departemen Keuangan—pantas diragukan kecanggihannya? Ternyata tidak, menurut Habibie... kecelakaan itu membuktikan bahwa kondisi LST Teluk Lampung betul-betul siap tempur. Benar atau tidak, hanya para teknolog yang tahu. Yang pasti, sampai kini, harga 39 kapal itu dianggap terlalu mahal oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad... Dengan ancar-ancar US\$ 1,1 miliar, Habibie membentuk tim pembelian yang terdiri atas unsur Angkatan Laut, Markas Besar ABRI, BPPT, Hankam, Bappenas, dan Keuangan... "Anggaran ini pun masih bisa diturunkan karena tentu akan ditenderkan," kata sumber TEMPO... "Setelah dikalkulasi, akhirnya diperoleh bujet yang wajar adalah US\$ 482,35 juta," kata sumber TEMPO lagi... Namun, seperti diberitakan TEMPO pekan lalu, Mar'ie menolak anggaran tersebut. Bulan Mei lalu, Mar'ie menandakan bahwa dia hanya bisa menyediakan paling tinggi US\$ 319 juta... Jika itulah angka akhir, harganya terasa lebih pantas untuk kapal bekas.”<sup>146</sup>

B.J. Habibie dianggap oleh beberapa kalangan telah melangkahi kewenangan para pejabat lainnya dalam proses pembelian kapal tersebut. Beberapa hari setelah laporan itu muncul, Presiden Soeharto mengkritik media yang telah mengangkat berita kontroversial itu karena dianggap mengancam stabilitas nasional.<sup>147</sup> Kemudian, pada tanggal 21 Juni 1994 Departemen Penerangan mengeluarkan surat pencabutan SIUPP majalah *Tempo* dengan alasan yang samasekali tak jelas.<sup>148</sup>

Pembredelan kali ini lebih berat dibandingkan pembredelan sebelumnya, karena *Tempo* kemudian tidak bisa terbit lagi sampai pemerintah Orba tumbang pada tahun 1998. GM tentu saja sangat terpukul dengan kejadian ini. Sebagai pemimpin redaksi ia mau tak mau mesti bertanggung jawab dan berada pada garda depan dalam

<sup>145</sup> Lihat: Alumni Majalah *Tempo*. *Buku Putih Tempo: Pembredelan Itu*. Jakarta: Yayasan Alumni *Tempo*. 1994. dan Alumni Majalah *Tempo*. *Mengapa Kami Menggugat*. Jakarta: Yayasan Alumni *Tempo*. 1995.

<sup>146</sup> “Dihadang Ombak dan Biaya Besar”. *Tempo*, 11 Juni 1994.

<sup>147</sup> Janet Steele. *Op. Cit.*, hlm. 216.

<sup>148</sup> Alumni Majalah *Tempo*. *Buku Putih Tempo: Pembredelan Itu*. Jakarta: Yayasan Alumni *Tempo*. 1994, hlm. 12-13. Dalam surat keputusan itu hanya diterangkan bahwa *Tempo* dicabut SIUPP-nya karena dinilai membahayakan stabilitas nasional dan telah melanggar prinsip-prinsip pers Pancasila.

membela majalahnya. Ia menganggap pemerintah telah mencabut hak-hak warga negaranya dalam kebebasan berekspresi di satu pihak, dan hak memperoleh informasi di pihak lain. Sekali lagi ini membuktikan apa yang pernah ia tulis di tahun 1970-an ketika ia mengingatkan pembaca pada sebuah pepatah lama: mulutmu harimaumu, merekah kepala kamu. “Mereka yang tak ingin kepalanya terbelah, harus memilih kearifan ketimbang keberanian”.<sup>149</sup>

Dalam pandangan GM pembredelan itu adalah suatu gejala dari sebuah masyarakat yang daya dukung sosialnya pelan-pelan ambruk, yaitu ketika masyarakat tak bisa lagi mempunyai hubungan antar sesamanya dalam rasa aman dan kepastian hukum serta sikap beradab. Oleh sebab itu “... tanpa kemerdekaan bersuara, tanpa kebebasan bertindak, ambruknya daya dukung sosial itu tak akan mudah untuk dihadapi, apalagi dihindarkan”.<sup>150</sup> Dari sini bisa terbaca bagaimana pembelaan GM terhadap kemerdekaan dan kebebasan berekspresi adalah hal utama yang melandasi mengapa ia dengan segenap kemampuan melawan pembredelan itu. Ia percaya bukan ada atau tidaknya *Tempo* yang penting, namun kesungguhan dari pemerintah untuk menjamin kebebasan dan kemerdekaan pendapat bagi rakyatnya. Pergulatan untuk meraih kebebasan itu mesti terus menerus dilakukan meski kekuasaan, dalam waktu yang bersamaan, juga terus menerus berusaha menghentikannya.

---

<sup>149</sup> *Tempo*, 29 Januari 1972.

<sup>150</sup> Goenawan Mohamad. “Pengantar” dalam Alumni Majalah *Tempo*. *Buku Putih Tempo: Pembredelan Itu*. Jakarta: Yayasan Alumni Tempo. 1994, hlm. ix.

## **BAB 4**

### **PEMIKIRAN GOENAWAN MOHAMAD TENTANG KEKUASAAN**

“...Kekuasaan semakin besar, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk menggampangkan, memandekkan, menjustai...”

*Kemudian Lahirlah Takhyul. Catatan Pinggir. Tempo, 11 Juni 1983*

#### **4.1 Pentas Kekuasaan Orba**

Gelora revolusi yang gempita dan paradigma ‘politik sebagai panglima’ dari masa Demokrasi Terpimpin perlahan-lahan digantikan oleh Orba dengan gaya pemerintahan yang tenang dan memomorsatukan stabilitas. Orba sendiri punya klaim yang ia katakan kepada khalayak bahwa ia adalah penjaga harmoni. Periode Soekarno dianggap hanya mewariskan kekacauan dan ketaktertiban. Pula menurut Orba, baik itu era Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Terpimpin, tidak membawa stabilitas bagi negara. Lama kelamaan hal itu menjadi dalih bagi Orba untuk terus melanggengkan kekuasaan, dan pelan-pelan kekuasaan itu kian otoriter.

Ciri utama pemerintahan Orba adalah jangkauan kekuasaan negara yang sepertinya hendak menyentuh segala sendi kehidupan masyarakat. Dari tingkat pusat sampai daerah terlihat bahwa kekuasaan negara seolah selalu berkeinginan untuk mengontrol tindak-tanduk masyarakatnya. Kemakmuran dan pembangunan ekonomi yang berlangsung pada masa Orba memang sebuah pencapaian yang tak bisa dibantah, namun, pada saat bersamaan, langkah-langkah yang diambil rezim untuk terus bertahan di kursi kekuasaannya makin lama makin terasa opresif. David Bourchier dan Vedi Hadiz menggolongkan ciri pemerintah Orba sebagai tipe ‘organisis’ yang selalu menekankan pada konsep-konsep perihal ketertiban, harmoni, dan hierarki. Tipe ini menganggap bahwa otoritas di negara Indonesia harus mencerminkan pola-pola yang ditemukan dalam keluarga tradisional dan masyarakat pedesaan yang tertib. Orba menolak ideologi komunisme maupun liberalisme karena dianggap menyulut perpecahan, dan karena itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Corak pemikiran seperti ini bisa dilacak dari akar tradisi

aristokratis Jawa dan dalam beberapa hal berasal dari pemikiran Eropa yang antipencerahan, yang menyebar melalui pakar-pakar hukum Belanda dan mempengaruhi para nasionalis Indonesia pada awal abad ke-20.<sup>151</sup> Pemikiran ini dikenal sebagai paham ‘integralisme’ seperti yang pernah diungkapkan Soepomo dalam perdebatan penyusunan UUD 1945.

Seperti yang ditelaah oleh David Reeve, paham integralisme ini muncul lewat prinsip korporatis dalam organisasi dan partai politik yang didukung sepenuhnya oleh militer. Orba kemudian menjadikan prinsip integralisme sebagai landasan untuk melakukan restrukturisasi partai-partai politik pada awal dasawarsa 1970-an.<sup>152</sup> Integralisme juga menekankan pentingnya persatuan antara negara dan rakyat.<sup>153</sup> Dua unsur yang jelas amat berbeda ini, dibayangkan sebagai suatu ‘keluarga besar’ di mana antara yang berkuasa (negara beserta aparturnya) senantiasa akan melindungi yang dikuasai (masyarakat). Selain itu, Orba menganut paham pembangunan yang apolitis (*apolitical developmentalism*).<sup>154</sup> Menurut paham ini, yang sangat kental dengan nuansa pemikiran para ekonom dan teknokrat didikan Barat, prioritas pertama dan terutama dari negara adalah menyelenggarakan modernisasi serta pembangunan ekonomi. Untuk mewujudkannya diperlukan pengurangan yang signifikan terhadap pengaruh ideologi politik.

Dalam menentukan format kekuasaannya, Orba terlihat jelas berupaya untuk menggabungkan paham integralisme dengan *apolitical developmentalism*. Sebuah upaya memadukan unsur tradisional dengan pragmatisme ekonomi ala Barat. Pengaruh dari usaha penggabungan ini terbukti amat manjur: gelar ‘Bapak Pembangunan’ secara resmi disematkan kepada Soeharto dan rakyat makin percaya bahwa Orba benar-benar telah menyelamatkan mereka dari keterpurukan ekonomi

---

<sup>151</sup> David Bouchier dan Vedi R. Hadiz. *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia 1965-1999*. Jakarta: Grafiti. 2006, hlm. 11.

<sup>152</sup> David Reeve. *Golkar of Indonesia: An Alternative to the Party System*. Singapore: Oxford University Press. 1985, hlm. 32-34

<sup>153</sup> Hal ini mirip dengan ide tradisional Jawa tentang *manunggaling kawula gusti*, bersatunya *kawula* (hamba) dengan *gusti* (penguasa atau, pada tingkat tertentu, negara). Mengenai kekuasaan dalam pandangan orang Jawa lihat: Benedict R. O’G. Anderson. “Gagasan tentang Kuasa dalam Budaya Jawa” dalam *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Matabangsa. 2000, hlm. 35-169.

<sup>154</sup> David Bouchier dan Vedi R. Hadiz. *Op. Cit.*, hlm. 12.

seperti yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin.<sup>155</sup> Di sisi lain, upaya ini justru memunculkan efek negatif bagi keberadaan oposisi dan pihak yang kritis kepada pemerintah. Mereka yang mengkritik pemerintah dan program-program pembangunannya dianggap tidak setia kepada ‘keluarga besar’ dan, dalam tingkat tertentu, meremehkan nilai-nilai adat dan norma tradisional bangsa Indonesia. Orba menolak pula segala macam laku yang dianggap mencerminkan cara-cara liberal dan individualis—seperti yang pernah berlangsung di Indonesia pada era Demokrasi Liberal: konflik antarpantai, pembagian kekuasaan di antara partai, dan *voting* di parlemen (Orba lebih menyukai ‘musyawarah mufakat’ yang katanya mencerminkan nilai-nilai tradisi bangsa).

Selain bertumpu pada dalih stabilitas, rezim ini, seperti yang sudah ditulis di bab sebelumnya, menyandarkan kekuasaannya kepada peranan militer dalam politik. Tapi peranan ini perlahan surut pada awal dasawarsa 1990-an manakala penguasa Orba mulai tidak percaya kepada para elit militer di sekitarnya dan mulai mengalihkan perhatiannya kepada kelompok Islam yang sebelumnya tersisih dari pentas politik nasional.<sup>156</sup> Namun justru hal ini membawa akibat baik bagi perkembangan masyarakat madani: cengkeraman kekuasaan rezim atas masyarakat jadi makin longgar. Di sisi lain, masyarakat tengah berubah seiring makin meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi pada zaman Orba melahirkan kelas menengah baru yang besar dan kelas pekerja perkotaan yang tumbuh bak cendawan di musim penghujan.<sup>157</sup> Mereka adalah kelompok masyarakat yang kritis, yang menaruh minat terhadap perkara korupsi kekuasaan, hak asasi manusia, dan mulai tak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Dalam tingkatan yang lebih tinggi, kepercayaan mereka terhadap negara dan penguasanya telah surut, apalagi banyak terjadi kasus-kasus besar yang mempertontonkan kesewenangan negara terhadap rakyat. Pada akhirnya, bangunan politik Orba mulai rapuh lantaran ia

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Michael R.J. Vatikiotis. *Indonesian Politics under Suharto: The Rise and Fall of The New Order*. London: Routledge. 1998, hlm. 205-217.

<sup>157</sup> Richard Robison. “Kelas Menengah sebagai Kekuatan Politik di Indonesia: Beberapa Problem Analitis” dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (ed.). *Politik Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1996, hlm. 146-149.

tak sanggup lagi mengakomodasi perubahan-perubahan sosial yang tengah berlangsung.

#### 4.2 Kekuasaan

Dalam sebuah Catatan Pinggirnya GM menceritakan tentang kisah Tomas de Torquemada, seorang inkuisitor (penyelidik/pengusut iman seseorang) Spanyol pada abad ke-15, yang ditugasi gereja untuk mengusut kemurnian iman para pemeluk Nasrani.<sup>158</sup> Pada zaman itu, seorang penganut yang dianggap melakukan *bid'ah*, dan karena itu tak murni lagi imannya, diputuskan untuk dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Teror ini begitu kejamnya hingga kira-kira 2.000 orang mati dibakar atas titah Torquemada. GM memandang gejala ini sebagai logika dasar dari tiap kekuasaan yang selalu berkeinginan untuk mencengkeram masyarakat yang dikuasainya.

“Barangkali itulah dasar setiap kekuasaan yang mencoba mengawasi dan mengusut kita terus menerus: kepercayaan bahwa manusia lemah dan cepat menjadi busuk, bahwa orang dilahirkan bagus tapi itu hanya ilusi.”<sup>159</sup>

Agaknya dari asumsi seperti itulah tiap rezim totaliter di dunia ini menjalankan kekuasaannya.

Kecurigaan para penguasa kepada masyarakatnya lama-lama kian tampak ketika umur kekuasaan itu makin panjang. GM memberi contoh bagaimana para tiran di dunia punya kecenderungan mencurigai yang amat besar, juga kepada orang-orang terdekatnya. Bahkan, dalam tingkatan lebih lanjut, kekuasaan seorang orang kuat kian lama kian mirip “lingkaran kesepian dan paranoia”.<sup>160</sup> Stalin di atas ranjang ketika ia sakit menuduh para dokter pribadinya berkomplot untuk membunuhnya.<sup>161</sup> Amangkurat I selalu curiga kepada putra mahkotanya sampai-sampai ia menuduh calon penggantinya hendak meracunnya ketika ia meminta minum air kelapa dan

<sup>158</sup> Goenawan Mohamad. “Sang Pengusut” dalam *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Grafiti. 1990, hlm. 210. (Dimuat di *Tempo*, 3 Maret 1979).

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 55. “Park Chung-Hee”. (*Tempo*, 10 November 1979).

<sup>161</sup> *Ibid.*

ternyata kelapa itu sudah dilubangi.<sup>162</sup> Para sultan di Turki masa Ottoman sampai abad ke-16 seringkali membunuh saudara-saudaranya sendiri agar tak ada ancaman bagi kekuasaannya.<sup>163</sup> Di sinilah kebebasan mengkritik kekuasaan menjadi penting, agar kekuasaan seolah tak berjalan sendirian. “...Di negeri yang tak mengizinkan orang untuk berbicara bebas. Di situ para pemimpin dihukum untuk dirundung selalu curiga, karena tak banyak lagi orang berani berterus terang,”<sup>164</sup> tulis GM.

Ketika kekuasaan butuh tempat berpijak yang pasti untuk langgeng ia cenderung menciptakan “musuh buatan” agar rakyat selalu waspada terhadap segala sesuatu yang oleh penguasa dianggap mengancam keamanan negara—padahal yang dimaksud adalah keamanannya sendiri. Kekuasaan membuat kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang mirip medan pertempuran atau semacam ujian kesetiaan politik yang terus menerus. Maka terciptalah logika biner “kawan” dan “lawan”. Kewaspadaan dibuat sedemikian rupa hingga menjadi sesuatu yang periodik dan pengkhianat pun selalu dihadirkan. Tapi, bagi GM, tentu saja tak ada masyarakat yang tetap bisa berjalan normal jika mereka harus bersiaga dalam keadaan “siap tempur” tiap hari. GM menulis:

“...tirani memang perlu suasana serba curiga yang bertahan. Tapi tirani juga punya perut yang harus diisi, dan sementara itu, tak ada kekuasaan yang bisa merasa aman sendiri bila ia terus menerus menyebarkan rasa tak aman ke sekitar.”<sup>165</sup>

Sebab bagi GM, sikap serba curiga kekuasaan justru menjadi benih ketidakstabilan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan akan selalu merasa tidak aman dan oleh karena itu justru pada saat yang bersamaan ia sedang mengakui keterbatasannya. Maka, kekuasaan pun harus tahu batas. Ia tak bisa terus menerus melanggengkan keserbacurigaannya, sementara ia sendiri dipenuhi keterbatasan-keterbatasan. “Hati

---

<sup>162</sup> Goenawan Mohamad. “O, Anak” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 85. (*Tempo*, 7 Juni 1986).

<sup>163</sup> Goenawan Mohamad. “Di Seraglio” dalam *Catatan Pinggir 2*. Jakarta: Grafiti. 2006, hlm. 216-217. (*Tempo*, 27 Maret 1982).

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 378. “Khrushchev & Airlangga”. (*Tempo*, 26 Maret 1983).

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 406. “Si Pavlik”. (*Tempo*, 14 Desember 1985).

manusia,” kata GM, “lebih kaya dari hanya dua kubu, dua pihak, dan sebuah medan perjuangan.”<sup>166</sup>

Dalam keterbatasannya itulah sebenarnya kekuasaan bertumpu kepada orang-orang yang juga terbatas. Mungkin karena itu hukum kenegaraan modern mengatur bagaimana agar kekuasaan dan pemegangnya tidak sampai menjadi “tak terbatas”. GM mengambil kisah Thomas Jefferson, presiden Amerika ke-3, ketika ia menolak dicalonkan lagi sebagai presiden dan lebih memilih mundur untuk pulang ke kampung halamannya, meski bisa saja ia mencalonkan diri lagi, dan kemungkinan terpilihnya sangat besar.<sup>167</sup> Jefferson menganggap dirinya telah lepas dari apa yang disebutnya ‘borgol kekuasaan’. Baginya kekuasaan memang membelenggu. Ia dengan rela meninggalkan kekuasaannya itu karena bagi Jefferson kekuasaan tak menawarkan kebahagiaan buat dirinya. Memang sepanjang pemerintahannya Jefferson dikenal orang yang bersih dan sederhana, ia juga dikenal sebagai pemrakarsa hak-hak sipil bagi rakyat AS. Pendeknya, ia ‘demokrat sejati’. Tapi bukannya tak ada kelemahan, Jefferson pernah punya *affair* terlarang dengan seorang budak wanitanya yang cantik semasa jadi presiden, ia juga, di masa mudanya, pernah “mengganggu” istri orang lain. Mengomentari hal ini, GM menulis:

“Mungkin karena menyadari bahwa dirinya bukan di luar dosa itulah Jefferson meninggalkan sesuatu yang ternyata memang berharga... satu ide tentang kekuasaan dan batas manusia, dan juga satu contoh perbuatan sejati...”<sup>168</sup>

Dengan cara pandang seperti itu, kekuasaan memang tak dapat serta merta mengelak bahwa dirinya bisa tak terbatas. Bagaimanapun juga, bagi GM, manusia adalah suatu makhluk yang kemuliaannya justru terletak pada ketidaksempurnaannya, baik manusia yang punya kuasa atau pun tidak. Dalam dunia politik masyarakat diibaratkan oleh GM sebagai “bazar yang centang perenang”,<sup>169</sup> sebuah entitas yang tak bebas dari konflik dan adu kepentingan. Di dalamnya keluh kesah dan keinginan

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 407.

<sup>167</sup> Goenawan Mohamad. “Jefferson” dalam *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Grafiti. 1990, hlm. 386. (*Tempo*, 3 Desember 1977).

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 387.

<sup>169</sup> Goenawan Mohamad. “Politik” dalam *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti. 1999, hlm. 189. (*Tempo*, 13 Juni 1992).

yang sering tak akurat adalah hal yang lazim. Maka diperlukan latihan terus menerus merumuskan keluh dan keinginan itu untuk kemudian mengujinya dalam perdebatan dan kompetisi. Dari manakah “latihan” itu didapat”? GM menekankan perlunya ‘pendidikan politik’ sebagai sarana latihan untuk mengelola keluh dan keinginan itu. Sebab pendidikan politik bermula dari kesadaran akan kecentang-perenangan masyarakat.

“Pendidikan politik mengajarkan perlunya kekuasaan, tetapi karena bermula dari asumsi tentang masyarakat sebagai sebuah bazar, pendidikan politik juga sebuah latihan mengakui keterbatasan kekuasaan itu.”<sup>170</sup>

Seperti diakuinya, tidak mudah memang melaksanakan hal itu, apalagi dalam suasana rezim totaliter macam Orba. Dalam sebuah masyarakat yang oleh penguasanya terlanjur dianggap sebagai sebuah garis linier, tak akan cukup tersedia infrastruktur kebebasan menyatakan pendapat, yang memberi kesempatan kepada suara yang berbeda dan pada saat bersamaan menghargai proses hukum. Yang ada penumpasan sistematis terhadap pelbagai suara berbeda itu.

Karena itu, kekuasaan mesti membuka diri bagi suara-suara yang berbeda, juga bagi kemungkinan-kemungkinan lain siapa tahu suatu saat ada yang lebih mampu memegang kuasa. Hal inilah yang rupanya tak disadari penguasa Orba. Ketika kekuasaannya berlangsung terlalu lama, ia seakan menutup diri bagi kemungkinan yang lain meneruskan kekuasaannya itu. Ia mandek dalam sikap yang enggan membuka proses suksesi. Padahal, menurut GM, dengan senantiasa menyadari bahwa kekuasaan dan manusia itu terbatas, sedapat-dapatnya harus diwujudkan suatu sistem yang memberi lebih banyak kesempatan kepada penguasa untuk, meminjam kata-kata seorang darwish dalam *Thinkers of the East* karya Idries Shah, “menyiasati tingkah lakunya sendiri.”<sup>171</sup> Kesempatan seperti itu tak datang dengan sendirinya lewat kehendak penguasa. Ia butuh bantuan melalui “teguran”, dalam arti penguasa membutuhkan kritik. Sebab kritik penting dalam rangka memicu proses belajar, terutama bagi penguasa agar selalu menginsyafi “manfaat serta

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>171</sup> *Op. Cit.*, hlm. 396. “Di Bawah atau Dengan Kekuasaan”. (*Tempo*, 31 Mei 1980).

bahayanya kekuasaan”.<sup>172</sup> Di samping itu, terciptanya sebuah sistem yang bisa mengatur suksesi dengan baik juga diperlukan. Sebuah republik mesti membuka lebar proses seleksi kepemimpinan agar potensi bakat-bakat bagus untuk memimpin tak terpendam lama.<sup>173</sup> Sekali lagi, dalam hal ini, GM menekankan tentang keterbatasan manusia.

“...tak seorang pun bisa mengelak dari keterbatasan—biarpun ia seorang raja yang bebas berbuat apa pun. Para pemimpin yang penuh kharisma, dengan kekuasaan penuh di tangan mereka, pada saatnya harus pergi...”<sup>174</sup>

“Kepergian pemimpin” ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mempunyai suatu mekanisme—atau dalam istilah GM “tubuh politik” —yang berbeda. Yaitu sebuah kebersamaan yang “punya pemimpin-pemimpin rutin,” yang pada waktu bersamaan juga “mengakui kemungkinan sang raja untuk khilaf dan, suatu saat, tidak di sana lagi.”<sup>175</sup>

Tapi di sisi lain, masyarakat yang terlalu lama berada di bawah kekuasaan yang dominan, seperti halnya Indonesia zaman Orba, cenderung memilih jalan aman untuk tetap bertahan pada *status quo*. Mereka jadi tak terbiasa dengan kemungkinan munculnya penguasa baru. Kalau pun terjadi suksesi mereka lebih cenderung memilih kontinuitas antara pemimpin lama dan pemimpin baru. Karena psikologi masyarakat pada masa itu adalah semacam “psikologi garansi”: proses pergantian pimpinan diharapkan tak menghasilkan buah yang salah. Namun, menurut GM, kontinuitas macam itu punya resikonya sendiri. Memilih kontinuitas cenderung “melahirkan produk fotokopi.”<sup>176</sup> Dan itu akan menjadi jalan ke arah langgengnya sebuah langgam dan strategi ala *status quo*, padahal langgam dan strategi itu keliru.

Jika demikian, tampaknya memang tak mudah untuk mencari cara paling mujarab untuk menyiapkan pengganti. Kecuali masyarakat dan penguasa sepakat

---

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 397.

<sup>173</sup> Goenawan Mohamad. “Hamengku Buwono” dalam *Catatan Pinggir 2*. Jakarta: Grafiti. 2006, hlm. 413-414. (*Tempo*, 2 April 1983).

<sup>174</sup> Goenawan Mohamad. “Bunyoro” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 104. (*Tempo*, 17 Oktober 1987).

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>176</sup> Goenawan Mohamad. “Bos” dalam *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti. 1999, hlm. 174. (*Tempo*, 15 Juni 1991).

bahwa “tak ada sistem dan prosedur yang bersih dari resiko, dan tak ada yang bebas dari cacat.”<sup>177</sup> Apalagi bila yang dipertaruhkan ialah sesuatu yang besar sekali harganya (baca: kekuasaan), resiko dan cacat memang akan tambah mengancam. Tapi, masalahnya kemudian adalah masyarakat itu sendiri bukanlah pihak yang paling berat menanggung resiko. Penguasalah, yang di dalam dirinya dipenuhi *vested interest* dan tidak “*sepi ing pamrih*”, pihak yang paling besar menanggung resiko itu. Hingga terkadang ia sendiri ketakutan dengan segala hal yang berbau suksesi.

Memang, menilik apa yang terjadi dalam sejarah, nasib seorang pemimpin besar yang punya kekuasaan begitu besar di tangannya adalah miskinnya ketersediaan pengganti. Apalagi kian besar kekuasaan itu, kian bengis pula persaingan untuk mendapatkannya. GM menulis:

“Nasib seorang pemimpin besar juga untuk pada akhirnya bimbang: ukuran kepemimpinan yang dia tinggalkan jadi begitu luas dan membikin gentar, hingga tak pernah terasa pas untuk siapa pun yang menyusul.”<sup>178</sup>

GM melihat hal ini sebagai “niat baik” dari pemegang kekuasaan untuk selalu melindungi. Karena mungkin sang penguasa was-was jangan-jangan tatkala ia berhenti rakyat tak akan terlindungi lagi. Tapi hasil “niat baik” itu, kata GM, adalah lingkaran setan.<sup>179</sup> Yaitu tatkala yang berkuasa lama-lama enggan melepas kekuasaannya; sementara karena stok pengganti yang minim, ketertiban negara bisa saja menemukan kekacauannya.

Akibat dari kekuasaan yang terlalu lama ini adalah kian tumbuhnya tendensi untuk jadi makin kaku: penguasa tak pernah punya keinginan untuk meninjau kembali dasar pandangan yang selama itu dipergunakan berhubung tak ada saingan maupun perbandingan.<sup>180</sup> Sikap toleran akhirnya jadi kian tipis. Mereka yang berbeda, yang “unik”, yang tak mau ikut jalan penguasa, dengan serta merta dicap sebagai “pembanggang”.

---

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Goenawan Mohamad. “Jawaharlal Nehru” dalam *Catatan Pinggir 2*. Jakarta: Grafiti. 2006, hlm. 475. (*Tempo*, 9 April 1983).

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Goenawan Mohamad. “Pemimpin” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 109-110. (*Tempo*, 23 Juli 1988).

Dalam konteks toleransi itu, GM lebih jauh berbicara tentang apa yang disebutnya *'liyan', the other*. Liyan adalah kosakata yang diambil dari bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia berarti 'yang lain.' Menurut inti maknanya, liyan bukan hanya berarti 'bukan-aku', tapi juga 'berbeda dari aku'—sebab itu liyan selamanya berada "di luar diriku". Dengan demikian, menurut GM, hubungan antara 'aku' dan 'liyan' menjadi kehilangan hakikatnya bila keadaan 'berbeda' itu dihilangkan.<sup>181</sup> Dalam suatu sistem totaliter semacam Orba, desakan kuat kekuasaan ialah desakan untuk meniadakan perbedaan, pretensinya lebih cenderung ke arah menyeragamkan. Kondisi ini membuat hubungan dengan liyan menjadi "semu di permukaan, atau menjadi murni di dalam keadaan sembunyi-sembunyi."<sup>182</sup> Maka, ketika penguasa yang selalu berniat untuk menyeragamkan itu menuntut, misalnya, kesetiaan mutlak rakyat kepada sesuatu yang bernama 'negara' atau pun 'ideologi negara', ia sebenarnya tengah meringkus kita menjadi sebuah identitas tunggal atau, meminjam kalimat GM, "menjadi sebuah eksemplar dari sesuatu yang homogen, seragam, padu." Ketika itulah penguasa Orba sebenarnya mengalami secara langsung paradoks dalam dirinya: kebhinekaan yang senantiasa dijunjung tinggi itu, bahkan seolah dimitoskan oleh penguasa, macet karena tindakannya sendiri. Laku penyeragaman itu bisa dihindari dengan menjunjung sikap toleransi. GM menulis:

“...Hanya dengan diri kita masing-masing menjadi diri kita, dan dengan demikian mengakui 'orang lain' dalam 'ke-lain-an'-nya, hanya dengan menyambut dan merayakan *liya liyaning liyan*, kita bisa melihat politik sebagai sesuatu yang bukan mengasingkan... kita bisa menghargai kebersamaan kita dalam suatu *polis* (dengan kata lain berpolitik) sebagai sesuatu yang tidak tinas-menindas...”<sup>183</sup>

Kehadiran sang liyan dalam kehidupan berpolitik bisa dimaknai sebagai hadirnya keserbataktunggalan di hadapan kita, juga mengakui bahwa kita memang terbatas. Ia membuat kita berpikir ulang bahwa sikap membuka diri, toleransi, kepada

---

<sup>181</sup> Goenawan Mohamad. "Sangopati" dalam *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti. 1999, hlm. 66. (*Tempo*, 16 Oktober 1993).

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

sang liyan adalah suatu kemestian. Sebab, “tanggung jawab kita kepada orang lain disertai rasa terbatas, sikap membuka diri.”<sup>184</sup>

### 4.3 Rakyat versus Negara

Pendekatan kemanan yang dilakukan oleh Orba dengan dalih demi terciptanya stabilitas dan kelancaran pembangunan nampaknya diikuti dengan munculnya kekerasan negara terhadap rakyat. Atau dalam kadar lebih tinggi, kekerasan kepada rakyat yang disponsori oleh negara.<sup>185</sup> Hampir sepanjang masa berkuasanya, Orba dipenuhi oleh aksi kekerasan macam itu. Bahkan rezim itu sendiri lahir melalui benih-benih kekerasan dalam bentuk pembantaian orang-orang yang dicap PKI. Kekerasan negara, beserta aparturnya, terhadap rakyatnya sendiri menjadi salah satu perhatian utama GM dalam beberapa Catatan Pinggirnya.

Negara, bagi GM, dianggap sebagai suatu kekuatan yang sanggup memberikan perlindungan, tetapi di sisi lain ia juga bisa opresif.<sup>186</sup> Kecenderungan opresif ini muncul karena justru dengan kekuatan yang dimilikinya, negara mempunyai monopoli atas penggunaan kekerasan. Sementara dalam negara Orba, penguasa seakan-akan mempersonifikasikan dirinya dengan negara. Sehingga segala kritik atau kecaman terhadap penguasa dengan mudah dianggap membahayakan stabilitas negara. Bahkan, pada tingkat tertentu, penguasa menganggap masyarakat dan negara bukan dua hal yang patut dibedakan, mereka ibarat sebuah keluarga yang rukun dan manis. Tapi dalam kenyataannya tentu saja tidak demikian: konflik, bahkan bentrokan, bisa saja terjadi; kemungkinan timbulnya sikap saling tak percaya di antara keduanya selalu ada. Masyarakat dan negara, kata GM, “adalah ‘dwi’ yang tak selamanya ‘tunggal.’”<sup>187</sup>

GM mengkritik pandangan Soepomo, salah satu *founding father* Indonesia yang turut merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan orang yang teramat

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>185</sup> R. E. Elson. “In Fear of The People: Suharto and The Justification of State-Sponsored Violence under The New Order” dalam Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad (ed.). *Roots of Violence in Indonesia*. Singapore: ISEAS. 2002, hlm. 173.

<sup>186</sup> *Op. Cit.*, hlm. 191. “Ali Topan dan Negara”. (*Tempo*, 16 Januari 1993).

<sup>187</sup> *Ibid.*

meyakini keluhuran nilai-nilai “Timur”, tentang hubungan rakyat dan negara. Dalam pandangan Soepomo, nilai-nilai ketimuran mengajarkan bahwa sang pemimpin bersatu jiwanya dengan seluruh rakyat, struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bercita-cita ke arah terwujudnya persatuan hidup, persatuan *kawulo* (rakyat) dan *gusti* (penguasa). Soepomo seolah sedang menampik anggapan bahwa penguasa bisa saja melakukan kesewenang-wenangan terhadap hak rakyat. Bagi GM, pandangan Soepomo ini mengabaikan kenyataan sejarah bahwa adat asli yang mencerminkan struktur kerohanian bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu proses perkembangan sosial.<sup>188</sup> Dalam proses itu bukan tidak mungkin jika terjadi pelbagai konflik kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat. Soepomo tak bisa melihat bahwa masyarakat sebenarnya mengandung sengketa dalam dirinya—setidaknya antara yang berkuasa dan tidak berkuasa. Padahal sejarah kita dipenuhi oleh konflik-konflik macam itu.

“...Soepomo mengabaikan sejarah pelbagai pemberontakan petani yang meletus di Jawa di sekitar awal abad ke-20. Ia juga mengabaikan adanya konflik sosial dalam Perang Padri, kesewenang-wenangan penguasa menjelang Perang Diponegoro, kezaliman Amangkurat, benturan elite pribumi dalam Perang Aceh, dan lain-lainnya.”<sup>189</sup>

Di Indonesia zaman Orba, nampaknya memang tidak ada garis batas yang jelas antara masyarakat dan negara. Akibatnya fatal: negara bisa dengan mudah menghantam masyarakat lewat jalan kekerasan, apalagi kepada rakyat kecil. Dalam sebuah Catatan Pinggirnya yang berjudul ‘The Death of Sukardal’—menurut beberapa orang, Catatan Pinggir inilah yang menunjukkan secara jelas keberpihakan GM kepada mereka yang tertindas, sekaligus membantah anggapan bahwa Catatan Pinggir cenderung “mendua” dan “menolak terlibat”—GM menentang kesewenangan otoritas kekuasaan terhadap rakyat kecil dengan cara, meminjam kata-kata Janet Steele, “memperkuat drama moral tentang konflik antara pemerintah dengan rakyat biasa.”<sup>190</sup> Catatan Pinggir ini mengetengahkan sebuah komentar atas berita tentang

<sup>188</sup> *Ibid.*, hlm. 23. “Di Timur”. (*Tempo*, 13 April 1991).

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>190</sup> Janet Steele. *Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru*. Jakarta: Dian Rakyat. 2007, hlm. 145.

nasib Sukardal, pengayuh becak yang becaknya dirampas oleh petugas Tibum (Ketertiban Umum).<sup>191</sup>

GM menunjukkan betapa Sukardal adalah *wong cilik* yang dihantam oleh kekuasaan sewenang-wenang tapi memilih tidak bungkam, bahkan sampai menjelang ia mati bunuh diri. Tukang becak ini pada suatu hari terampas becaknya dalam sebuah operasi penertiban di Bandung. Setelah dengan susah payah melawan tindakan petugas, ia berteriak ingin bunuh diri. Beberapa hari kemudian ia memang bunuh diri—sebagai bentuk perlawanan terakhir kepada kesewenang-wenangan. Sesaat sebelum menggantung dirinya pada sebuah pohon, Sukardal menulis di tembok dekat pohon itu: “Kalau betul-betul negara hukum, Tibum harus diusut.” GM menilai peristiwa ini sebagai “sebuah perkara besar, karena ia justru terbit pada seorang yang begitu kecil.” Perlawanan orang kecil terhadap kekuasaan yang menzaliminya sebenarnya hampir suatu kesia-siaan, tapi, menurut James Scott, dengan begitu orang-orang kecil telah menyatakan kehadiran politisnya.<sup>192</sup> GM berpendapat lebih lanjut bahwa protes orang kecil adalah protes yang dilesakkan dengan “keyakinan tipis bahwa protes itu akan didengar, dan karena itu teriaknya sampai liang lahad.” Ini menjadi pertanda bagi suatu rezim totaliter bahwa mereka yang protes, mereka yang terinjak oleh serakahnya kekuasaan, tak akan bisa begitu saja bungkam. Betapapun mereka tahu mereka akan kalah. Selanjutnya GM menulis:

“...Orang kecil adalah orang yang pada akhirnya terlalu sering kalah. Sukardal...toh masih merasa perlu menuliskan pesannya. Ia mati, dan ia tidak membisu. Dan hidup kita, kata seorang arif bijaksana, terbuat dari kematian orang-orang lain yang tidak membisu.”

Dengan nada simpati yang kurang lebih sama, GM memberikan pandangannya tentang kematian Marsinah dalam Catatan Pinggir yang merupakan ringkasan dari pidato pemberian Penghargaan Yap Thiam Hien kepada almarhumah Marsinah pada 10 Desember 1993.<sup>193</sup> Marsinah adalah seorang buruh pabrik arloji di

<sup>191</sup> Goenawan Mohamad. “The Death of Sukardal” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 297-299. (*Tempo*, 19 Juli 1986).

<sup>192</sup> James C. Scott. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: YOI. 2000.

<sup>193</sup> Goenawan Mohamad. “Marsinah” dalam *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti. 1999, hlm. 154-156. (*Tempo*, 18 Desember 1993).

Sidoarjo yang bersama teman-teman sekerjanya menuntut diberikan tunjangan tetap. Marsinah kemudian ditemukan mati terbunuh karena tusukan benda runcing, perutnya luka sedalam 20 sentimeter, selaput daranya robek, dan tulang kelamin bagian depannya hancur. Siapa yang membunuh Marsinah memang tak diketahui dengan pasti, tapi indikasi kuat mengarah kepada kesimpulan bahwa pembunuhan ini disebabkan lantaran Marsinah adalah seorang buruh yang vokal menyuarkan hak-haknya. “Buruh yang vokal” pada zaman Orba dianggap mengganggu paham tentang “ketentraman”, “keselarasan”, “ketertiban”, serta “persatuan dan kesatuan”; paham yang, menurut GM, tengah diberlakukan secara gampang dan kasar dalam skala besar di Indonesia. Oleh sebab itu ia mesti disingkirkan. Pembunuhan ini segera saja jadi kasus besar dan membuat kegegeran dalam skala nasional.

Dalam hubungannya dengan kekuasaan, GM menilai kematian Marsinah menandai dua macam agresi sekaligus: agresi terhadap marsinah sebagai buruh dan marsinah sebagai seorang perempuan. Dari sini, GM menilik tentang hadirnya sebuah “ideologi”, sebuah jalinan kepentingan, yang bisa teramat sewenang-wenang terhadap segala anasir yang memang sudah berada dalam posisi terpinggirkan, dalam hal ini adalah kaum buruh dan perempuan. Buruh di Indonesia punya kedudukan yang sangat lemah dalam kehidupan sosial-ekonomi yang surplus tenaga kerja, sedangkan perempuan senantiasa berposisi genting dalam lingkungan masyarakat yang patriarkhis.

Menurut GM, “ideologi” seperti itulah yang sebenarnya membunuh marsinah. Ia terbunuh dalam kondisi kekuasaan yang hubungan antar penguasa dan rakyatnya ditandai dengan miskinnya penghormatan penguasa terhadap hak-hak dasar manusia: hak bersuara, hak untuk punya harapan, bahkan hak untuk punya jiwa dan badan. Oleh GM, hak-hak itu dikatakan sebagai “gelombang pasang yang sedang mendesak.” Maka, tak dapat dielakkan lagi bahwa persoalan buruh yang mengeluh, seperti halnya dalam tragedi Marsinah, pada akhirnya persoalan politik, karena menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan di masyarakat luas. Tapi, menurut GM, jika pun ada yang masih merasa cemas akan hal itu, persoalannya bisa dikembalikan ke hal yang bersahaja:

“...biarkan keluhan itu didengar, biarkan perbaikan dituntut, dan dengarkan dengan baik mereka yang terisap. Yang akan terjadi kemudian sebuah perkara manusia biasa, bukan benturan kekuasaan dari mana-mana.”<sup>194</sup>

Sukardal dan Marsinah bisa dijadikan contoh bagaimana “keluhan kecil” dari rakyat kecil tak akan pernah membisu meski kekuasaan mematakannya. Keluhan kecil semacam itu muncul bukan di atas permukaan, melainkan tersembunyi di bawah permukaan. Kesalahan para penguasa, kata GM, ialah bahwa mereka cuma memberi perhatian pada apa yang nampak di atas permukaan.

Dalam konteks Orba, jika para penguasa melihat, misalnya, tak terlihat ada pers yang berani, tak terdengar protes atau keluhan, atau tak ada suara kritik yang konsisten, maka penguasa menganggap dirinya telah berhasil menciptakan stabilitas masyarakat. Padahal, suara-suara yang muncul dari bawah permukaan inilah yang penting. Ia menjadi pertanda belum matinya daya nalar kritis masyarakat. Dalam suasana itu GM menganggap telah terjadi apa yang oleh Antonio Gramsci dinamakan ‘hegemoni’, yaitu kemampuan penguasa untuk meyakinkan golongan yang dikuasai, bahwa membangkang adalah suatu dosa besar. Dari situ GM kemudian menjabarkan konsepsi James Scott tentang “infrapolitik” yang dijalankan oleh orang-orang tertindas dalam bentuk perlawanan sembunyi-sembunyi, perlawanan dari mereka yang tak mau begitu saja runduk dan tunduk. Perlawanan yang kemudian mewujud “dalam keluhan-keluhan kecil.” Menurut GM, munculnya keluhan kecil semacam itu bisa berarti awal dari proses demokratisasi. “Hak-hak manusia sebenarnya memang lahir... dari keluhan yang mencoba membebaskan diri dari rasa tertekan yang mendalam...”<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 106. “Budak”. (*Tempo*, 8 Juni 1991).

<sup>195</sup> *Ibid.*

## BAB 5

### PEMIKIRAN GOENAWAN MOHAMAD TENTANG DEMOKRASI

“Demokrasi memberikan kemungkinan perluasan ruang untuk bertukar pikiran dan berbagi alternatif.”

*Di Timur, Matahari. Catatan Pinggir. Tempo, 4 November 1978.*

#### 5.1 Demokrasi di Indonesia Zaman Orba

Pada 1967, saat Soeharto berpidato di depan sidang DPR GR ia menyatakan bahwa Orde Baru tak akan terjerumus dalam kediktatoran militer yang mematikan demokrasi, dan dinyatakan pula bahwa prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia akan ditegakkan sebagaimana mestinya.<sup>196</sup> Pidato ini bisa dibaca sebagai upaya Orba untuk menentramkan rakyat Indonesia yang pada saat itu sedang berharap banyak agar demokratisasi dan keterbukaan dapat dijalankan oleh rezim yang baru. Dalam perkembangannya kemudian, harapan itu perlahan-lahan kikis: korupsi, rekayasa politik, dominasi militer dalam berbagai sendi kehidupan sosial-politik makin merajalela dalam perjalanan politik Orba. Kekecawaan para cendekiawan, insan pers, dan mahasiswa—yang semula berharap banyak kepada Orba—terhadap proses demokrasi segera muncul tatkala pemerintah mulai meningkatkan tekanannya kepada partai-partai politik menjelang Pemilihan Umum 1971.<sup>197</sup> Selain karena Orba juga dalam skala massif berupaya mendepolitisasi masyarakat melalui apa yang dinamakan konsep *floating mass* (massa mengambang).

Selanjutnya, ketika Orba tengah berada di puncak kekuasaan dan telah menemukan format politiknya pada 1973-1988, proses pelemahan demokrasi makin menjadi-jadi. Ditandai dengan pengetatan kehidupan politik lewat meningkatnya konsentrasi kekuasaan politik dan melemahnya hak-hak demokrasi masyarakat sipil. Peristiwa Malari lah yang menjadi pintu masuk menuju proses pengetatan ini. Pengetatan yang didukung sepenuhnya oleh militer dan karena itu makin kentara

---

<sup>196</sup> Pidato Kenegaraan Soeharto di depan sidang DPR GR 16 Agustus 1967 yang dimuat dalam David Bourchier dan Vedi Hadiz. *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia 1965-1999*. Jakarta: Grafiti. 2006, hlm. 50-56.

<sup>197</sup> Mohtar Mas'ood. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES. 1989, hlm. 161-175.

bahwa rezim ini tak ubahnya rezim militer.<sup>198</sup> Puncaknya adalah tatkala pemerintah memberlakukan sistem asas tunggal kepada semua ormas dan partai politik pada awal dasawarsa 1980-an. Asas tunggal dalam hal ini adalah kewajiban bagi semua ormas dan parpol untuk menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya landasan ideologi yang digemakan melalui serangkaian kampanye besar dan indoktrinasi kepada masyarakat.<sup>199</sup> Saat kebijakan asas tunggal dilegalkan menjadi undang-undang pada 1985, pemerintah Orba menganggap sebagai suatu prestasi besar sekaligus membuka suatu zaman baru dalam masa pemerintahannya. Paling tidak menurut Soeharto, penerapan Pancasila membuat Indonesia berhasil meninggalkan konflik sektarian dan ideologis yang memecah belah bangsa di masa Orde Lama.<sup>200</sup> Penerapan asas tunggal ini juga mencerminkan upaya Orba untuk membatasi kebebasan partai dan ormas dan secara efektif mengkodifikasikan penolakan pemerintah terhadap gagasan tentang demokratisasi dan politik oposisi.<sup>201</sup>

Ketika senjakala kekuasaan Orba mulai nampak pada awal dasawarsa 1990-an, demokrasi menjadi wacana yang banyak diperdebatkan oleh pelbagai kalangan. Topik yang paling utama dalam perdebatan ini adalah tuntutan terhadap adanya transparansi dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kehidupan sosial-politik. Sedari paruh kedua dasawarsa 1980-an, Indonesia mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang amat pesat, yang ditandai dengan program deregulasi dan liberalisasi ekonomi. Konsekuensinya adalah struktur politik negara yang kaku dan otoriter mesti mengalami perombakan guna memungkinkan berlangsungnya demokratisasi serta partisipasi masyarakat yang lebih luas. Penguasa nampaknya memahami konsekuensi itu dan mulai bersikap membuka diri terhadap pelbagai kritik.<sup>202</sup> Soeharto memberi isyarat bahwa ia mendukung iklim keterbukaan dan

---

<sup>198</sup> David Jenkins. *Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Depok: Komunitas Bambu. 2010, hlm. 17-25.

<sup>199</sup> Hal Hill (ed.). *Indonesia's New Order: The Dynamics of Socio-Economic Transformation*. New South Wales: Allen & Unwin. 1994, hlm. 15-17.

<sup>200</sup> Soeharto. *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti Diturunkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.* Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada. 1989, hlm. 408-410.

<sup>201</sup> David Burchier dan Vedi Hadiz. *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>202</sup> Edward Aspinall. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. California: Stanford University Press. 2005, hlm. 122-131.

demokratisasi, yang kemudian membawa akibat makin mengendornya cengkeraman kuat negara atas masyarakat. Ini berarti bahwa kekuasaan Orba juga mulai menyusut. Tapi, di era ini pun penguasa banyak melancarkan tindakan-tindakan antidemokrasi untuk membungkam oposisi. Pembredelan majalah *Tempo* dan dua media cetak lain (*Detik* dan *Editor*) pada 1994 merupakan salah satu contoh nyata.

## 5.2 Demokrasi

Prinsip dasar pemikiran GM tentang demokrasi tak beda jauh dengan prinsip dasar yang ia kemukakan ketika memandang kekuasaan otoriter. Seperti yang sudah dikemukakan di bab sebelumnya, GM menganggap bahwa masyarakat adalah “bazar yang centang-perenang,” dalam artian di antara masyarakat itu sendiri tak akan bisa mengelak dari konflik atau pertentangan pendapat. Dalam memandang demokrasi, GM berpendapat bahwa demokratislah suatu sistem yang bisa mengakui adanya konflik sebagai bagian wajar dalam kehidupan manusia. Karena demokrasi berdiri di atas asumsi bahwa manusia punya ekspresi kemanusiaan yang berlainan dan majemuk, yang bisa dengan mudah memicu konflik. Di sini GM menekankan perlunya pengelolaan konflik sebagai salah jalan yang mesti ditempuh agar demokrasi tak mati.

Pada sebuah rezim yang totaliter, dalam hal ini misalnya Orba, individu seperti tak mendapat tempat dalam percaturan kemasyarakatan. Pendapat yang berbeda dengan pemerintah dianggap layaknya dosa, konflik adalah pembawa malapetaka. Psikologi totalitarianisme, katanya, selalu punya asumsi bahwa “siapa saja yang tak bersama kita adalah musuh kita.”<sup>203</sup> Kalau pun totalitarianisme mengenal konflik, maka konflik itu harus selalu berarti konflik dengan orang lain, dengan yang “bukan-kita”. Karena “kita” secara definitif tak akan bertikai. Bagi GM, kondisi rezim totaliter seperti inilah yang akan selalu menganggap cemas konflik dalam masyarakat. GM berpendapat kecemasan itu muncul karena sikap masyarakat kita yang cenderung menganggap konflik selalu mengandung resiko dan resiko

---

<sup>203</sup> Goenawan Mohamad. “Konflik” dalam *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Grafiti. 1990, hlm. 364. (Dimuat di *Tempo*, 23 Mei 1981).

bukanlah sesuatu yang harus diambil. Ia mengungkap segi historis masyarakat kita bahwa dalam suasana masyarakat feodal, suatu konflik akan merusak tatanan luhur yang telah terbentuk. Dari sikap seperti itu kemudian muncullah kecemasan akan konflik, seolah konflik adalah suatu hal yang amat menakutkan. Lantas terbit sikap yang tak terbiasa dalam menghadapi sengketa dan menanggapi konflik, serta sikap tak percaya diri. Di titik inilah GM menekankan perlunya *management of conflicts* dalam upaya mewujudkan demokrasi. Tanpa itu, kondisi kehidupan bersama dalam alam demokrasi akan kehilangan arti: pihak yang menang akan memutlakkan pendapatnya kepada pihak yang kalah.

Manakala sikap memutlakkan itu yang muncul, suara-suara yang berbeda pun akan ditekan, ia jadi terhimpit. GM percaya bahwa demokrasi adalah suatu sistem yang bisa ditawarkan untuk membuka himpitan itu, membuka suara dari bawah yang terus menerus ditekan. Jika demokrasi dimaknai sebagaimana demikian, maka di dalamnya proses menuju suatu masyarakat terbuka, yang menghormati perbedaan pendapat, akan terlaksana dengan baik. Sebab bagaimanapun juga,

“...Keinginan untuk mewujudkan demokrasi... tak cuma bisa dilihat dari atas. Ia harus dilihat dari bawah: dari posisi cacing yang terinjak, dengan gerak yang selalu diawasi, dengan kata-kata yang selalu dikekang.”<sup>204</sup>

Dengan kata lain, demokrasi tumbuh dari suasana masyarakat bawah yang tertekan oleh kekuasaan, bukan oleh keinginan yang elitis.

GM memang tampaknya menyadari bahwa dalam kontestasi pelbagai ideologi di dunia untuk membentuk suatu sistem masyarakat yang baik, demokrasi adalah pilihan yang paling mungkin. Ini pun dengan asumsi bahwa demokrasi mampu menjamin suatu sistem “di mana tak ada orang yang dijatuhi hukuman hanya karena berbeda pendapat, di mana tak ada orang yang kehilangan tanah dan rumah hanya karena yang kuat dan kuasa menghendakinya...”<sup>205</sup> Ini berarti dengan mekanisme yang diatur oleh hukumlah demokrasi bisa berjalan. Sebab dengan hukum itu pulalah orang yang punya kuasa diatur untuk tak bertindak sewenang-wenang. GM menulis:

---

<sup>204</sup> Goenawan Mohamad. “Demokrasi” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 30. (*Tempo*, 10 Juni 1989).

<sup>205</sup> Goenawan Mohamad. “Cemas” dalam *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti. 1999, hlm. 27-28. (*Tempo*, 18 Mei 1991).

“...yang berkuasa adalah hukum. Ada mesin kekerasan yang dimiliki sejumlah orang khusus, tapi tak ada senjata yang ditodongkan, agar kekuasaan ditegakkan. Tak ada teror yang dikembangkan, agar orang takut dan tunduk. Tak mengherankan bila dari sana bisa bergerak demokrasi, keterbukaan.”<sup>206</sup>

Dengan cara pandang seperti itu GM sekaligus telah memberi afirmasi tentang sikapnya yang senantiasa menolak cara-cara kekerasan dan semena-mena di luar hukum. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang senantiasa mengakui betapa tak mudahnya menyelesaikan “satu pertentangan politik antarmanusia dengan cara sebuah mesin penghancur: renggut, lantakkan, lumat.”<sup>207</sup>

Tapi yang jadi persoalan kemudian adalah bagaimanakah di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, demokrasi bisa diwujudkan? Praanggapan mengapa terjadi keberatan tersendiri di kalangan masyarakat dunia ke-3 adalah bahwa seolah-olah mereka tak butuh demokrasi. Pendapat ini lazim terjadi di kalangan sarjana Barat ketika mereka memandang dunia Timur. Menurut GM, ketika orang-orang Barat punya praanggapan demikian sebenarnya mereka tengah mengukuhkan sikap pongah yang khas: meletakkan diri lebih tinggi ketimbang orang-orang Timur. Sedangkan ketika orang-orang Timur menganggap bahwa mereka juga butuh demokrasi, bahkan dengan menunjukkan latarbelakang historis yang akrab dengan “musyawarah mufakat” dan “gotong royong”—suatu ciri khas yang bagi mereka telah menunjukkan adanya nilai-nilai demokratis dalam tradisi Timur, mereka sebenarnya sedang terjebak dalam ironi: musyawarah dan gotong royong justru lebih sering dipakai di Timur untuk menunjukkan betapa kelirunya demokrasi ala Barat.

GM lebih lanjut menyatakan bahwa kedua anggapan ini pun tidak tepat bila dihubungkan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Sebab, bagi GM, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat bisa berubah seiring perputaran roda sejarah. Ia mengambil contoh perkembangan demokrasi di Inggris dan Amerika, di mana demokrasinya dilahirkan tak hanya dari nilai-nilai yang ada, tapi juga dari pengingkaran terhadap nilai-nilai itu. Karena itu, baik di Timur maupun Barat, demokrasi adalah kebutuhan yang mendesak dan demokrasi itu sendiri merupakan sesuatu yang universal. Di samping itu, muncul masalah lain yaitu ketika orang-orang Timur, yang tahu

<sup>206</sup> *Op. Cit.*, hlm. 120. “Le Machine”. (*Tempo*, 22 Juli 1989).

<sup>207</sup> *Op. Cit.*, hlm. 10. “Violeta”. (*Tempo*, 12 Mei 1990).

bagaimana rasanya dijajah, tak ingin lagi menjadikan Barat sebagai anutan. Mereka memang mengakui bahwa orang-orang di Barat dengan demokrasinya bisa hidup layak dan bebas kediktatoran. Tapi mereka ingin punya kebanggaan, dengan cara menemukan jalan demokrasinya sendiri. GM mengutip Bung Karno yang pada tahun 1957 pernah mengatakan, “Indonesia, carilah demokrasimu sendiri!” GM sendiri mengakui, mencari sendiri jalan demokrasi memang tak mudah; kalau pun dapat, belum tentu ia akan tak macet; malah terkadang dipaksa untuk berjalan. Karena itu, lanjutnya, yang harus dicari pada awalnya memang bukan “cara yang lain daripada yang lain;” juga bukan “yang sama seperti yang lain.” Tapi sebuah sistem yang:

“...senantiasa dapat diperbaiki kekurangannya, secara segera, secara damai, teratur, terbuka. Sebuah sistem di mana hukum berlaku untuk siapa saja, baik yang sedang kuasa atau tak kuasa... Sebuah sistem yang memungkinkan orang mencari alternatif-alternatif tanpa ketakutan untuk kehilangan kerja, disekap, atau dibunuh dengan gampang.”<sup>208</sup>

Apapun namanya (demokrasi atau bukan), kata GM, sistem seperti demikianlah yang paling mampu untuk membawa masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Ke arah suatu masyarakat terbuka yang tak pernah mengingkari bahwa dirinya senantiasa mengandung alpa. Bahkan dalam suatu masyarakat yang dikungkung oleh kekuasaan totaliter pun, GM menyimpulkan bahwa meski demokrasi “rumit dan riuh” ia tak mudah untuk terus menerus ditolak.

Oleh karena itu, proses pencarian “demokrasimu sendiri” bagi orang Indonesia, menurut GM, tak akan berhenti. Indonesia memang punya sejarah panjang berkaitan dengan pengalamannya berdemokrasi. Pada dasawarsa 1950-an Indonesia merasakan sistem demokrasi parlementer (atau dalam konteks tertentu disebut ‘demokrasi liberal’) yang ditandai dengan kuatnya kedudukan partai-partai politik dalam pentas politik nasional, yang ditandai pula dengan ketidakstabilan pemerintahan, karena tak ada satu pun partai yang memperoleh kemenangan mutlak dalam Pemilihan Umum. Kemudian Bung Karno pada akhir dasawarsa 1950-an memperkenalkan ‘Demokrasi Terpimpin’, sebuah demokrasi yang diperkenalkan Bung Karno sebagai demokrasi yang “asli Indonesia.” Tapi demokrasi macam ini, yang punya niat baik untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tak mengenal

---

<sup>208</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43. “K.D.”. (*Tempo*, 14 Maret 1992).

konflik—ibarat keluarga yang rukun dan tentram, gagal di tengah jalan, justru diakibatkan oleh suatu konflik besar yang memakan banyak korban (baca: G30S dan peristiwa pembantaian sesudahnya). Bahkan GM sendiri menganggap Bung Karno—ketika Bung Karno mengimpikan Indonesia yang tanpa konflik—luput dalam melihat sejarah Indonesia, karena sejarah Indonesia adalah sebuah sejarah yang penuh konflik. Pergulatan terus menerus dalam mencari “demokrasimu sendiri,” menurut GM, sudah benar dan tepat.

“...rasanya benar bila ‘demokrasi’ tak ada yang ‘sesungguhnya’, atau ketentuannya tak pernah final. Maka meniru demokrasi yang sudah ada justru bukan cara yang tepat. Bung Karno benar: kita harus mencari. Tapi mencari bukanlah menentukan rumus. Mencari membutuhkan kemerdekaan menjelajah, kebebasan menghadirkan yang lain, keluasaan mengoreksi apa yang dicoba...”<sup>209</sup>

Sementara proses pencarian itu dilakukan, pada saat bersamaan orang-orang Timur, termasuk juga orang Indonesia, berharap besar agar suatu sistem, sebuah ideologi, mesti punya kegunaan praktisnya. Praktis di sini bisa diartikan misalnya bagaimana demokrasi bisa menjaga disparitas kaya-miskin agar si kaya dan si miskin tak terus menerus bergolak lantaran disparitasnya itu, atau bagaimana agar demokrasi bisa menghilangkan ketidakadilan sehingga orang-orang kecil tak lagi diperlakukan sewenang-wenang. Ini memang menjadi persoalan tersendiri, apalagi ketika mesin kekuasaan di Indonesia seperti tengah berjalan sendiri dengan mengabaikan persetujuan orang lain dan di antara anggota masyarakat makin lama makin asing dan berjauhan. Bagi GM, ideologi yang dirumuskan dan disebar dari atas ke bawah mungkin sampai suatu masa tertentu akan bisa jadi perekat, tapi pada akhirnya keterbatasan ideologi dalam merumuskan realitas masyarakat dan terbenturnya ideologi kepada perubahan-perubahan yang berlangsung dalam realitas itu menyebabkan ideologi makin dijauhi oleh masyarakat.<sup>210</sup>

Dengan mengambil contoh apa yang terjadi di Eropa Timur, GM menyatakan bahwa zaman pengaruh ideologi, yang semula jadi perekat, sudah berakhir. Jika memang demikian lah yang terjadi, GM mengakui bahwa memang tak ada alternatif memadai yang bisa ditawarkan sebagai solusi. Tapi, lanjutnya, sudah waktunya untuk

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70. “Demokrasi, Lagi”. (*Tempo*, 29 Januari 1994).

<sup>210</sup> *Op. Cit.*, hlm. 72. “Asongan”. (*Tempo*, 24 Februari 1990).

memikirkan tentang hidupnya suatu proses politik yang bisa menggugah sebagian besar orang untuk merasa ikut punya pengaruh dalam menentukan apakah perlu kesewenangan terhadap rakyat kecil terus menerus terjadi dan suatu prosedur yang menyebabkan masyarakat bisa sepakat apakah suatu tindakan bisa dikatakan adil atau tak adil.<sup>211</sup> GM memang tak secara eksplisit mengatakan bahwa proses dan prosedur itu adalah demokrasi, namun ia hanya menyatakan dengan retorikanya yang khas: “Saya tak tahu apakah itulah yang dinamakan ‘demokrasi’. Saya tak yakin bahwa kita perlu repot benar dengan soal apa namanya.”<sup>212</sup>

Karena bisa memunculkan proses dan prosedur yang merawat keadilan itulah GM berpendapat bahwa demokrasi mesti tetap dijaga, yaitu dengan cara perjuangan terus menerus untuk mewujudkan keadilan. Meskipun kadang terasa masyarakat seakan tak membutuhkannya. Tapi, bagaimanapun juga orang akan membutuhkannya, yaitu tatkala mereka berpikir bahwa keselamatan demokrasi sama dengan keselamatan diri mereka sendiri. Terutama ketika mereka berhadapan dengan kesewenang-wenangan yang tak terkontrol lagi. Dalam kondisi seperti itu individu tak lagi nampak sebagai sesuatu yang dipertentangkan dengan kebersamaan sosial. Dan pada saat itulah, kata GM, individu tampak sebagai si lemah yang perlu dilindungi.<sup>213</sup>

Pada saat yang sama, demokrasi juga melindungi masyarakat dari sikap “kultus individu” terhadap seorang pemimpin yang dianggap besar. Di masa Orba, presiden yang berkuasa terlalu lama menyebabkan macetnya proses demokrasi di sana-sini. Apalagi seiring dengan memanjangnya usia kekuasaannya, penguasa Orba seakan cemas kepada demokratisasi dan keterbukaan. Karena itu, menurut GM, demokrasi diperlukan untuk dapat menjaga mekanisme pergantian kepemimpinan yang rutin yang didasari atas kesadaran bahwa “orang besar” tak akan selamanya menjadi besar.

---

<sup>211</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> Goenawan Mohamad. “Nader” dalam *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Grafiti. 1990, hlm. 359. (*Tempo*, 10 September 1977).

“Sebuah demokrasi... memerlukan sebuah sistem yang mengelakkan ketergantungan kepada seorang individu. Bila A dipilih ke atas, itu adalah karena A memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dan disetujui sebelumnya, bukan karena persyaratan itu dibikin sedemikian rupa agar cocok dengan keadaan si A. Maka, si A boleh saja tidak ada, asal ada orang lain—mungkin si B atau si C—yang memenuhi kriteria yang sudah ada itu.”<sup>214</sup>

Agaknya pernyataan ini bisa dibaca dalam konteks kekuasaan Orba yang demikian lama hingga enggan melepas kekuasaannya. Saat itu, Soeharto sudah lebih dari 20 tahun memegang kendali Orba. Sementara di berbagai kalangan mulai bermunculan perlunya suksesi kepemimpinan nasional.<sup>215</sup> GM lalu menawarkan pandangannya tentang bagaimana sebaiknya sebuah demokrasi dijalankan di Indonesia untuk mengatur proses pergantian pimpinan itu. Selanjutnya GM menyatakan, sebuah sistem politik bisa dikatakan “dewasa” bila ketergantungan kepada seorang individu bisa dihindari atau dikurangi. Sebab ketergantungan macam ini justru akan membawa malapetaka bagi masyarakat, yaitu ketika menyebabkan demokrasi menjadi macet dan makin bergantung pada keputusan personal sehingga ia tak bisa menolak datangnya kerapuhan. Sebuah sistem yang mantap dan tidak mudah terguncang, katanya pula, adalah “sistem yang bersandar pada kerendahan hati kepada kenyataan historis.”<sup>216</sup> Yaitu kenyataan untuk mengakui bahwa kita butuh seleksi kepemimpinan yang rutin dan tidak berdarah-darah, karena Indonesia, kata GM, punya pengalaman buruk dengan yang namanya suksesi.

Meski GM percaya demokrasi adalah sistem yang paling mungkin diterapkan, ia memandang bahwa demokrasi itu sendiri bukan sesuatu yang ideal, bahkan, katanya, “kadang terdengar konyol.”<sup>217</sup> Ia mengambil contoh lewat penerapan demokrasi pada masa Yunani kuno. Di masa itu, demokrasi sedang menemukan banyak pengagumnya hingga kadang masyarakat Yunani menganggapnya sebagai sistem yang sempurna. Tapi ada orang bernama Socrates yang menolak demokrasi. Baginya, demokrasi hanya akan membawa malapetaka karena pemerintahan yang

<sup>214</sup> *Op. Cit.*, hlm. 62. “Pemimpin”. (*Tempo*, 5 Maret 1988).

<sup>215</sup> Adam Schwarz. *A Nation in Waiting: Indonesia in The 1990s*. Sydney: Allen & Unwin. 1994, hlm. 37-39.

<sup>216</sup> *Op. Cit.*

<sup>217</sup> Goenawan Mohamad. “Filipina” dalam *Catatan Pinggir 2*. Jakarta: Grafiti. 2006, hlm. 54. (*Tempo*, 10 September 1983).

dikerjakan oleh orang banyak menimbulkan proses yang carut marut dalam mengambil keputusan negara. Socrates lebih mengharapkan aristokrasi: pemerintahan yang diampu oleh orang-orang berpengetahuan dan berkemampuan. Ia seperti tidak sabar menghadapi kekonyolan para “juru mudi, tukang batu, peniup seruling” yang duduk di majelis perwakilan dalam mengelola sebuah *polis*. Contoh lain yang GM angkat adalah tentang Oliver Cromwell di Inggris abad ke-17 ketika ia cemas dan tak sabar dengan parlemen yang hanya terus menerus berdebat. Akhirnya pada 20 April 1653, Cromwell mengepung dan membubarkan parlemen.

GM mengakui bahwa sikap ketidaksabaran yang ditunjukkan oleh Socrates dan Cromwell bisa juga terjadi di mana saja dan kapan saja. Demokrasi seakan tak cukup layak untuk mengelola suatu negara. Kekhawatiran terhadap demokrasi yang paling utama ialah demokrasi membuat pemerintahan cenderung tidak stabil, padahal stabilitas politik diperlukan untuk menjamin sebuah kekuasaan akan langgeng. Bagi GM, justru di saat itulah orang jadi tahu bahwa demokrasi adalah suatu sistem yang membuka diri untuk terus menerus disanggah dan dikritisi, atau bahkan ditolak. Demokrasi bukan suatu sistem yang sempurna, tapi karena pada dasarnya demokrasi justru mengakui ketidaksempurnaannya, ia adalah sistem yang paling mungkin untuk mengatur sebuah masyarakat. GM menulis:

“...demokrasi memang mengandung diri untuk diludahi, atau dielakkan. Barangkali karena ia dengan mudah mempertontonkan diri bukan sebagai taman firdaus seperti yang banyak dibayangkan.”<sup>218</sup>

Mungkin karena itulah demokrasi butuh proses, ia mesti melampaui pengujian dan percobaan dulu sebelum semua masyarakat menyepakati bahwa demokrasilah sistem yang paling mungkin. Dalam sejarahnya, proses itu memang banyak menemui batu sandungan, bahkan meminta banyak korban. Tapi, kenyataan sejarah menunjukkan demokrasi memang tak bisa sepenuhnya ditampik. “Demokrasi”, kata GM, “rasanya memang tak bisa dipesan sekaligus, seperti kalau kita memesan nasi bungkus.”<sup>219</sup>

---

<sup>218</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>219</sup> Goenawan Mohamad. “Parlemen” dalam *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti. 2005, hlm. 28. (*Tempo*, 13 Mei 1989).

## BAB 6

### KESIMPULAN

GM berangkat dari lingkungan kehidupan yang kental suasana intelektualnya. Sedari kecil dan remaja, ia sudah berkenalan dengan pemikiran para penulis dan intelektual Barat melalui buku-buku yang dibacanya. Menginjak masa dewasa, ketika ia mulai berkuliah di Universitas Indonesia, kehidupan intelektualnya makin terasah, salah satunya berkat pergaulan yang intens dengan para cendekiawan dan orang-orang yang punya keminatan sama dengannya. Ketika ia terlibat dalam peristiwa Manifest Kebudayaan pada pertengahan 1960-an, terlihat jelas di aliran pemikiran mana ia berpihak. Jika boleh kita mengatakan bahwa corak pemikiran yang ditunjukkan oleh orang-orang Manifest Kebudayaan adalah terpengaruh oleh pemikiran “Barat” dan cenderung “liberal”—meskipun memang tak terlalu jelas apa makna dari dua kata itu sebenarnya, seperti juga sering disangsikan oleh GM—kita bisa membaca ke arah mana pemikiran GM tertuju.

Meski demikian, di sisi lain GM juga mengasah pemikirannya dengan bacaan mendalam atas khazanah literatur-literatur lokal lewat kisah wayang, *folklore*, atau sejarah Indonesia sendiri. Hamid Basyaib, dalam kata pengantar untuk buku GM *Setelah Revolusi Tak Ada Lagi*, menyebut GM sebagai “orang Barat yang lahir di Batang.”<sup>220</sup> Agak berlebihan memang, sebab bagaimanapun juga penyebutan “Barat” atau “Timur” atau “bukan-Barat” dianggap GM sebagai kategorisasi yang *absurd*. Tapi, hal ini menunjukkan betapa kuat pengaruh “Barat” dalam percikan pemikirannya, bahkan, pada tingkat tertentu, berpengaruh pada cara pandangnya.

Tapi mungkin lebih tepat jika kita katakan GM berhasil melampaui proses dialektika “Barat” dan “Timur” dengan tidak gagap, tidak dijangkiti oleh inferioritas khas “orang Timur” dalam memandang “Barat”—sesuatu yang kerap kali menjadi problem para cendekiawan “Timur” ketika menghadapi “Barat.” Ia menemukan sintesis, sebagai hasil dialektika itu, dengan cara senantiasa mempertanyakan dan

---

<sup>220</sup> Hamid Basyaib. “Ke-Lain-an Goenawan Mohamad”. Pengantar dalam Goenawan Mohamad. *Setelah Revolusi Tak Ada Lagi*. Jakarta: Alvabet. 2004, hlm. vii.

membongkar berbagai pemahaman kita atas segala sesuatu. Memang akibatnya adalah timbulnya kesan kuat bahwa tulisan-tulisan GM, terutama dalam Catatan Pinggir, tak punya pendirian yang jelas alias selalu ragu-ragu, malah terkadang muram.

Tapi persoalan ini bisa kita kembalikan kepada hal yang sederhana: Catatan Pinggir memang tidak berpretensi untuk bersikap “tegas”. Ia, sesuai dengan namanya, lebih punya maksud untuk berada di “pinggir”, lebih ditujukan sebagai suatu refleksi daripada observasi. Refleksi biasanya muncul dari posisi orang yang berada di “pinggir”, untuk mengamati sesuatu di depannya, sehingga selalu terbentang jarak antara subyek dan obyek. Sebaliknya, observasi memerlukan keterlibatan intens dari subyek ke dalam obyek. Meski demikian, nampaknya kadang terkesan GM cenderung menjadi manusia “ulang-alik” dalam konteks ini: orang yang bergerak keluar-masuk, bolak-balik, dari “pinggir” menuju “pusat” dan sebaliknya.

Tatkala GM berbicara perihal kebebasan, GM memandang kebebasan sebagai suatu komponen penting dalam hubungan manusia dengan manusia. Kebebasan di sini dimaknai sebagai kebutuhan agar dalam hubungan antar-manusia bisa tercipta suatu keadaan di mana manusia yang satu tak akan bisa seenaknya bertindak kepada manusia yang lain, karena dengan kebebasan itu sikap toleransi akan tumbuh. GM juga menggarisbawahi bahwa kebebasan tak bisa ditanggihkan, kebebasan mesti dijalankan dalam tiap kondisi zaman. Sebab ketika kebebasan ditanggihkan, seperti halnya yang terjadi pada masa Orba, yang terjadi adalah proses pembunuhan pelan-pelan terhadap prinsip kebebasan. GM cenderung menyepakati bahwa kebebasan bisa menyamping berjalan dengan hal-hal lain seperti pembangunan ekonomi dan penciptaan stabilitas politik. Kebebasan bukan pihak antagonis dalam proses kemajuan masyarakat. Dalam kondisi kekuasaan yang tak menghendaki dan tak menganggap perlu kebebasan bagi masyarakatnya pun kebebasan harus tetap diperjuangkan. Orang berkehendak bebas karena memang demikianlah fitrahnya sebagai manusia.

Ketika berbicara tentang kekuasaan dan hubungan antara “yang berkuasa” dengan “yang dikuasai”, khususnya dalam rezim totaliter, GM melihat adanya

kecenderungan penguasa senantiasa dirundung curiga dan terkadang menganggap suara-suara kritis sebagai sesuatu yang mengancam stabilitas dan kedudukannya. Sikap curiga itu justru menjadi asal-usul ketidakstabilan kekuasaan itu sendiri. Pada saat itu, penguasa sebenarnya tengah mengakui keterbatasannya. Dalam keterbatasannya itu sebenarnya kekuasaan juga diisi oleh orang-orang yang terbatas. Karena itu, kekuasaan mesti membuka diri terhadap sebuah mekanisme yang memberi lebih banyak kesempatan kepada penguasa untuk bisa menahan diri dengan kekuasaan di tangannya. Jika mekanisme itu tak dapat terlaksana, yang kemudian terjadi adalah kekerasan pemegang kuasa terhadap rakyatnya sendiri.

Ketika seorang penguasa merasa dirinya tak berbeda dengan negara, penguasa dengan mudah menggunakan dalih, misalnya, “demi kepentingan negara”, untuk memberangus mereka yang dianggap berseberangan dengan, atau mengganggu, penguasa. Di sisi lain, negara juga bisa saja melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, utamanya kepada orang kecil. Hal ini terjadi lantaran seolah tidak ada garis batas yang jelas antara masyarakat dan negara, padahal keduanya adalah sesuatu yang berbeda. Kasus perampasan becak oleh petugas Tibum dan kasus pembunuhan Marsinah diangkat GM sebagai contoh bagaimana negara melakukan kesewenangan terhadap rakyat kecil. Dalam konteks kekuasaan dan perlunya sikap toleransi, GM berbicara tentang *liyan, the other*. Kehadiran liyan dalam politik dimaknai sebagai pentingnya sikap membuka diri dan menghormati kemajemukan, karena itu sikap toleransi menjadi sikap yang tak bisa ditawar dalam hubungan antar masyarakat dan, pada tingkat tertentu, hubungan penguasa-rakyat.

Sementara itu, ketika ia mengajukan pemikirannya mengenai demokrasi, GM punya prinsip yang khas: demokrasi memang sebuah sistem yang paling mungkin diterapkan untuk mengatur masyarakat, karena, misalnya, demokrasi bisa merawat keadilan, namun pada saat yang sama demokrasi juga mengandung kelemahan-kelemahannya sendiri. Dengan kata lain demokrasi bukan sesuatu yang sempurna dan benar-benar ideal. Tapi justru karena itulah demokrasi diperlukan: karena pada dasarnya demokrasi mengakui ketidaksempurnaannya, ia adalah sistem yang paling mungkin untuk mengatur suatu masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Surat-Surat Pribadi (Koleksi Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin):

- Surat GM kepada H.B. Jassin, 21 Desember 1961.  
 Surat GM kepada H.B. Jassin, 3 Agustus 1962.  
 Surat GM kepada H.B. Jassin, 30 Januari 1966.  
 Surat GM kepada H.B. Jassin, 17 Mei 1966.  
 Surat GM kepada H.B. Jassin, 20 Juni 1966.  
 Surat GM kepada Soe Hok-Gie, 28 Juli 1966.  
 Surat Arief Budiman kepada GM, Juli 1966.  
 Undangan pernikahan GM dengan Widarti Djajadisastra, 14 Juli 1968.  
 Surat Ivan Kats kepada GM, 20 Oktober 1970.  
 Surat Aristides Katoppo kepada GM, Desember 1973.  
 Surat Aristides Katoppo kepada GM, 12 Januari 1974.  
 Surat Aristides Katoppo kepada GM, 24 April 1974.

### II. Catatan Pinggir

- Goenawan Mohamad. *Catatan Pinggir 1*. Jakarta: Grafiti, 1991.  
 ----- . *Catatan Pinggir 2*. Jakarta: Grafiti, 2006.  
 ----- . *Catatan Pinggir 3*. Jakarta: Grafiti, 2005.  
 ----- . *Catatan Pinggir 4*. Jakarta: Grafiti, 1999.

### III. Desertasi

- Dhakidae, Daniel. *The State, The Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry*. Desertasi tidak diterbitkan. Ithaca: Cornell University, 1991.

#### **IV. Surat Kabar dan Majalah**

*Ekspres* (Nomor Contoh), 26 Mei 1970.

*Gadis* No. 1, 7-16 Januari 1985.

*Harian Kami*, 6 November 1970.

*Indonesia Raya*, 9 November 1970.

*Kompas*, 4 November 1970.

*Mutiara* No. 293, April-Mei 1983.

*Sinar Harapan*, 2 November 1970, 6 November 1970.

*Tempo*, 1 Maret 1971, 29 Januari 1972, 26 Januari 1974, 27 Maret 1982, 1 Maret 1986, 11 Juni 1994.

#### **V. Jurnal Ilmiah**

Foulcher, Keith. *A survey of events surrounding Manikebu. The struggle for cultural and intellectual freedom in Indonesian literature*. BKI 125 No. 4, 1969.

#### **VI. Buku-Buku GM Selain Catatan Pinggir:**

Mohamad, Goenawan. *Potret Seorang Penjair Muda sebagai Si Malin Kundang: Kumpulan Esai*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1972.

----- . *Seks, Sastra, Kita*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

----- . *Kesusastraan dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

----- . *Kata, Waktu: Esai-esai Goenawan Mohamad 1960-2001*. Jakarta: PDAT, 2001.

----- . *Sajak-sajak Lengkap 1961-2001*. Jakarta: Metafor Publishing, 2001.

----- . *Eksotopi: Tentang Kekuasaan, Tubuh, dan Identitas*. Jakarta: Grafiti, 2002.

----- . *Setelah Revolusi Tak Ada Lagi*. Jakarta: Alvabet, 2004.

## VII. Buku:

Anderson, Benedict R. O'G. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Matabangsa, 2000.

Alumni Majalah Tempo. *Buku Putih Tempo: Pembredelan Itu*. Jakarta: Yayasan Alumni Tempo, 1994.

------. *Mengapa Kami Menggugat*. Jakarta: Yayasan Alumni Tempo, 1995.

Aspinall, Edward. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. California: Stanford University Press, 2005.

Bourchier, David dan Vedi R. Hadiz (ed.). *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*. Jakarta: Grafiti, 2006.

Budiman, Arief (ed.). *State and Civil Society in Indonesia*. Clayton: Monash Asia Institute, 1999.

Colombijn, Freek dan J. Thomas Lindblad (ed.). *Roots of Violence in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2002.

Collingwood, R.G. *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press, 1973.

Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1978.

Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Elson, R.E. *Suharto: A Political Biography*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

------. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi, 2008.

- Emmerson, Donald K. (ed.). *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Eyerman, Ron. *Cendekiawan: Antara Budaya dan Politik*. Jakarta: YOI, 1996.
- Fauzi, Ihsan Ali dan Samsu Rizal Panggabean (ed.). *Demokrasi dan Kekecewaan*. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2009.
- Feith, Herbert dan Lance Castles (ed.). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Hill, Hal (ed.). *Indonesia's New Order: The Dynamics of Socio-Economic Transformation*. New South Wales: Allen & Unwin, 1994.
- Hindley, Donald. *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. California: University of California Press, 1964.
- Hisyam, Muhamad (ed.). *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: YOI, 2003.
- Jenkins, David. *Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Depok: Komunitas Bambu, 2010.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- , *Pembangunan Bangsa: Tentang Nasionalisme, Kesadaran, dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya Media, 1994.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Mahasin, Aswab dan Ismed Nasir (ed.). *Cendekiawan dan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Mas'ood, Mohtar. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- McDonald, Hamish. *Suharto's Indonesia*. Blackburn: Fontana, 1980.

- Moeljanto, D.S. dan Taufiq Ismail (ed.). *Prahara Budaya: Kilas-balik Ofensif Lekra/PKI dkk. (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah)*. Jakarta: IPS, 2008.
- Mohamad, Goenawan, dkk. *Celebrating Indonesia: Fifty Years with the Ford Foundation 1953-2003*. Tanpa kota penerbit: Equinox dan Ford Foundation, 2003.
- Raillon, Francois. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Reeve, David. *Golkar of Indonesia: An Alternative to The Party System*. Singapore: Oxford University Press, 1985.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Robison, Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. Singapore: Equinox Publishing, 2008.
- Romano, Angela. *Politics and the Press in Indonesia: Understanding an Evolving Political Culture*. London: Routledge Curzon, 2003.
- Schwarz, Adam. *A Nation in Waiting: Indonesia in The 1990s*. New South Wales: Allen & Unwin, 1994.
- Scott, James C. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: YOI, 2000.
- Soeharto. *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti Diturunkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.* Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Soe Hok-Gie. *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920*. Yogyakarta: Bentang, 2005.
- Steele, Janet. *Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru*. Jakarta: Dian Rakyat, 2007.

- Surjomihardjo, Abdurrachman, dkk. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Tanter, Richard dan Kenneth Young (ed.). *Politik Kelas Menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Teeuw, A. *Sastra Indonesia Modern II*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Toer, Pramoedya Ananta. *Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia*. Jakarta: Lentera Dipantara, 2003.
- Utami, Ayu, dkk. (ed.). *Bredel 1994*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1994.
- Vatikiotis, Michael R.J. *Indonesian Politics under Suharto: The Rise and Fall of The New Order*. London: Routledge, 1998.

### **VIII. Wawancara**

- “Gunawan Mohamad”. Wawancara GM dengan Adham A. Hamzah. *Minggu Pagi* No. 17, 28 Juli 1963.
- “Saya kirim puisi tapi tidak dimuat”. Wawancara GM dengan Redi Panuju. *Minggu Pagi*, 25 November 1984.
- “Lebih Jauh dengan Goenawan Mohamad”. Wawancara GM dengan Arswendo Atmowiloto dan Don Sabdono. *Kompas*, 9 Februari 1986.
- “Wartawan Penyair dari Pesisir”. Wawancara GM dengan Tuti Indra Malaon dan Kemala Atmojo. *Matra* No. 33, April 1989.
- “Goenawan Mohamad: Kita Masih Terbirit-birit dengan Sebuah Sajak”. Wawancara GM dengan Djadjat Sudradjat. *Media Indonesia*, 23 Oktober 1990.
- “Saya Nggak Pernah Memikirkan Cinta”. Wawancara GM dengan Wicaksono. *Mode* No. 3, 4-17 Februari 1991.

“Edan-edanan dengan Goenawan”. Wawancara GM dengan Kemala Atmojo dan Darminto M. Sudarmo. *Humor* No. 13, 10-23 April 1991.

“Problemnya, kalau nanti kembali, dia tak punya teman”. Wawancara GM dengan Victor Manahara. *Tiara* No. 32, 4-17 Agustus 1991.

“Widarti Gunawan”. Wawancara Widarti Gunawan dengan Rita Nariswari Pramulyani dan Antyo Rentjoko. *Jakarta-Jakarta* No. 398, 19-25 Februari 1994.

“Hanya Ada Seorang Wanita”. Wawancara GM dengan Trias Yusuf. *Suara Merdeka*, 7 Agustus 1994.

“Goenawan Mohamad: How Low Can You Go”. Wawancara GM dengan Suryansyah. *Tiras*, 2 Februari 1995.

“Saya Takut: Tentang Kemerdekaan Berpikir, Pemecatan PWI, dan Tempo”. Wawancara GM dengan Hermien Y. Kleden, Urry Kartopati, dan Widjajanto. *Matra* No. 107, Juni 1995.

“Teater sebagai Peristiwa”. Wawancara GM dengan Alfred Ginting. *Playboy Indonesia*, April 2007.

## **IX. Sumber Internet**

<http://bss.sfsu.edu/fischer/ir%20360/Readings/Congress%20Cultural%20Freedom.htm>. Diakses pada 20 Juni 2010 pukul 15.36 WIB

Lampiran 1

Contoh 'Catatan Pinggir' yang Bertema Kebebasan. *Tempo*, 25 Februari 1978

Lampiran 2

Contoh 'Catatan Pinggir' yang Bertema Kebebasan. *Tempo*, 30 September 1989

Lampiran 3

Contoh 'Catatan Pinggir' yang Bertema Kebebasan. *Tempo*, 8 September 1990

Lampiran 4

Contoh 'Catatan Pinggir' yang Bertema Kekuasaan. *Tempo*, 14 Desember 1985

Lampiran 5

Contoh 'Catatan Pinggir' yang Bertema Kekuasaan. *Tempo*, 23 Juli 1988

Lampiran 6

Contoh 'Catatan Pinggir' yang Bertema Kekuasaan. *Tempo*, 16 Januari 1993

Lampiran 7

Contoh 'Catatan Pinggir' yang Bertema Demokrasi. *Tempo*, 5 Maret 1988

Lampiran 8

Contoh 'Catatan Pinggir' yang Bertema Demokrasi. *Tempo*, 10 Juni 1989

Lampiran 9

Contoh 'Catatan Pinggir' yang Bertema Demokrasi. *Tempo*, 25 Februari 1990

Lampiran 10

Surat GM kepada H.B. Jassin, 3 Agustus 1962

Lampiran 11

Surat GM kepada Soe Hok-Gie, 20 Juli 1966

Lampiran 12

GM dalam Sebuah Sketsa

## INDEKS

- ABRI 42, 54,  
 Agresi Militer Belanda I 11  
 Albert Camus 49  
 Amangkurat I 59, 67  
 Antonio Gramsci 70  
*Apolitical developmentalism* 57  
 Arief Budiman 16, 28, 29, 30, 31  
 Aristides Katoppo (Aristides) 36, 38  
 B.J. Habibie 54  
 Batang 10, 13  
 Boven Digul 10  
 CCF (*Congress of Cultural Freedom*) 28, 29  
 Chairil Anwar 19  
 Ciputra 33, 34  
 Demokrasi Terpimpin 14, 18, 23, 27, 35, 41, 56, 58, 76  
 D.N. Aidit (Aidit) 18,  
 DPR GR 71  
*Ekspres* 30-34, 37, 42  
 Emily Dickinson 13, 15  
 Fikri Jufri 16, 32, 35  
*Floating mass* 71  
 Fuad Hasan 17  
 Golkar 41, 42, 52, 57  
 H.B. Jassin (Jassin) 7, 15, 16, 19, 30  
*Harian KAMI* 30, 31, 37  
 Hidayat Jati 31  
 Hindia Belanda 48  
 Humanisme (Humanisme universal) 18-22, 27  
 Ivan Kats 29  
 James Joyce 14  
 Lekra 18, 19, 24, 26, 27  
*Liyana* 65, 66, 83  
 Manifes Kebudayaan (Manifes) 19-28, 81  
 Masyarakat madani 58  
 Nono Anwar Makarim 16, 31  
 Opsus 32, 41  
 Orba (Orde Baru) 2-9, 26, 37-39, 42, 44-54, 56-58, 62, 63, 65-67, 69-73, 78, 79, 82  
 Orde Lama 32, 41, 72  
 Pancasila 6, 21-23, 36, 49, 54, 72  
 Pangkoptikamtib 37  
 Parakan 13  
 Paramita 31  
*Parrhesia* 45  
 Pekalongan 10, 11, 13  
 PKI (Partai Komunis Indonesia) 14, 18, 19, 24-26, 29, 30, 66  
 PNI (Partai Nasional Indonesia) 26  
 PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 52  
 Pramoedya Ananta Toer (Pramoedya) 18, 26  
 PSI (Partai Sosialis Indonesia) 16, 17  
 PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) 32, 33, 36, 37, 42  
 Realisme sosialis 18-20  
 Revolusi Prancis 47  
 Rukayah 10  
 S.K. Trimurti 12  
 Salim Said 16  
*Siasat* 19  
 SIUPP 5, 37, 38, 54  
 Soe Hok-Gie 11, 29, 31  
 Soeharto 2, 37, 41, 54, 57, 71, 72, 79  
 Soekarno 14, 28, 30, 42, 56  
 SOKSI 25  
 Stalin 59  
 Surat Kepertjajaan Gelanggang 19  
 Sutan Takdir Alisjahbana 47  
*Tempo* 2-4, 16, 34-40, 52-55, 73  
 Thomas Jefferson 61  
 Tritura 29  
 Uni Sovyet 46  
 Widarti Djajadisastra 31  
 Wiratmo Soekito (Wiratmo) 16, 21, 22, 25, 26  
 Zaid Mohamad 10  
*Zaman Baru* 19

## **TENTANG PENULIS**

Ivan Aulia Ahsan lahir di Gang Kauman, Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, pada hari Sabtu Wage tanggal 30 Agustus 1986. Ibunya mengajar Quran-Hadis di MTs Negeri. Bapaknya guru Matematika SMP Negeri. Belajar sejarah di Universitas Indonesia sejak 2004.